



STRATEGI PENGEMBANGAN
DAYA TARIK WISATA
**TANJUNG
MALLASORO**
KABUPATEN JENEPONTO

STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA TANJUNG MALLASORO KABUPATEN JENEPONTO



STRATEGI PENGEMBANGAN
DAYA TARIK WISATA
**TANJUNG
MALLASORO**
KABUPATEN JENEPONTO

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd., CHE
Buntu Marannu Eppang, Ph.D., CHE
Andi Ade Zulkifli, S.ST.Par., MM.
Dr. Ali Muhtasom, MM.



POLITEKNIK PARIWISATA
MAKASSAR
2020

ISBN 978-623-94120-3-6



9 786239 412036



POLITEKNIK PARIWISATA
MAKASSAR
2020

STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA TANJUNG MALLASORO KABUPATEN JENEPONTO

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE
Buntu Marannu Eppang, Ph.D.CHE
Andi Ade Zulkifli, S.ST.Par. MM
Dr. Ali Muhtasom, MM

**Penerbit:
Politeknik Pariwisata Makassar
2020**

**STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
TANJUNG MALLASORO KABUPATEN JENEPONTO**

Penulis:

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE
Buntu Marannu Eppang, Ph.D.CHE
Andi Ade Zulkifli, S.ST.Par. MM
Dr. Ali Muhtasom, MM

ISBN: 978-623-94120-3-6

Editor:

Muhammad Zainuddin Badollahi

Tata Letak/Desain Cover:

Ahmad Suthami Putra

Penerbit:

Politeknik Pariwisata Makassar

Redaksi:

Jl. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga Kota Mandiri
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224
Telp/Fax +62411 838456
Email: email@poltekparmakassar.ac.id

Cetakan Pertama, Juni 2020

Hak Penerbitan © 2020 Politeknik Pariwisata Makassar

*Dilarang mengutip dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
apapun, baik cetak photoprint, microfilm tanpa ijin tertulis dari pengarang
dan/atau penerbit.*

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian daerah serta menjadi media pelestarian alam dan budaya sekaligus memperkenalkan potensi keindahan alam, letak strategis, kemudahan akses, keramahan penduduk serta sistem nilai masyarakat yang ramah dan religius

Politeknik Pariwisata Makassar bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro sebagai salah satu strategi pengembangan kepariwisataan yang menghasilkan arahan rencana pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata sekaligus memicu minat kunjungan, pertumbuhan angka kunjungan dan penerimaan dari wisatawan.

Pelaksanaan survey, diskusi kelompok terfokus dan serangkaian pembahasan bersama *stakeholders* kepariwisataan Kabupaten Jeneponto telah dilakukan untuk menyepakati dan menyempurnakan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro sebagai dokumen publik yang dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro Kabupaten Jeneponto.

Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Jeneponto;
2. Kepala Dinas Pariwisata Jeneponto beserta segenap jajarannya;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
4. Kepala Desa Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
5. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT menjadikan ibadah untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2020

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB - 1	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	6
C. Tujuan	8
D. Sasaran Kegiatan	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Pendekatan Perencanaan	10
G. Lingkup Wilayah Studi	17
H. Tahapan Kegiatan dan Jangka Waktu Pelaksanaan	17
I. Sistematika Pelaporan	19
BAB - 2	
KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO	
A. Kepariwisata Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional	21
B. Kepariwisata Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Prov Sulawesi Selatan	26
C. Kepariwisata Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jeneponto	31
BAB - 3	
KONDISI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO	
A. Sejarah Kabupaten Jeneponto	40
B. Kondisi Fisik Kabupaten Jeneponto	43
C. Potensi Pariwisata Kabupaten Jeneponto	45
D. Perekonomian Kabupaten Jeneponto	52
BAB - 4	
RENCANA PENGEMBANGAN Daya Tarik Wisata BIRTARIA KASSI	
A. Kondisi Eksisting Daya Tarik Wisata	57
B. Desain Pengembangan Daya Tarik Wisata	67

BAB - 5

PENUTUP

A. Kesimpulan	138
B. Saran	138
Daftar Pustaka	140
Identitas Penulis	143

DAFTAR TABEL

NO.	No TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.	1	Bagan Kerangka Penyusunan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, Desa Mallasoro kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	18
2.	2	Jadwal Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	19
3.	3	Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Makassar dan Sekitarnya Dalam RIPPARDA Provinsi Sulawesi Selatan	31
4.	4	Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 - 2017	45
5.	5	Potensi Wisata Alam Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	46
6.	6	Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	48
7.	7	Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	51
8.	8	Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017	52
9.	9	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017 (Dalam Persen)	56
10.	10	Luas Wilayah Kecamatan Bangkala Menurut Desa/ Kelurahan	59
11.	11	Ketersediaan Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet	103
12.	12	Ukuran Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet	103
13.	13	Ukuran Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet Bagi Wisatawan Berkebutuhan Khusus	104

DAFTAR GAMBAR

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	1	Pendekatan Pengembangan Berkelanjutan	12
2	2	Pengembangan Berbasis Masyarakat	14
3	3	Pendekatan Kesesuaian Antara Aspek Produk dan Pasar	14
4	4	Konsep Klaster Destinasi Pariwisata	16
5	5	Sistem Kepariwisata Nasional (Tatanan Makro)	23
6	6	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taka Bonerate dan Sekitarnya	25
7	7	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bulukumba dan Sekitarnya	30
8	8	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jeneponto	44
9	9	<u>Lokasi Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro</u>	58
10	10	Akses Masuk Tanjung Mallasoro dari Jalan Poros	61
11	11	Akses Jalan Pantai Tanjung Mallasoro	62
12	12	Kondisi Pantai pada Tanjung Mallasoro	63
13	13	Kondisi Atraksi Pada Wilayah Lithoral Di Tanjung Mallasoro	64
14	14	Kondisi Aktivitas Kitesurfing di Tanjung Mallasoro	64
15	15	Kondisi Eksisting Homestay di Tanjung Mallasoro	65
16	16	Kondisi Eksisting Area Yang Dijadikan Tempat Parkir Pada Kawasan Tanjung Mallasoro	66
17	17	Kondisi Eksisting Bangunan Pengelola Resort Di Kawasan Tanjung Mallasoro	67
18	18	Rencana Pemanfaatan Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	69
19	19	Wilayah Pemanfaatan Kawasan Tanjung Mallasoro	71
20	20	Zona Rencana Ruang Pariwisata Tanjung Mallasoro	72

*Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro
Kabupaten Jeneponto*

NO.	NO. GAMBAR		
21	21	Kebutuhan Gerak Minimum Pejalan Kaki	74
22	22	Ilustrasi Kemiringan Jalur Pejalan Kaki	75
23	23	Perancangan Jalur Jalan Kawasan Pada Kawasan Wisata Tanjung Mallasoro	76
24	24	Contoh Ilustrasi Penaung Pada Jalur Pedestrian	77
25	25	Contoh Ilustrasi Diagramatis Sistem Penerangan Ruang Luar Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	77
26	26	Desain Lampu Penerangan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	78
27	27	Ilustrasi Pengembangan Dermaga Wisata Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	81
28	28	Rancangan Gazebo Kecil Pada Obyek Wisata Tanjung Mallasoro	
29	29	Rancangan Gazebo Besar Pada Obyek Wisata Tanjung Mallasoro	83
30	30	Rancangan Pergola Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	83
31	31	Desain Lampu Taman Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	84
32	32	Desain Pagar Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	85
33	33	Ilustrasi Pengembangan Aktivitas Kitesurfing Di Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	86
34	34	Ilustrasi Aktivitas Wingsurfing	87
35	35	Ilustrasi Aktivitas Wind Surfing di Kawasan Tanjung Mallasoro	87
36	36	Ilustrasi Aktivitas Canoeing di Kawasan Tanjung Mallasoro	88
37	37	Ilustrasi Aktivitas Snorkeling dan Diving di Kawasan Tanjung Mallasoro	89
38	38	Ilustrasi Aktivitas berkuda di Tanjung Mallasoro	89
39	39	Ilustrasi Aktivitas Glamping di Kawasan Tanjung Mallasoro	91
40	40	Ilustrasi Aktivitas Natural Camping di Kawasan Tanjung Mallasoro	91
41	41	Ilustrasi Aktivitas Pendukung Lainnya di Kawasan Tanjung Mallasoro	92

*Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro
Kabupaten Jeneponto*

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	
42	42	Rencana Pengembangan Pusat Jajanan/ Kuliner Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	95
43	43	Ilustrasi Rencana Pengembangan Cottage Pada Resort Area Di Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	96
44	44	Desain Rencana Pengembangan Cottage Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	97
45	45	Detail Desain Rencana Pengembangan Cottage Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	97
46	46	Rencana Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	98
47	47	Rencana Pengembangan Ruang Ganti/ Toilet Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	101
48	48	Rencana Desain Ruang Ganti/ Toilet Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	105
49	49	Ilustrasi Menara Pandang/ Menara Pantau Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	108
50	50	Rencana Desain Menara Pandang/ Menara Pantau Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	109
51	51	Rencana Pengembangan Pusat Penjualan Cinderamata Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	110
52	52	Ilustrasi Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang	111
53	53	Ilustrasi SRP Untuk Mobil Penumpang (dalam cm)	112
54	54	Ilustrasi Konsep Sebagai Acuan Penetapan SRP	112
55	55	Ilustrasi SRP Untuk Sepeda Motor	113
56	56	Ilustrasi Pola Parkir Tegak Lurus	113
57	57	Ilustrasi Pola Parkir Sudut	114
58	58	Ilustrasi Pola Parkir Tegak Lurus Yang Berhadapan	114
59	59	Ilustrasi Pola Parkir Sudut Yang Berhadapan	115
60	60	Ilustrasi Taman Parkir Tegak Lurus Dengan Dua Gang	115

*Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro
Kabupaten Jeneponto*

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	
61	61	Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan DuaGang Tipe A Bentuk Tulang Ikan Tipe A	116
62	62	Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan DuaGang Tipe A Bentuk Tulang Ikan Tipe B	116
63	63	Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan DuaGang Tipe A Bentuk Tulang Ikan Tipe C	116
64	64	Ilustrasi Pola Parkir Satu Sisi	117
65	65	Ilustrasi Pola Parkir Dua Sisi	117
66	66	Ilustrasi Pola Parkir Sepeda Motor Satu Sisi	118
67	67	Ilustrasi Pola Parkir Sepeda Motor Dua Sisi	118
68	68	Ilustrasi Parkir Sepeda Motor Pola Pulau	118
69	69	Ilustrasi Tempat Parkir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	119
70	70	Detail Rancangan Tempat Parkir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	119
71	71	Ilustrasi Contoh Rambu Panduan Informasi	120
72	72	Ilustrasi Contoh Rambu Atraksi Layanan Pariwisata	121
73	73	Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe Utama	122
74	74	Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe B (Regular Sign)	122
75	75	Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe C (Blazer)	123
76	76	Ilustrasi Contoh Gateway Sign	125
77	77	Ilustrasi Contoh Advance Sign	126
78	78	Ilustrasi Contoh Intersection Sign	126
79	79	Ilustrasi Contoh Position Sign	126
80	80	Ilustrasi Contoh Reassurance Sign	127
81	81	Ilustrasi Contoh Route Marker	127
82	82	Ilustrasi Contoh Temporary Sign	128

*Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro
Kabupaten Jeneponto*

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	
83	83	Ilustrasi Gapura Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	129
84	84	Rancangan Gapura Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	129
85	85	Ilustrasi Locket Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	130
86	86	Desain Bangunan Reservoir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	131
87	87	Desain Bak Penampungan Reservoir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	132
88	88	Desain Tempat Ibadah Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	133
89	89	Ilustrasi Anjungan ATM Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	134
90	90	Desain Anjungan ATM Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	135
91	91	Ilustrasi Penyediaan Tanda dan Wadah Sampah Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	135
92	92	Sistem Pengelolaan Limbah Cair Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro	137

BAB - 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan penghasil devisa yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan masyarakat yang bertumbuh sangat signifikan dan memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor tersebut.

Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan semakin menunjukkan hasil yang positif dari performa terhadap jumlah angka kunjungan wisatawan, penerimaan dari pembelanjaan wisatawan, pertumbuhan industri, pertumbuhan infrastruktur pariwisata, penyerapan tenaga kerja, serta tren positif lainnya dari kinerja sektor pariwisata. Dukungan kekayaan aset sumber daya wisata alam, budaya dan kreativitas masyarakat yang dimiliki, maka kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional dan daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan di masa depan.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang harus dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata, pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan *Community Based Tourism*, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kapasitas sertaantisipasi dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dilakukan melalui Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata, Kampanye Sapta Pesona, Gerakan Nasional Sadar Wisata di Kalangan Pramuka, Polisi Pariwisata, Lanjut Usia dan Remaja, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan serta Pencegahan HIV dan AIDS di lingkungan Kepariwisataan.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional sehingga dalam pengembangannya harus mengacu pada pembangunan pariwisata terpadu.

Pembangunan pariwisata terpadu (*integrated tourism development*) terkait erat dengan berbagai sektor dan aspek yang tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga sinkronisasi sektor-sektor pembangunan merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan pariwisata yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Dalam upaya memaksimalkan keterkaitan antar sektor pembangunan tersebut, dibutuhkan Rencana Induk (*Masterplan*) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagai implementasi dari perencanaan yang lebih generik dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) sehingga dapat mengakomodasi konstelasi komponen-komponen terkait dengan daya tarik wisata sebuah destinasi, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas kepariwisataan pada sebuah daya tarik wisata sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.

Rencana Induk Pembangunan Daya Tarik Wisata diperlukan untuk menghindari pembangunan sarana prasarana dan fasilitas wisata yang tidak bersesuaian dengan tema pengembangan dan aktivitas wisata sesuai karakteristik serta kebutuhan wisatawan sehingga Daya Tarik Wisata yang dikembangkan tidak terbengkalai karena tidak sesuai harapan pasar wisatawan; menghindari pembangunan pariwisata yang tidak terencana (bongkar pasang); dan meminimalisasi dampak negatif pariwisata terhadap kerusakan alam, lingkungan serta sosial budaya masyarakat yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positif pariwisata.

Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional dan yang tidak kalah pentingnya agar dapat bersinergi secara positif, dan menghindarkan benturan antar Daya Tarik Wisata dalam wilayah kabupaten Jeneponto.

Selain itu, *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata kabupaten Jeneponto dapat memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di lapangan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait : siapa yang akan melakukan apa bagi instansi tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan keterkaitan antar sektor.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto sebagai daerah tujuan wisata yang diunggulkan sebagai destinasi pariwisata daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari potensi alam, sejarah, dan budaya yang cukup dikenal sehingga dalam pengembangannya tentu membutuhkan adanya suatu perhatian khusus dari para *stakeholders* untuk saling berinteraksi dan bersinergi satu sama lainnya.

Pelibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar mengingat pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan bersinggungan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti penyediaan jaringan listrik, penyediaan jalan, penyediaan air bersih dan penyediaan sarana telekomunikasi sebagai pendukung minat kunjungan wisatawan ke sebuah destinasi pariwisata.

Ada beberapa alasan dalam penyusunan *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata kabupaten Jeneponto antara lain adalah sebagai berikut :

1. Visi, misi dan kebijakan pemerintah kabupaten Jeneponto merupakan pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga agar dapat sejalan dengan visi, misi dan kebijakan daerah, maka perlu menyusun master plan pengembangan Daya Tarik Wisata.
2. Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten Jeneponto, dibutuhkan penyesuaian dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Kabupaten Jeneponto.
3. Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan kabupaten Jeneponto, diperlukan perencanaan yang sistematis, terstruktur dan terencana terhadap perencanaan pengembangan, antara lain :
 - a. Zonasi Daya Tarik Wisata;
 - b. Pengembangan fasilitas umum Daya Tarik Wisata;
 - c. Pengembangan fasilitas pariwisata pada Daya Tarik Wisata;
 - d. Pengembangan aktivitas wisata; dan
 - e. Pengembangan atraksi wisata.
4. Analisa data yang digunakan dalam penyusunan *masterplan* Daya Tarik Wisata ini menggunakan 3 (tiga) teknik analisis yaitu analisa SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, analisa *Point Rating System* yaitu dipergunakan untuk menentukan urutan prioritas pengembangan pembangunan pariwisata dan analisis tata ruang yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan pemanfaatan ruang pada Daya Tarik Wisata.
5. Kebijakan, strategi dan indikasi pengembangan dibuat secara lebih mendalam dan terinci sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan.

Di samping hal hal tersebut di atas, juga dipertimbangkan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyerasikan

dengan sumber daya manusia dalam pembangunan. Dari konsep ini dapat disimpulkan :

- Pertama : Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan;
- Kedua : Sumber daya alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas yang penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitas yang berakibat berkurangnya kemampuan lingkungan menopang pembangunan secara berkelanjutan dan akan menimbulkan gangguan pada keserasian sumber daya alam dengan sumber daya manusia;
- Ketiga : Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, semakin baik mutu kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup;
- Keempat : Pola pembangunan sumber daya alam yang baik tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pilihan lain di masa depan dalam penggunaan sumber daya alam.
- Kelima : Pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang meningkat kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi mendatang.

Sebagai Daya Tarik Wisata berbasis daya tarik alam, Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala direncanakan untuk dikembangkan dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) yang sekurang-kurangnya harus memperhatikan pada enam hal yaitu :

1. Kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya alam sampai pada batas daya dukung lingkungan;
2. Pengambilan keputusan *bottom-up* dengan mengikut sertakan seluruh komponen *stakeholders*;
3. Menghapus kemiskinan, isu gender dan tetap menghormati hak asasi manusia;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan Daya Tarik Wisata;
5. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan sebagai perlindungan kehidupan; dan
6. Pelestarian pengetahuan, sistem nilai, budaya, dan cara hidup lokal dengan tetap menghargai perbedaan.

Beberapa akibat negatif yang dapat ditimbulkan apabila sebuah Daya Tarik Wisata tidak memiliki *masterplan* pengembangan, antara lain adalah :

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada kepastian dalam pembangunan kepariwisataan. Kepastian hukum ini sangat penting terutama bagi investor yang akan menanamkan modalnya pada bidang kepariwisataan di daerah. Investor sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan mengingat kemampuan pemerintah terutama dalam bidang pembiayaan masih relatif sangat terbatas.

- Investor sangat membutuhkan kepastian hukum dalam perencanaan karena akan menjamin bahwa investasi yang telah dan akan ditanamkan akan kembali dan selanjutnya akan memberi keuntungan;
2. Pengembangan Daya Tarik Wisata yang tidak berkelanjutan, mengingat bahwa pengembangan wisata tidak mungkin dilakukan sekaligus sebab Daya Tarik Wisata merupakan fenomena yang terus berkembang mengikuti perkembangan peradaban, masyarakat, dan pasar wisatawan. Disamping itu perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan secara bertahap. Untuk menjamin keberlanjutan pengembangan Daya Tarik Wisata, dibutuhkan perencanaan yang matang. Pengembangan Daya Tarik Wisata yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang akan terkesan bongkar pasang atau kemungkinan bila terjadi pergantian pemerintahan di daerah maka berubah pula kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata. Artinya apa yang telah dibangun oleh pemerintahan daerah sebelumnya dapat saja dibongkar oleh pemerintahan daerah berikutnya. Bila suatu Daya Tarik Wisata telah memiliki *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata yang baik, hal ini dapat dihindari sebab walaupun pemerintahannya berganti namun pengembangan Daya Tarik Wisata akan dapat terus berlanjut berdasarkan *masterplan* yang telah ada.
 3. Pengembangan Daya Tarik Wisata yang tidak terarah, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pedoman yang jelas dalam pengembangan dan penataan Daya Tarik Wisata. Master plan pengembangan Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) kabupaten Jeneponto. Dengan demikian pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro akan terarah, karena disusun secara hirarki, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan Daya Tarik Wisata yang lainnya.
 4. Pengembangan Daya Tarik Wisata tidak terkoordinir dengan baik karena kepariwisataan merupakan pembangunan multi sektoral dan multi dimensional artinya pengembangan Daya Tarik Wisata tidak dapat berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor dan bidang oleh karena itu dibutuhkan koordinasi tingkat tinggi dalam pelaksanaan pengembangannya. Dengan adanya *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata yang baik, maka ada dua hal yang dapat dihindari berkenaan dengan koordinasi yaitu pertama : tidak terjadi saling mengaharapkan antara sektor atau bidang sehingga dapat menyebabkan pengembangan Daya Tarik Wisata justru terbengkalai (tidak terlaksana) dan yang kedua adalah antara satu sektor atau bidang melaksanakan pengembangan Daya Tarik Wisata yang berbeda (tumpang tindih) sehingga justru menyebabkan pengembangan Daya Tarik Wisata yang tidak efisien dan efektif. Dalam master plan pengembangan Daya Tarik Wisata yang baik, telah terdapat perencanaan yang matang termasuk keterlibatan sektor-sektor dan bidang-bidang yang terkait sehingga tiap sektor

atau bidang sudah jelas apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan Daya Tarik Wisataan.

Secara umum perencanaan Daya Tarik Wisata diperlukan dengan berbagai alasan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata yang menyeluruh dan terpadu dapat memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan;
2. Daya Tarik Wisata bersifat sangat kompleks, multi-sektor dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, kelautan, komponen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan Daya Tarik Wisata yang baik akan mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisah atau parsial.
3. Daya Tarik Wisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata secara khusus sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dari penyusunan *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata kelurahan Pabiringa kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto mengacu pada berbagai produk hukum yang ada, baik berskala nasional, regional maupun lokal, yang mengatur tentang kepariwisataan, lingkungan, tata ruang, dan pembangunan masyarakat, diantaranya adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2039;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018; dan
17. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2033.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto tahun 2019 dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan yang memuat tujuan pengembangan Daya Tarik Wisata dikaitkan dengan visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2033.

Tujuan pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam daerah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang ingin dicapai dengan menyusun *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun *masterplan* pengembangan obyek Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto tahun 2019;
- b. Mewujudkan rencana pengembangan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam, sejarah, budaya, dan sumber daya buatan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung utama pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. Mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar obyek dalam wilayah; dan
- f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan penyusunan *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto tahun 2019, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Tersusunnya konsep pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto tahun 2019 yang dilandasi pendekatan perencanaan Daya Tarik Wisata dan isu-isu strategis yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya;
2. Teridentifikasinya pemanfaatan ruang dalam prioritas pengembangan atraksi, aktivitas, dan fasilitas wisata pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto; dan
3. Tersusunnya arahan kebijakan dan strategi pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kajian dalam penyusunan *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto, meliputi :

1. Gambaran dan kajian terhadap potensi kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto, yang mencakup aspek:
 - a. Aspek pemanfaatan ruang;
 - b. Aspek pengembangan atraksi dan aktivitas wisata;
 - c. Aspek pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d. Aspek pengelolaan lingkungan;
 - e. Aspek pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Aspek Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Aspek aksesibilitas wisata.
2. Pengkajian terhadap prospek pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk di dalam kawasan Daya Tarik Wisata.
3. Perumusan kebijakan dan strategi pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto.

Agar penyusunan *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, maka dilakukan 5 (lima) tahapan kegiatan. Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Survey dan pengumpulan serta pengolahan data
2. Analisis data yang terdiri atas analisis SWOT, analisis *Point Rating System* dan analisis tata ruang.
3. Penetapan zonasi pemanfaatan ruang pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala
4. Perumusan sasaran pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto

5. Perumusan rencana pengembangan aksesibilitas, atraksi, aktivitas dan amenitas pariwisata pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala.

F. Pendekatan Perencanaan

Dalam pengembangan destinasi pariwisata, Daya Tarik Wisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah atau negara. Destinasi pariwisata yang dibentuk oleh serangkaian komponen produk wisata, wilayah dan citra atau karakteristik atraksi menjadi fokus penting dalam pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam mengembangkan keunggulan banding (*Comparative Advantages*) dan keunggulan saing (*Competitive Advantages*) dalam berkompetisi untuk menarik pasar wisatawan regional maupun internasional.

Pemahaman terhadap Destinasi Pariwisata yang operasional perlu dijabarkan dalam pendekatan perencanaan pariwisata mengingat terdapat banyak rujukan yang dapat digunakan oleh karena itu definisi di bawah ini dijadikan dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata, sebagai berikut :

Destinasi pariwisata merupakan gabungan komponen produk wisata (atraksi, amenitas dan akses) yang menawarkan pengalaman utuh/ terpadu bagi konsumen atau wisatawan. Secara Tradisional, destinasi sering dikaitkan dengan suatu area dengan batasan geografis yang jelas, misalnya negara, pulau atau sebuah kota (Hall, 2000, Davidson and Maitland, 1997).

Lebih lanjut, dalam kerangka pengembangannya, Kelly & Nankervis (2001) menegaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata minimal mencakup lima komponen utama, yaitu ;

1. **Atraksi** (*attractions*) yang mencakup alam, budaya, buatan (*artificial*), *event* dan sebagainya.
2. **Aksesibilitas** (*accessibility*) yang mencakup dukungan sistem transportasi meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi.
3. **Amenitas** (*amenities*) yang mencakup fasilitas pendukung yang meliputi ketersediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, pembuangan limbah, Bank, pemadam kebakaran, keamanan, Rumah sakit dan sebagainya. Dan fasilitas penunjang yang meliputi retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata dan sebagainya.
4. **Akomodasi** (*accommodation*) yang mencakup ketersediaan sarana penginapan berupa hotel, pondok wisata, wisma, sarana makan dan minum, dan sebagainya.
5. **Aktifitas** (*activities*) yang mencakup keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan di destinasi yang dapat diikuti atau dilakukan oleh wisatawan dalam kunjungannya ke lokasi tersebut.

Destinasi pariwisata dalam hal ini tidak hanya merupakan sekumpulan daya tarik wisata dengan suatu tema dominan, namun lebih

dari itu adalah keterkaitan objek dengan unsur-unsur pendukung seperti amenitas, aksesibilitas dan unsur penunjang lain yang bekerja secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem yang saling menunjang.

Berdasarkan tren, indikator dan motivasi wisatawan, World Tourism Organization (2004) Mengklasifikasikan bahwa destinasi pariwisata terdiri dari 17 jenis, yaitu :

1. Kawasan Perairan/Bahari (*coastal zone*)
2. Kawasan Pantai (*beach destination and sites*)
3. Gugusan Kepulauan (*small island*)
4. Kawasan Gurun (*destination in desert and arid areas*)
5. Kawasan Pegunungan (*mountain destination*)
6. Kawasan Taman Nasional (*natural and sensitive ecological areas*)
7. Kawasan Ekowisata (*ecotourism destinations*)
8. Kawasan Taman Nasional dan Cagar Alam (*park and protected areas*)
9. Komunitas disekitar Kawasan Lindung/Konservasi (*communities within or adjacent to protected area*)
10. Jalur atau Rute Perjalanan (*trail and routes*)
11. Situs Peninggalan Sejarah (*built heritages sites*)
12. Kawasan Pemukiman Tradisional (*small and traditional communities*)
13. Kawasan Wisata Kota (*urban tourism*)
14. Pusat Kegiatan MICE dan Konvensi (*MICE and convention centre*)
15. Kawasan Taman Bertema (*theme park*)
16. Kawasan Taman Air (*water park*)
17. Kapal Pesiar dan Simpul-simpul perjalanannya (*cruise ship and their destinations*)

Selain itu perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, berorientasi sistem, komprehensif, terintegrasi dan memperhatikan lingkungan dengan fokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat.

Pendekatan perencanaan pariwisata yang dilakukan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Hal ini dilakukan karena di dalamnya terkandung makna pengembangan pariwisata yang tanggap terhadap kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan pada intinya menekankan 4 (empat) prinsip, yaitu :

a. **Layak secara ekonomi (*economically viable*).**

Bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan efisien untuk dapat memberikan manfaat ekonomi bagi

pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

b. Berwawasan lingkungan (*enviromental viable*).

Bahwa proses pembangunan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun budaya) dan menghindari dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekologi.

c. Diterima secara sosial (*socially acceptance*).

Bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta tidak merusak tatanan dan nilai-nilai budaya yang mendasar dimasyarakat.

d. Dapat diterapkan secara teknologis (*technologically appropriate*).

Bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumber daya lokal dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Secara skematis konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**GAMBAR 1
PENDEKATAN PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN**



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pendekatan perencanaan pembangunan berkelanjutan, secara rinci dijabarkan sebagai berikut ;

- 1) Prinsip pembangunan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi jangka panjang.
- 2) Penekanan pada nilai manfaat bagi masyarakat lokal.

- 3) Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang lestari.
- 4) Kesesuaian antara kegiatan pengembangan dengan skala, kondisi dan karakter daerah.
- 5) Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan pengembangan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal.
- 6) Antisipasi yang tepat dan pemantauan terhadap perubahan

2. Pendekatan Pengembangan Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto mengacu pada Konsep Pemberdayaan Masyarakat atau Komunitas Lokal dengan memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan *local genuine*.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pengembangan sumber daya budaya dan pariwisata harus sensitif dan responsif terhadap keberadaan dan kebutuhan komunitas lokal dan bahwa dukungan dari seluruh komunitas amat sangat diperlukan bagi keberhasilan pengembangan dan pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat lokal selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Memajukan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata kepada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap besar dalam hal tenaga kerja dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
- d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
- e. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Pendekatan pengembangan berbasis masyarakat bertumpu pada penguatan masyarakat setempat sehingga sejak dalam tahapan perencanaan, pengelolaan hingga pelestarian sumber daya pariwisata pada setiap destinasi yang dikembangkan akan bersinerji dengan kearifan lokal masyarakat disekitar destinasi tersebut. Lebih jelasnya mengenai pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut :

**GAMBAR 2
PENGEMBANGAN BERBASIS MASYARAKAT
(COMMUNITY BASED DEVELOPMENT)**



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lebih jauh dalam pembangunan pariwisata diperlukan upaya memberdayakan atau memperkuat posisi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan pariwisata.

3. Pendekatan Kesesuaian Aspek Produk dan Pasar

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang dapat ditampilkan sebagai berikut :



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto pada dasarnya merupakan perpaduan pengembangan 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek produk dan aspek pasar. Aspek produk terkait dengan penyediaan unsur-unsur penawaran (*supply side*) yang di dalamnya tercakup; atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia dan unsur penunjang lainnya. Sedangkan aspek pasar berkaitan dengan unsur-unsur permintaan (*demand side*) yang di dalamnya tercakup demografi dan psikografi pasar (persepsi, motivasi, ekspektasi).

4. Pendekatan *Borderless*

Konsep pariwisata lintas batas atau tanpa batas (*borderless*), merupakan salah satu implikasi dari dampak globalisasi. Pendekatan perencanaan Kabupaten Jeneponto didasarkan pada konsep tersebut mengingat kegiatan pariwisata tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batasan administratif wilayah atau keharusan-keharusan yang membatasi akses atau pilihan terhadap produk, amenitas, aksesibilitas dan sebagainya.

Oleh karena itu pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto harus mempertimbangkan konteks regional dengan membangun semangat kerjasama secara sinergis dengan daerah/kabupaten/ provinsi bahkan negara lain dengan mengaitkan produk-produk yang dikembangkan oleh daerah lain. Jaringan keterpaduan tersebut dapat membentuk daya tarik kolektif yang kuat dan sangat efektif dalam menarik arus kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

5. Pendekatan *Cluster*

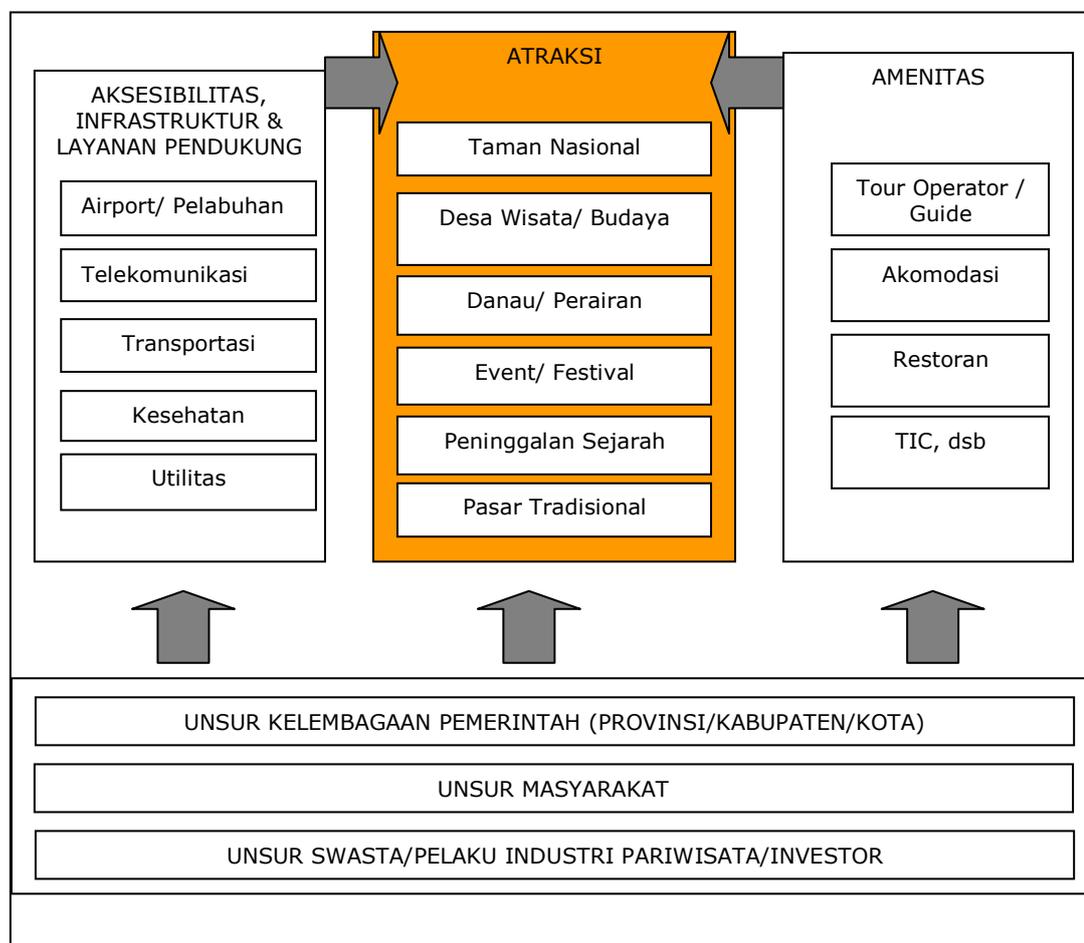
Pendekatan *cluster* banyak diterapkan dalam pengembangan usaha di sektor industri. Pendekatan tersebut menggambarkan sekelompok sektor usaha yang memiliki mata rantai atau keterkaitan fungsi yang saling mendukung dan dikembangkan secara terintegrasi pada suatu lokasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya saing usaha yang tinggi.

Pendekatan *cluster* dalam pengembangan destinasi dalam kaitan perencanaan pariwisata berorientasi pada fokus dan penguatan kualitas kinerja hubungan mata rantai usaha yang terkait dan sistem pendukung lainnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan daya saing destinasi. Dalam konteks pengembangan pariwisata, komponen *cluster* pariwisata dapat mencakup unsur-unsur;

- a. Atraksi/ daya tarik wisata (alam, budaya, buatan/ khusus)
- b. Amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata (hotel, fasilitas hiburan, fasilitas perbelanjaan, *tour operator* dan maskapai penerbangan, rumah makan dan bar, pemasok produk pariwisata)
- c. Institusi di bidang penyiapan sumber daya manusia, misalnya perguruan tinggi, sekolah tinggi pariwisata, sekolah menengah pariwisata, lembaga pelatihan dan sebagainya.
- d. Kelembagaan di sektor publik di tingkat daerah/lokal.

Komponen *cluster* pariwisata tersebut secara skematis dapat digambarkan konfigurasi dan keterkaitannya sebagai berikut :

**GAMBAR 4
KONSEP KLUSTER DESTINASI PARIWISATA**



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

6. Pendekatan Menyeluruh dan Terintegrasi

Seluruh aspek dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto, termasuk elemen-elemen yang bersifat kelembagaan serta implikasi-implikasinya terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya, ekonomi, dianalisis, direncanakan, dan dikembangkan. Pendekatan perencanaan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam kaitan regional.

Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas. Selain itu, penyelesaian permasalahan pengembangan pariwisata tidak hanya dipecahkan pada sektor pariwisata saja, tetapi didasarkan pada kerangka perencanaan terpadu antar sektor yang dalam perwujudannya berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antarsektor.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dalam penyusunan *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata juga perlu memperhatikan antara lain :

- a. Kepentingan nasional dan daerah.
- b. Arah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan nasional dan provinsi
- c. Arah dan kebijakan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan provinsi.
- d. Pokok permasalahan daerah dan mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Keselarasan dengan aspirasi masyarakat.
- f. Persediaan dan peruntukan tanah, air dan sumber daya lainnya.
- g. Daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- h. *Masterplan* Daya Tarik Wisata lain yang berdekatan.

G. Lingkup Wilayah Studi

Lingkup wilayah studi penyusunan *masterplan* Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro adalah pada wilayah pada kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto.

H. Tahapan Kegiatan Dan Jangka Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan penyusunan master plan pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto ini dilakukan, sebagai berikut :

1. Pembentukan Kelompok Kerja melalui nota kesepahaman antara Direktur Politeknik Pariwisata Makassar dengan Bupati Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar.
2. Pengumpulan Data, dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara maupun *focus group discussion* serta pelaksanaan survey berupa peninjauan lapangan secara langsung untuk mengenali kondisi fisik, sosial dan ekonomi. Data sekunder dilakukan melalui data pustaka terkait karakteristik wilayah dan aspek-aspek dalam pengembangan Daya Tarik Wisata.
3. Penyusunan Rancangan *masterplan* Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto, dilakukan setelah data primer dan sekunder dianalisis dan selanjutnya dirumuskan sesuai dengan sistematika penulisan.
4. Uji Publik dilaksanakan untuk meminta tanggapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan pariwisata.

5. Penetapan master plan pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto.

b. Kerangka Penyusunan

Kerangka penyusunan *masterplan* pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

TABEL 1

***Bagan Kerangka Penyusunan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata
Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019***

NO	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	INDIKATOR
1	Pengumpulan data	Mengungkapkan potensi yang dimiliki dan permasalahan umum yang dihadapi oleh Daya Tarik Wisata sebagai sektor kegiatan ekonomi, maupun sebagai bagian kegiatan pengembangan wilayah	Gambaran potensi dan permasalahan pengembangan Daya Tarik Wisata	Kebijakan Pengembangan Karakteristik Daya Tarik Wisata Ketersediaan produk wisata Aspek Pasar
2	Analisis	Menilai keadaan Masa kini Menilai kecenderungan perkembangan Menghitung kapasitas pengembangan Memperkirakan kebutuhan masa datang	Teridentifikasi-nya prospek pengembangan dan pemanfaatan potensi Daya Tarik Wisata	Kebijakan pengembangan Sumberdaya wilayah Ketersediaan produk wisata & penunjang Pasar dan proyeksi Wisatawan Pola kunjungan wisatawan makro
3	Pemetaan Daya Tarik Wisata	Menentukan kawasan pengembangan Menentukan pemanfaatan ruang	Peta dasar rencana pengembangan	Zonasi Daya Tarik Wisata
4	Pemetaan	Menyusun peta	Rencana	Jumlah dan

	Rencana Pengembangan	rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata	pengembangan Daya Tarik Wisata	jenis sarana prasarana. Jenis aktivitas wisata
--	----------------------	--	--------------------------------	--

c. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyusunan *Masterplan* Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 ini dilakukan dalam jangka waktu 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak.

TABEL 2

Jadwal Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

No.	Kegiatan	Bln Ke-1	Bln Ke-2	Bln Ke-3
1.	Penyelesaian Administrasi			
2.	Survey lapangan			
3	Penyusunan Laporan Pendahuluan			
3.	Seminar Laporan Pendahuluan			
4.	Penyusunan Laporan Kemajuan			
5.	Seminar Laporan Kemajuan			
6.	Penyusunan Draft Laporan Akhir			
7.	Seminar Draft Laporan Akhir			
8.	Penyempurnaan Laporan Akhir			
9.	Penyerahan Buku-Buku Laporan Akhir.			

I. Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika pelaporan penyusunan *Masterplan* Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, desa Mallasoro kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; keluaran; ruang lingkup kajian; metodologi; kerangka pendekatan; tahapan pelaksanaan pekerjaan; jangka waktu perencanaan; dan sistematika pelaporan.

Bab II Kebijakan Pengembangan Pariwisata, meliputi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Nasional; Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan; dan Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Bab III Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, dan Kelurahan Pabiringa Dalam Mendukung Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, meliputi Kondisi Fisik; Potensi Pariwisata; dan Perekonomian wilayah.

Bab IV Rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, meliputi Tipologi Daya Tarik Wisata, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pengembangan Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata; Aksesibilitas Pendukung Pariwisata; dan Prasarana Umum Pendukung Pariwisata.

Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran

BAB - 2

KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO

A. Kepariwisataaan Kab. Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan Nasional

Nilai penting dan kontribusi pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, kepariwisataan juga efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas.

Upaya memposisikan peran strategis sektor pariwisata dalam perekonomian nasional telah dirintis sejak 2 dekade yang lalu melalui program Visit Indonesia Year 1991. Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan

semakin menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan dengan kekayaan aset sumber daya wisata alam dan budaya yang dimiliki negara Indonesia, maka kontribusi tersebut masih memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.

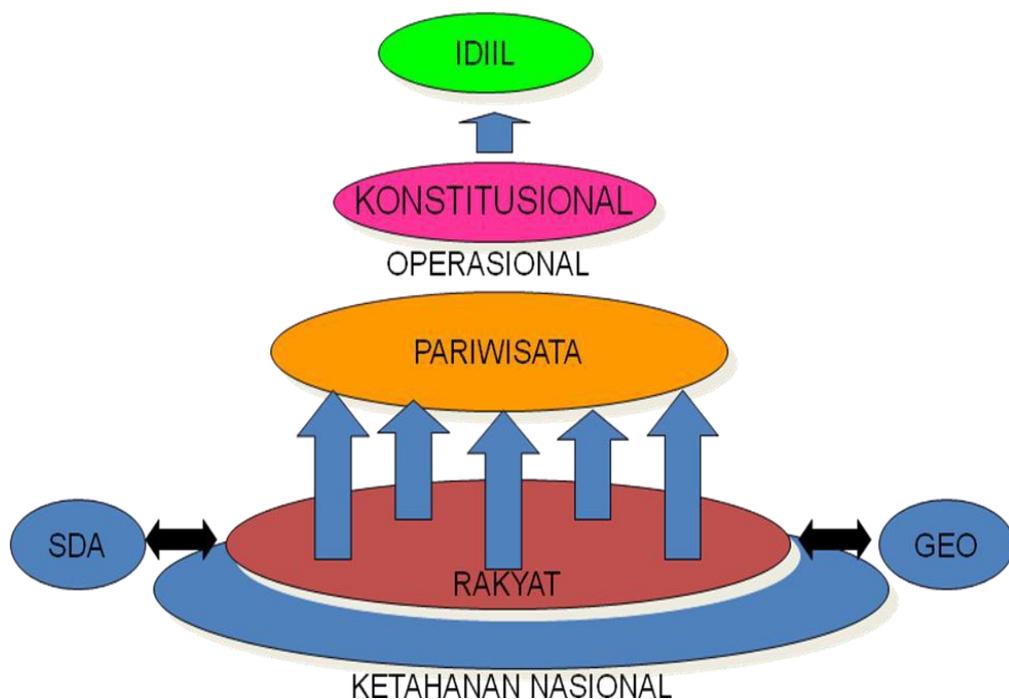
Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata, pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan *Community Based Tourism*, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata. Upaya pengembangan produk wisata dilakukan melalui penyusunan Pola Perjalanan Wisata Tematik (Minat Khusus) Alam dan Buatan, Sejarah dan Budaya serta Ekowisata, implementasi Kebijakan Nasional Pengembangan Wisata Kapal (*Yacht*) Asing, Pengembangan Wisata Kapal Pesiar (*Cruise*), Pengembangan dan Pemutakhiran *Database* Situs Selam (*Dive Site*) Indonesia, Fasilitasi Pengembangan *Geopark* Global dan Nasional, Pengembangan Even Wisata Olahraga Rekreasi (*Sport Tourism Event*), Pengenalan Produk Kuliner dan Spa Tradisional melalui Penetrasi Kuliner dan Spa Indonesia ke Mancanegara, Pemetaan Destinasi Wisata Belanja, Pengembangan dan Penataan 16 Destinasi MICE di Indonesia melalui Pemetaan dan Pengklasifikasian 16 Destinasi MICE Nasional, Penyusunan Strategi dan *Action Plan* Pengembangan Destinasi MICE Nasional dan Pengembangan Produk *Special Event Carnival Indonesia*.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kapasitas sertaantisipasi dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dilakukan melalui Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata, Kampanye Sapta Pesona, Gerakan Nasional Sadar Wisata di Kalangan Pramuka, Polisi Pariwisata, Lanjut Usia dan Remaja, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan serta Pencegahan HIV dan AIDS di lingkungan Kepariwisataan.

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, dimana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya Indonesia. Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeselimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa Lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Gambar 5
Sistem Kepariwisata Nasional
(Tatanan Makro)



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan pariwisata yang dikenal dengan istilah pentaheliks adalah unsur akademisi, dunia usaha (bisnis), masyarakat (komunitas), media dan pemerintah. Namun demikian pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. Sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dari kegiatan pariwisata. Kepariwisataan nasional yang dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.

Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
4. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
5. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

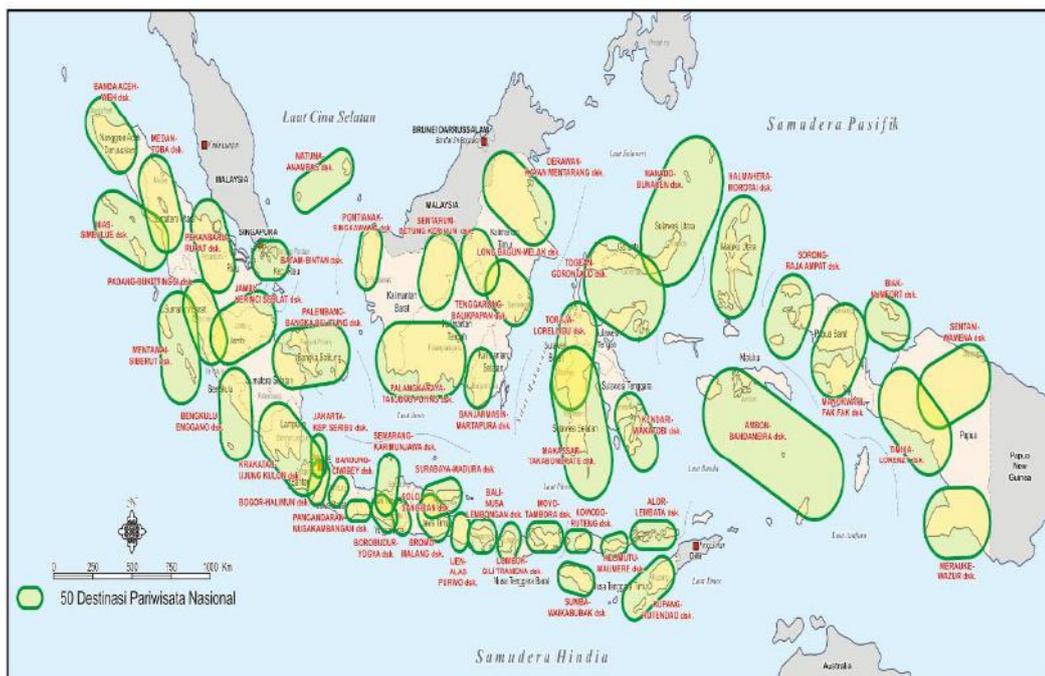
Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan

pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke 38 yaitu Makassar-Takabonerate dan Sekitarnya dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdiri dari KPPN Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bulukumba dan sekitarnya, KPPN Bone dan sekitarnya, KPPN Pare-Pare dan sekitarnya dan KPPN Takabonerate dan sekitarnya. Sedangkan 3 (tiga) KPPN lainnya yaitu KPPN Sengkang dan sekitarnya, KPPN Toraja dan sekitarnya serta KPPN Palopo dan sekitarnya bergabung dengan provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dalam DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya.

Gambar 6
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Takabonerate dan sekitarnya



Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, 2011

Dengan demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Jeneponto dengan segala keunikan alam dan budaya sebagai potensi dasar pariwisata telah ditetapkan dan menjadi bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional sehingga menjadi prioritas pembangunan dan secara bersama-sama dengan kawasan lain, telah menjadi citra daya tarik kepariwisataan nasional.

B. Kepariwisataaan Kab. Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan Prov. Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dengan potensi pariwisata yang sangat beragam dan menarik, baik wisata alam, budaya, sejarah, religius, dan wisata tematik. Visi Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Sulawesi Selatan adalah “**Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan kepariwisataan provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
4. Mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas daerah; dan
5. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat kawasan andalan yang berfungsi sebagai; tempat aglomerasi permukiman perkotaan, pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya, dan kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan. Adapun kawasan andalan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum, dan agroindustri serta perdagangan;
2. Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
3. Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan perdagangan;
4. Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan perdagangan;
5. Kawasan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
6. Kawasan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan;

7. Kawasan laut Sangkarang–Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
8. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Selain itu, terdapat kawasan yang diarahkan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor dan atau sub sektor pembangunan.

Sektor pariwisata, berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam darat maupun laut, budaya, sejarah, olahraga, Konvensi, dan belanja bisa dijadikan tujuan. Secara umum Objek wisata budaya dan alam Tana Toraja merupakan ikon pariwisata Sulawesi Selatan yang sudah dikenal mendunia. Taman laut Takabonerate sangat potensial untuk menjadi ikon wisata bahari dengan mengembangkan faktor aksesibilitas, akomodasi, dan perlindungan terumbu karang dan anak-anak ikan. Selain itu, banyak ragam Daya Tarik Wisata dengan daya tarik regional, nasional maupun lokal yang lokasinya tersebar di kabupaten-kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dikembangkan secara aktif sehingga tumbuh berkembangnya lapangan kerja pemandu wisata, jasa transportasi, perhotelan, restoran, informasi pariwisata, komunikasi, cinderamata, kesenian, perdagangan jasa maupun produk lainnya yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapat masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata ini diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Selain itu, pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu faktor urgen yang harus dipertimbangkan, daya dukung fisik, sosial, ekonomi, dan budaya perlu diperhatikan dengan; dengan menyediakan ruang untuk kehidupan manusia yang sehat dan nyaman beserta segenap kegiatan pembangunannya, menyediakan sumber daya untuk kepentingan manusia baik melalui penggunaan langsung maupun melalui proses produksi atau pengolahan, menyerap atau menetralisasi limbah, serta melakukan fungsi-fungsi penunjang termasuk siklus biokimia, siklus hidrologi, dan lainnya. Mengacu pada azas keadilan, maka akses transportasi laut dan terutama akses informasi dan komunikasi perlu dipertimbangkan keseluruhan pulau-pulau kecil. Perairan pantai selatan dan timur Sulawesi Selatan yang potensial sebagai budidaya rumput laut dapat dikembangkan dengan agrobisnis maupun agroindustri khusus rumput laut yang mengikut sertakan komunitas petani rumput laut. Untuk peningkatan perekonomian rakyat dan perekonomian wilayah, maka wisata bahari tepat dikembangkan dengan potensi Kawasan Wisata Bahari Kapoposang dan sekitarnya, termasuk pulau-pulau kecil di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kawasan wisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Jeneponto, serta Kawasan Wisata Bahari Takabonerate, Perairan pantai bila diperlukan juga dapat direklamasi untuk penambahan luas daratan untuk pembangunan dan atau perluasan pelabuhan, bandara, kawasan perkotaan seperti permukiman, perdagangan, industri, pergudangan.

Pengembangan strategi spasial pembangunan pariwisata dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan mampu mengakomodir kegiatan dalam setiap wilayah pengembangan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan arus kunjungan wisata sehingga dapat memberikan pengaruh bagi kegiatan wisata yang ada dan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Tujuan dari analisis penentuan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) adalah untuk memberikan pelayanan dan informasi tentang keberadaan objek dan daya tarik wisata dalam suatu DTW, sehingga para wisatawan mendapatkan gambaran tentang bagaimana DTW yang dikunjungi. Dalam penentuan SKPP di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada jenis Daya Tarik Wisata (DTW), ditinjau dari aspek: karakteristik tiap daya tarik wisata dan ragam jenis daya tarik wisata. Adapun SKPP dalam wilayah DTW Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan terletak di Kota Makassar, yang terdiri wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro.
2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan terletak di Kabupaten Bulukumba. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.
3. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Takabonerate dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Benteng. Pada kawasan ini dikhususkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah karena selain pertimbangan letak geografis juga pertimbangan potensi Sumber Daya Alam yang khas dengan Daya Tarik Wisata Tirta.
4. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Bone. Pada kawasan ini terdiri Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Jenis Daya Tarik Wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan pada koridor tersebut yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.
5. Kawasan Strategis Pariwisata daerah (KSPD) Pare-Pare dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Pare-pare. Pada kawasan ini terdiri dari wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro dan Wisata Minat Khusus.

6. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Palopo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Palopo. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara.
7. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Toraja dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Tana Toraja. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan juga dibagi berdasarkan kelompok paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan aksesibilitas dan karakter budaya yang menyebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan internal karakter wilayah provinsi tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan meliputi:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya, terdiri dari wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro. Pusat pelayanan pada KPP Makassar terletak di Kota Makassar.
2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan Sekitarnya, meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam. Pusat pelayanan pada KPP Bulukumba dan sekitarnya terletak di Kabupaten Bulukumba.
3. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Takabonerate, dengan mempertimbangkan arahan Destinasi Kepariwisata Nasional yang menetapkan daya tarik wisata Takabonerate sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan nasional maka penetapan KSPD Jeneponto yang hanya mengkhususkan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu koridor pengembangan destinasi pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mempertimbangkan letak geografis wilayah yang merupakan daerah kepulauan namun dengan potensi daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata tirta yang sangat unik. Pusat Pelayanan KSPD Takabonerate ini ditetapkan di Kota Benteng yang juga merupakan Ibukota dari Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya, terdiri dari Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Pusat KSPD Bugis Pantai Timur ini terletak di Kabupaten Bone. Pada KSPD Wajo dan Sekitarnya terdapat beberapa daya tarik wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta

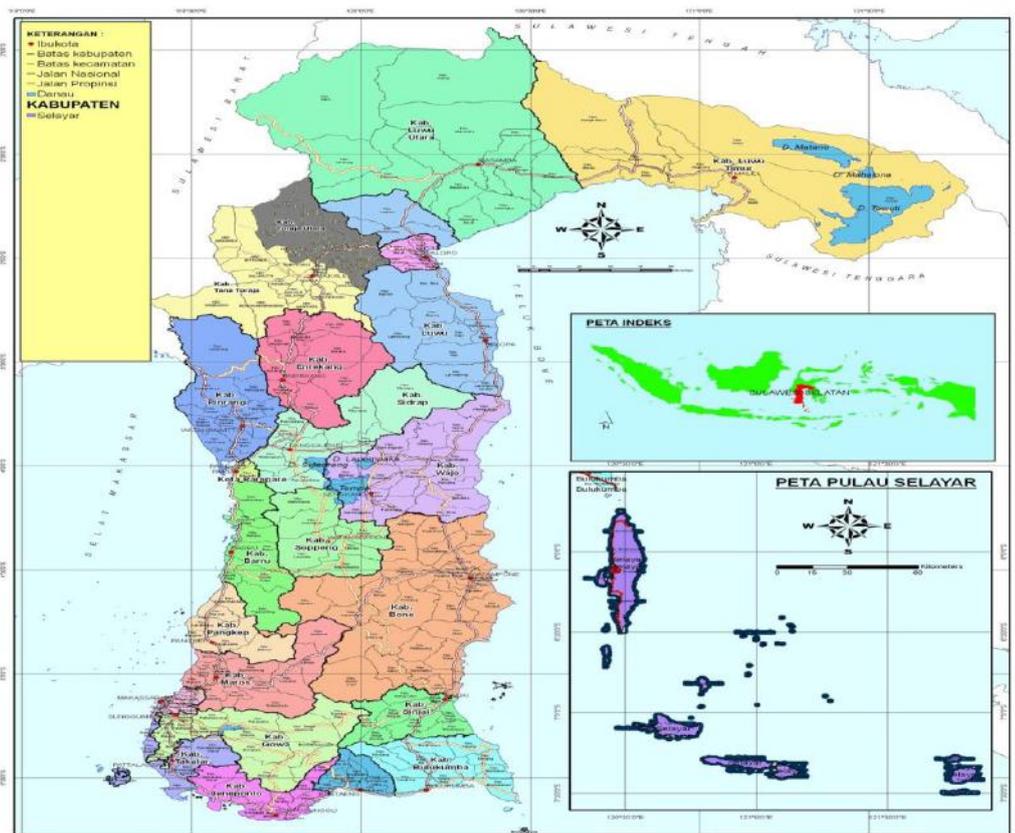
pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.

Posisi kepariwisataan kabupaten Jeneponto dalam kebijakan pembangunan pariwisata provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP), yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan terletak di Kota Makassar. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.

Berdasarkan penetapan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Jeneponto merupakan salah satu destinasi prioritas provinsi Sulawesi Selatan yang secara bersama-sama dengan kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar dicanangkan sebagai daerah tujuan wisata dengan daya tarik utama adalah wisata bahari, wisata tirta, wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus alam dan agro.

Adapun posisi kepariwisataan kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 7
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bulukumba dan Sekitarnya



Sumber : Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

Adapun daya Tarik wisata kabupaten Jeneponto yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Makassar dan Sekitarnya Dalam RIPPARDA Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi Obyek	Keterangan
1	Permandian Birta Ria Kassi	Alam	Kecamatan Tamalatea	Sudah dikembangkan
2	Pasanggarahan Loka	Alam	Kecamatan Kelara	Sudah dikembangkan
3	Air Terjun Boro	Alam	Kecamatan Kelara	Belum dikembangkan
4	Batu Jangang	Alam	Kecamatan Tarowang	Belum dikembangkan
5	Pulau Libukang	Tirta	Kecamatan Bangkala	Belum dikembangkan
6	Pantai Kalumpang	Tirta	Kecamatan Tamalatea	Belum dikembangkan
7	Garam Nasara	Industri	Kecamatan Barangkala Barat	Belum dikembangkan
8	Makam Raja-Raja Binamo	Sejarah	Kecamatan Bontoramba	Sudah dikembangkan
9	Makam I Maddi' Dg. Rimakka	Sejarah	Kecamatan Tamalatea	Belum dikembangkan
10	Bungung Salapan	Sejarah	Kecamatan Batang	Belum dikembangkan
11	Pacuan Kuda Pabiang	Budaya	Kecamatan Binamu	Sudah dikembangkan
12	Upacara Jene-Je'ne Sappara'	Budaya	Kecamatan Tarowang	Belum dikembangkan
13	Rumah Adat Patealla	Budaya	Kecamatan Kelara	Belum dikembangkan
14	Balla Lompoa	Budaya	Kecamatan Binamu	Belum dikembangkan

Sumber : Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

C. Kepariwisata Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jeneponto

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas pada visi kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026, yaitu "**Jeneponto Yang Maju, Tangguh, dan Bermartabat Dengan**

Bernafaskan Keagamaan". Hal ini dimaksudkan dapat diwujudkan melalui penjabaran visi sebagai berikut :

1. **Tangguh;** adalah suatu daya atau kemampuan untuk menghadapi tantangan dan persaingan global dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri dalam mewujudkan kehidupan maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain.
2. **Bermartabat;** adalah suatu nilai yang memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Jeneponto dalam mematuhi norma-norma hukum dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat turatea.
3. **Bernafaskan Keagamaan;** adalah suatu pegangan pada nilai-nilai yang bersifat religius dalam pencapaian kehidupan masyarakat jeneponto yang maju, tangguh dan bermartabat.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka misi pemerintah kabupaten Jeneponto, adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Tata Pemerintahan dan Kelembagaan yang Baik;** Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto dengan mengembangkan tata pemerintahan dan kelembagaan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif, efisien dan aparatur yang profesional serta akuntabel, dengan infrastruktur yang memadai dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.
2. **Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan;** Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto dengan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan adalah upaya untuk mendorong pembangunan ruang dan infrastruktur kabupaten agar mampu mendukung dan mewadahi aktifitas pengembangan wilayah secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. **Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas;** Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto dengan meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas adalah upaya mendorong pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani, mahluk pribadi maupun sosial sebagai perwujudan nilai-nilai humanis dan pluralis.
4. **Mewujudkan Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya;** Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto yang bermoral, beretika, dan berbudaya dengan memperkuat jati diri dan karakter daerah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, dan menerapkan nilai-nilai luhur masyarakat Turatea dan budaya bangsa.
5. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi;** Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto dengan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan upaya mendorong bidang pertanian melalui implementasi teknologi dan optimalisasi pemanfaatan lahan dan perdagangan sebagai aktifitas ekonomi utama atau sebagai tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktifitas perekonomian lainnya sebagai aktifitas pelengkap dan pendukung.

6. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Daya Saing Daerah;** Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam secara optimal dan daya saing daerah adalah upaya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu untuk memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah dengan keunggulan kompetitif dan terpadu.

Sebagai ukuran tercapainya Jeneponto yang Maju, Tangguh dan Bermartabat dengan Bernapaskan Keagamaan Menuju Masyarakat Sejahtera, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Kelembagaan yang baik, yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - b. Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada indeks kepuasan masyarakat.
 - c. Terbangunnya infrastruktur pemerintahan dan kelembagaan yang memadai;
 - d. Terjaminnya ketersediaan produk hukum daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Infrstruktur yang Berkelanjutan, yang ditandai dengan :
 - a. Terciptanya pembangunan penataan ruang dalam seluruh wilayah kabupaten.
 - b. Terbangunnya infrastruktur pelayanan masyarakat secara merata disemua tingkatan pemerintahan.
 - c. Terbangunnya Infrastruktur lingkungan diseluruh wilayah Perdesaan dan Perkotaan.
3. Terwujudnya Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat menuju Indonesia Sehat 2020
 - b. Meningkatnya pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia serta meraih predikat 4 Besar di Sulawesi Selatan sehingga lebih mampu bersaing,
 - c. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat yang diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan target 5 Besar di Sulawesi Selatan.
 - d. Meningkatnya penguatan kelembagaan masyarakat.
4. Terwujudnya Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya yang ditandai dengan:
 - a. Terbentuknya jati diri masyarakat sebagai aktualisasi nilai-nilai luhur yang terpadu dengan nilai moderen yang universal;
 - b. Meningkatnya aktivitas dan derajat kehidupan keagamaan.

- c. Menurunya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tak bertanggung jawab baik pada lingkungan Birokrasi, Politis maupun pada lingkungan masyarakat, sehingga Kabupaten Jeneponto Sebagai daerah bebas KKN di Sulawesi Selatan.
5. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi, yang ditandai dengan :
 - a. Terciptanya struktur ekonomi yang berbasis sumber daya (*resources based economic*) yang maju terutama sektor pertanian, kehutanan, perkebunan serta kelautan dan perikanan yang didukung dengan industri serta aktifitas ekonomi kerakyatan lainnya;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta melalui pengembangan pola kemitraan usaha dalam pembangunan;
 - c. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja
6. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Daya Saing Daerah, yang ditandai dengan :
 - a. Terkelolanya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk andalan dan unggulan nasional dan regional yang berimplikasi pada meningkatnya iklim investasi.
 - b. Tersedianya sumber daya manusia yang handal dan menguasai IPTEK dalam menghadapi tantangan global.
 - c. Meningkatnya kualitas produk-produk daerah yang memiliki nilai kompetitif di pasar nasional, regional maupun di pasar global yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah secara makro;

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 tersebut, maka dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013 dan memperhatikan hasil analisis isu strategis serta mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto yang terpilih masa bakti 2014 – 2018, maka Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 – 2018 adalah : **“Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik Dengan Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera”**.

Berdasarkan Visi pembangunan tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
4. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Produktif Transparan dan Akuntabel;
5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan dasar di setiap desa/ Kelurahan;
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jeneponto yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun 2014-2018 yang

berhubungan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi Kedua.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua dan keempat yakni :

a. **Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;**

Tujuan 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, Pelaku Usaha Wisata, Kelompok Sanggar Seni, dan Pengelola Daya Tarik Wisata yang memiliki kompetensi dan lebih kompetitif. dengan sasaran pembinaan SDM Aparatur, Pelaku Usaha Wisata, Kelompok Sanggar Seni dan Pengelola Daya Tarik Wisata yang handal dan kompetitif.

Tujuan 4 : Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan, dengan sasaran pembinaan Kesadaran dan Apresiasi Masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan Kebudayaan

b. **Misi Keempat : Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel;**

Tujuan 5 : Melaksanakan perencanaan yang realistis, terukur, transparan, efektif, efisien dan professional serta melaksanakan pelaporan yang akuntabel, dengan sasaran optimalisasi perencanaan dan sistem pelaporan yang professional

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto menyangkut hubungan kehidupan yang berkeeseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Jeneponto.

Selain itu, beberapa isu strategis utama pembangunan Kabupaten Jeneponto juga bisa menjadi landasan pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto. Isu-isu strategis utama pembangunan Kabupaten Jeneponto tersebut adalah:

1. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan Daya Tarik Wisata.
2. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.
3. Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif dan efisien.
4. Kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan masih rendah.
5. Belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat.
6. Rendahnya peran serta masyarakat terhadap Sadar Wisata dan internalisasi Sapta Pesona.
7. Belum optimalnya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai acuan utama dari setiap lembaga kemasyarakatan dan setiap individu pada semua aspek kehidupan.
8. Belum optimalnya perkembangan kesenian daerah dan kesenian kontemporer secara adaptif-kreatif sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri asli sebagai bagian dari kebudayaan daerah.
9. Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dalam pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya serta peningkatan kualitas paket/event wisata.

Isu-isu utama ini merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak cukup terjadi di beberapa tempat saja, namun harus merata di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. Peningkatan kualitas dalam segala aspek secara merata diharapkan akan meningkatkan juga produktivitas dan kualitas masyarakat Kabupaten Jeneponto dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada sehingga diharapkan daya saing Kabupaten Jeneponto pun semakin meningkat hingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata ke tingkat yang paling tinggi. Kesejahteraan yang merata diharapkan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan secara disiplin dan dengan penuh kesadaran.

Sebagai salah satu sektor pembangunan daerah, visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto mengacu kepada visi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang tangguh, berdaya saing dan berkesinambungan sebagai pilar Perekonomian menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera”**.

Visi pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tersebut mengandung pengertian bahwa :

1. Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan bermakna bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto adalah Pusat Penggalan, Pelestarian, Pembangunan dan pengembangan sektor Pariwisata dan kebudayaan;
2. Tangguh Mengandung makna adanya kondisi dimana budaya masyarakat tidak terpengaruh oleh arus globalisasi yang negatif dan

- tetap menjaga dan melestarikan norma-norma dan nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah ditengah arus globalisasi sebagai ciri khas dan jati diri Masyarakat *Turatea* Kabupaten Jeneponto. dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dengan dasar *Si'ri Na Pacce*
3. Berdaya saing mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan komparatif sebagai kekuatan untuk menghadapi persaingan dan tantangan globalisasi dan pasar bebas.
 4. Berkesinambungan berarti bahwa Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan secara terprogram, terarah dan berkelanjutan
 5. Pilar perekonomian berarti mampu menjadi pendukung utama perekonomian di Kabupaten Jeneponto menuju masyarakat yang sejahtera dengan jalan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian pada sektor pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka visi pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto yang ditetapkan adalah **“Terwujudnya Kabupaten Jeneponto Sebagai Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus Berbasis Ekologi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Yang Religious, Tangguh, Berdaya Saing dan Berkesinambungan Sebagai Pilar Perekonomian Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera”**.

Makna yang terkandung dalam Visi pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto tahun 2018-2033 yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto tersebut mengandung pengertian bahwa :

1. Destinasi pariwisata alam, budaya dan minat khusus berbasis ekologi unggulan di provinsi Sulawesi Selatan mengandung makna bahwa kabupaten Jeneponto sesuai dengan potensi alam, masyarakat dan budaya harus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang spesifik pada variasi bentang alam pulau, pantai, dataran rendah hingga dataran tinggi dengan kekayaan flora dan fauna serta sejarah budaya tinggalan masa lampau perlu dikemas secara unik dengan memperhatikan pelestarian alam, lingkungan, dan budaya sehingga tercipta karakter destinasi yang berbeda dan unggul di Sulawesi Selatan;
2. Religious mengandung makna bahwa masyarakat Jeneponto sangat taat dalam memeluk dan beribadah sesuai ajaran agama serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, sehingga dalam pengembangan pariwisata tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan sistem nilai masyarakat tersebut;
3. Tangguh Mengandung makna adanya kondisi dimana budaya masyarakat tidak terpengaruh oleh arus globalisasi yang negatif dan tetap menjaga dan melestarikan norma-norma dan nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah ditengah arus globalisasi sebagai ciri khas dan jati diri Masyarakat *Turatea* Kabupaten Jeneponto. dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dengan dasar *Si'ri Na Pacce*.

4. Berdaya saing mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan komparatif sebagai kekuatan untuk menghadapi persaingan dan tantangan globalisasi dan pasar bebas.
5. Berkesinambungan berarti bahwa Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan secara terprogram, terarah dan berkelanjutan
6. Pilar perekonomian berarti mampu menjadi pendukung utama perekonomian di Kabupaten Jeneponto menuju masyarakat yang sejahtera dengan jalan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian pada sektor pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto tersebut, maka tujuan pembangunan pariwisata kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan destinasi di Kabupaten Jeneponto yang berdaya saing.
2. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Jeneponto sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi.
3. Membangun Daya Tarik Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus berbasis ekologi.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat.
5. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata.
6. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata.
7. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Jeneponto
8. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Jeneponto ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah.
9. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto.
10. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
11. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Secara operasional, sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Jeneponto, dengan sasaran utama tahun 2018-2033 adalah :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata, pengembangan

- aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
2. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenities pariwisata;
 3. Meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk dan atraksi wisata;
 4. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
 6. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

BAB - 3

KONDISI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

A. Sejarah Kabupaten Jeneponto

Sebelum kedatangan bangsa Eropa terutama Belanda di Sulawesi Selatan, pemerintahan setiap daerah masih berbentuk kerajaan dan pada kelompok kerajaan yang berlatar etnis Makassar, melalui literatur sejarah, relatif hanya memperkenalkan tentang Kerajaan Gowa dan Tallo sebagai pioner kerajaan Makassar. Adapun kerajaan-kerajaan lainnya termasuk kategori kerajaan kecil bahkan pernah menjadi wilayah pemerintahan dari kerajaan besar Gowa-Tallo. Demikian halnya di Jeneponto yang mempunyai banyak kerajaan-kerajaan lokal seperti Garassi, Bangkala, Binamu, Tarowang, Sapanang, Arungkeke dan lain-lain, justru tenggelam di bawah kebesaran nama Kerajaan Gowa-Tallo.

Riwayat beserta catatan sejarah kerajaan-kerajaan (*wanua*) tersebut pada masa kini praktis hanya di kenal melalui suguhan informasi yang sangat kurang bahkan dapat dikatakan sangat minim. Padahal, pada sisi lain setiap kerajaan dalam skala kekuasaan sekecil apapun pasti memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, demikian halnya dengan daerah Jeneponto yang pada masa lampau merupakan sebuah kerajaan yang mempunyai keunikan dan eksotisme sejarah dan budaya tersendiri.

Jeneponto atau lazim disebut *Turatea* dahulu adalah sebuah Kerajaan Makassar yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri, yang didalamnya terhimpun enam kerajaan lokal (*Palili*) yaitu Garassi, Bangkala, Binamu, Arungkeke, Tarowang dan Sapanang serta 16 kampung atau domain (Caldwell dan Bouges, 204 dalam Hadrawi 2008:8). Kemudian disisi lain Jeneponto beserta seluruh kerajaan-kerajaan lokalnya memiliki sejarah awal kemunculannya menjadi sebuah kerajaan serta perjalanannya hingga berinteraksi dengan agama Islam.

Sejarah keberadaan Jeneponto dikaji melalui dua pendekatan sejarah. Pertama, pada bulan November 1863, yang merupakan tahun berpisahannya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Hal ini membuktikan jiwa patriotisme *Turatea* dalam melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu dan pada tahun tersebut mulai diangkat "*Todo*" sebagai lembaga adat yang representatif mewakili masyarakat. Pada tanggal 1 Mei 1959, berdasarkan Undang - undang No . 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah

Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.

Pendekatan Kedua adalah pada tanggal 1 Mei 1863, merupakan bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu yang diangkat secara demokratis oleh “*Toddo Appaka*” sebagai lembaga representatif masyarakat *Turatea*. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959 dan diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling negeri- negeri *Turatea* setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Pada tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (*Mattewakkang Dg Raja*) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda .

Pada abad ke-XVII, selain Arungkeke terdapat pula beberapa kerajaan yang eksis, diantaranya kerajaan Gowa, Balanipa (Mandar), Sanrobone (Takalar), Bulu-bulu (Sinjai), Binamu (Jeneponto), dan Suppa. Kerajaan Arungkeke merupakan kerajaan didaerah *Turatea* yang eksis pada abad ke-XVII, dimana secara geografis, Arungkeke terletak di pesisir pantai selatan Sulawesi Selatan. Wilayah Kerajaan Arungkeke diapit oleh dua Wanua, yaitu Palajau di sebelah barat dan Togo-Togo di sebelah timur. Dahulu bentuk pemerintahan di *Butta Turatea*, berbentuk pemerintahan “*Kare*” (Tompo, 2001:6). Sekarang ini wilayah Arungkeke merupakan sebuah daerah kecamatan dalam pemerintah Kabupaten Jeneponto. Didaerah ini mempunyai nilai-nilai historis masa lalu yang sangat tinggi serta nilai budaya *siri' na pacce* masih dijaga. Didaerah ini juga menjunjung tinggi adat istiadat dari leluhurnya. Salah satu contohnya yakni tradisi *addengka ase lolo* atau pesta panen yang diadakan di *Balla Lompoa* atau istana Arungkeke.

Sebagai salah satu kerajaan yang ada didaerah Jeneponto dahulu, Kerajaan Arungkeke mempunyai peranan yang cukup strategis dalam menentukan dan menciptakan suasana kondusif di wilayah kekuasaannya. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yang memungkinkan kerajaan ini disegani. Disamping itu dari catatan silsilah raja-raja Arungkeke, kebangsawan serta kekerabatan raja-rajanya punya hubungan dengan kerajaan di sekitar wilayah *Turatea* juga punya hubungan dengan kerajaan-kerajaan diluar. Diantaranya dapat dilihat dari silsilah Arungkeke, dimana terdapat integrasi kebangsawanannya dengan Tarowang dan Boengoeng, Karaeng Tarowang bernama Patta Dulung Aroeng Areojoeng yang menikah dengan Maryam Daeng Rawang Karaeng Rawang dan melahirkan lima orang anak (Hadrawi, 2008:68-69).

Kerajaan Arungkeke merupakan kerajaan yang berdiri sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah-daerah di Nusantara ini khususnya di Sulawesi Selatan masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Sehingga tidaklah mengherankan jika pelopor-pelopor atau tokoh-tokoh yang akan memimpin suatu kerajaan adalah berdasarkan garis keturunan atau ahli waris dari kerajaan itu sendiri. Telah menjadi anggapan umum masyarakat tradisional Sulawesi Selatan dimasa lampau, bahwa raja-raja dan cikal bakal raja yang memerintah adalah titisan darah dari Tumanurung.

Kisah Tumanurung itu merupakan awal terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Tomanurung inilah Sulawesi selatan mengalami perkembangan kemasyarakatan, kenegaraan dan kepemimpinan bidang-bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang memulai kecenderungan spesialisasi fungsi-fungsi dan peranan-peranannya.

Seperti halnya di Kerajaan Arungkeke, mitos Tumanurung masih di percaya bahwa sejarah Kerajaan Arungkeke diawali dengan munculnya wanita cantik (*uru-urua*) yang tidak diketahui asal-usul keberadaannya serta kematiannya tidak diketahui oleh masyarakat, jadi kuburannya pun tidak ada, sehingga masyarakat pada waktu itu menyebutnya *Tumanurung* (Manusia yang turun dari Khayangan). *Toalu' Daeng Taba'* turun di Kerajaan Arungkeke, tepatnya di bawah pohon Asam, dia ditemani oleh pengawal dan budaknya. Tumanurung ini memakai baju, Mahkota dari emas. Disamping itu ada juga peralatan yang dibawanya, antara lain Lesung, Alu dan beberapa perhiasan. Saat ia muncul ia menggunakan Lesung dan Alu dibawah pohon Asam, maka dari itu pelantikan raja Arungkeke dilakukan dibawah pohon asam sambil di ayun, disaat pelantikan itulah suara gendang dan alat-alat musik lainnya yang berusia ratusan tahun diperdengarkan. Suara alat musik ini dikenal dengan nama *Ganrang Talluna Arungkeke* (Al-Maruzzy, 2010:2).

Arungkeke juga sebuah kerajaan yang besar sama seperti Binamu, Bangkala dan Tarowang, dengan raja pertamanya yaitu seorang *Tumanurung* yang diberi gelar Ratu atau Karaeng Baine *Toalu' Daeng* atau Karaeng Taba Karaeng Arungkeke. Kerajaan ini diperhitungkan kebesarannya khususnya di wilayah Turatea dan umumnya di wilayah Sulawesi Selatan sebagai kerajaan lokal dengan daerah kekuasaannya antara lain, meliputi Palajau, Bulobulo, Arungkeke Tamanroya, Arungkeke Pallantikang, Pettang dan satu kerajaan Palili' yaitu kerajaan Bungeng. Dalam konteks kerajaan lokal di Turatea, Arungkeke merupakan sebuah kerajaan yang memiliki wilayah pemerintahan tersendiri, situasi ini terjadi pada awal abad munculnya Arungkeke sebagai sebuah kerajaan (Hadrawi, 2008:68).

Namun pada perkembangannya, yaitu pada akhir abad ke-XVII, Arungkeke mengalami perubahan status sebagai kerajaan

yang bernaung di bawah Binamu, sebagai domain atau daerah istimewa. Walaupun pada saat itu, kerajaan Arungkeke tidak bersedia ikut atau tunduk.

Turatea merupakan sebuah kerajaan beretnis Makassar yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kerajaan lokal tersebut mempunyai sistem pemerintahan, wilayah, komunitas, beserta tradisi tersendiri. Adapun kerajaan kuno *Turatea* seperti; Binamu, Bangkala, kalimporo', Garassi, Layu, Sapanang, Tarowang, Sidenre dan Arungkeke. Salah satu keunikan Jeneponto pada beberapa kerajaan lokal ada yang mempunyai mitologi tersendiri perihal munculnya raja pertama atau lazim disebut *tumanurung*. Mitos-mitos *tomanurunga* itu mempunyai formula-formula cerita yang unik yang menjadi karakter penceritaan setiap daerah.

Dalam sejarahnya, Jeneponto berada dalam lintas politik tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu, kemudian Gowa dan yang terakhir Bone. Pengaruh tiga kerajaan tersebut semakin memberi warna Jeneponto dalam perjalanan sejarah dan budayanya disamping tetap memperlihatkan identitas lokalnya yang khas. Kata Jeneponto adalah sebuah nama yang baru muncul pada abad XIX dan munculnya nama tersebut sangat terkait dengan kepentingan administratif pemerintahan kolonial di wilayah Selatan Sulawesi Selatan.

Situasi di wilayah Jeneponto dalam peta saat ini dengan gambaran yang ada pada beberapa abad silam terutama abad XVI-XVII sangatlah berbeda. Wilayah-wilayah yang ada sekarang sudah dalam model pemerintahan administrasi modern dengan menempatkan nama Jeneponto sebagai sebagai nama kabupaten dalam provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto membawahi 11 kecamatan, dimana tiap-tiap kecamatan membawahi desa atau kelurahan. Pada umumnya kerajaan-kerajaan lokal atau *wabuwa* sekarang ini ada yang menjadi desa atau kelurahan dan ada pula yang menjadi kecamatan.

B. Kondisi Fisik Kabupaten Jeneponto

1. Aspek Fisik Dasar

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu dari 24 Kabupaten/ Kota dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 90 km dari kota Makassar (ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan).

Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak antara $5^{\circ} 16'13''$ sampai $5^{\circ} 39'35''$ Lintang Selatan dan antara $12^{\circ} 14'19''$ sampai $12^{\circ} 7'31''$ Bujur Timur. Topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan laut, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut, dan pada bagian Selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut.

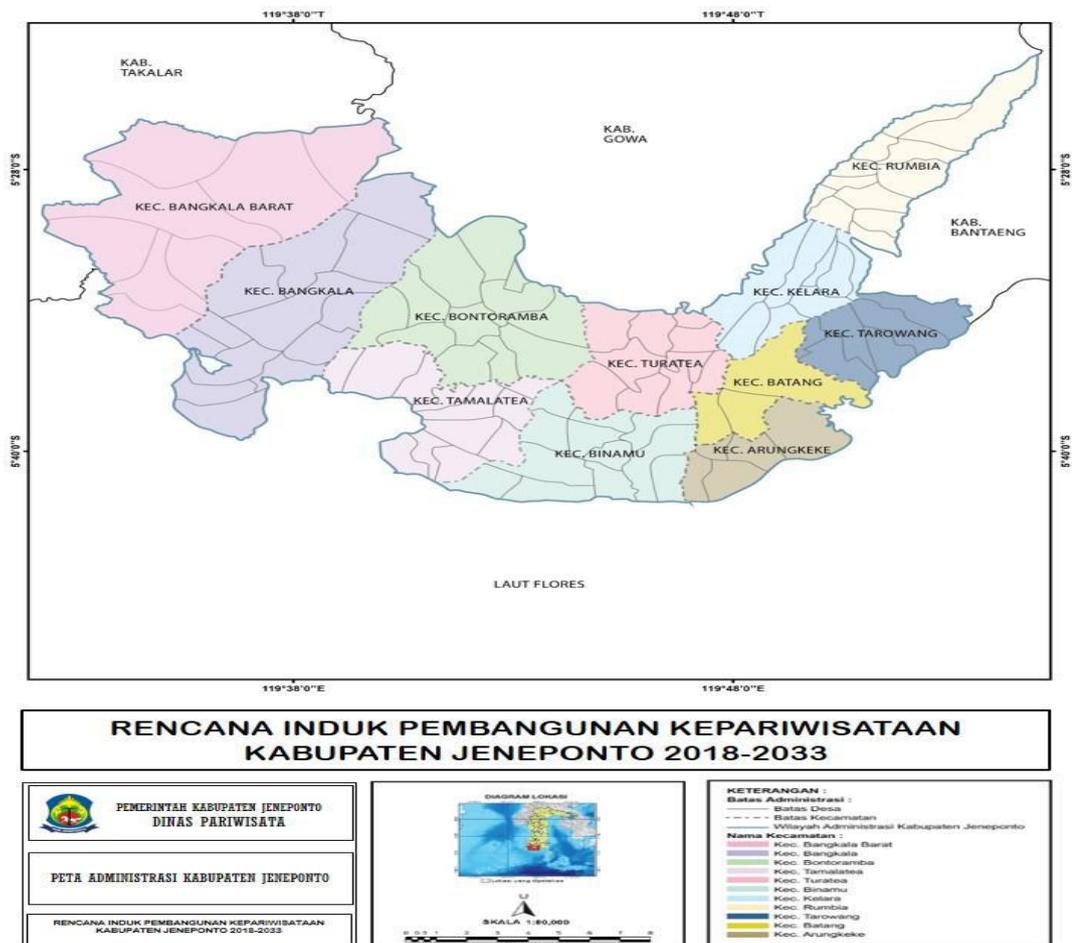
Secara administratif, Kabupaten Jeneponto yang memiliki luas 749,79 km² terdiri dari 11 Kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 82 dan 31 kelurahan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Takalar
- 2) Sebelah Selatan : Laut Flores.
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Takalar.

Secara ekonomi, kabupaten Jeneponto memiliki letak yang sangat strategis karena berada pada jalur perhubungan darat yang menghubungkan kota-kota kabupaten kearah kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan Sinjai, serta jarak yang cukup dekat dengan kota Makassar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai wilayah administratif Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 8
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jeneponto



Sumber : Hasil Penelitian, 2018

2. Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk kabupaten Jeneponto tahun 2017 sebesar 359.787 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk berjumlah 95,42%, terdiri dari 173.771 jiwa penduduk laki-laki dan 186.016 jiwa penduduk perempuan dengan penyebaran penduduk terbesar adalah Kecamatan Bangkala yaitu sebanyak 53.887 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan jumlah penduduk hanya sebesar 18.517 jiwa. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 - 2017

No	Kecamatan	2010	2017	Laju Pertumbuhan
1.	Bangkala	49.924	53 887	1 ,10
2.	Bangkala Barat	26.374	28 469	1 ,10
3.	Tamalatea	40.384	41 810	0 ,50
4.	Bontoramba	35.003	36 242	0 ,50
5.	Binamu	52.483	56 068	0 ,95
6.	Turatea	29.954	32 002	0 ,95
7.	Batang	19.203	19 494	0 ,22
8.	Arungkeke	18.244	18 517	0 ,21
9.	Tarowang	22.350	22 682	0 ,21
10	Kelara	26.877	27 269	0 ,21
11	Rumbia	23.012	23 347	0 ,21
Jumlah		343.808	359.787	0,65

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

Selama periode 2010-2017 laju pertumbuhan penduduk mengalami percepatan sebesar 0,65%. Sedangkan kepadatan penduduk setiap km² dihuni sebanyak 247 jiwa. Wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar adalah kecamatan Tamalatea yang mencapai 372 jiwa per km², dan kepadatan penduduk terendah terletak di wilayah kecamatan Bangkala Barat yang hanya mencapai 93 jiwa per km².

C. Potensi Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto terdiri dari daya tarik wisata pantai, gua, laut, pulau, panorama, agro, sejarah, budaya masyarakat tradisional, maupun *events* (peristiwa pariwisata). Adapun potensi daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto dilihat dari aspek sejarah, aspek sosial budaya masyarakat, dan sektor-sektor lain yang terkait lainnya

1. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam sebagai salah satu daya Tarik wisata Kabupaten Jeneponto menjadi daya tarik utama bagi

wisatawan untuk berkunjung. Data dan sebaran potensi wisata alam pantai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Potensi Wisata Alam Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Goa Gantarang Buleng	1. Goa 2. Panorama Alam	Desa Gantarang Kec. Kelara
2	Pantai Ujung Timur	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan olahraga pantai	Desa Bonto Ujung Kec. Tarawang
3	Wisata Hutan Mangrove	1. Panorama alam 2. Flora dan fauna 3. Wisata Edukasi	Desa Balang Beru Kec. Tarawang
4	Lembah Hijau Rumbia	1. Panorama Alam 2. Kolam Renang 3. Out-bound 4. Wisata Agro	Desa Bontonompo Kec. Rumbia
5	Air Terjun Tama'lulua Bossolo	1. Panorama Alam 2. Air Terjun 3. Goa	Desa Rumbia Kec. Rumbia
6	Air terjun Boro	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Bontonompo Kec. Rumbia
7	Pasanggarahan Loka	1. Panorama Alam	Desa Loka Kec. Rumbia
8	Salu Lompoa	1. Panorama Alam	Desa Lebang Manai Kec. Rumbia
9	Air terjun Lembah Impian	1. Panorama Alam 2. Air terjun 3. Goa dan Sumur	Desa Bontomanai Kec. Rumbia
10	Wisata Lembah Bontolojong	1. Panorama Alam	Desa Ujung Bulu Kec. Rumbia
11	Air terjun Tuang Loe	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Dataru Kec. Bontoramba
12	Air terjun Kara'ngasa	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Lebang Manai Kec. Rumbia
13	Pantai Karaeng Sutte (Karsut)	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Desa Kampala Kec. Arungkeke
14	Pantai Kampung Sicini	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Desa Sicini Kec. Arung Keke
15	Sungai Ta'lambua	1. Panorama Alam 2. Permandian Alam	Desa Paitana Kec. Turatea
16	Birtaria Kassi	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan	Tonro Kassi Kec. Tamalatea

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
17	Bukit Toenga	1. Panorama Alam	Kel. Pallengu Kec. Bangkala
18	Pulau Libukang (Pulau Harapan)	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
19	Je'ne A'ribaka	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Kapita Kec. Bangkala
20	Timuru (Air Terjun Patugurrunna Jongayya)	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Desa Marayoka Kec. Bangkala
21	Pantai Katubiri	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Desa Bisoli Kec. Bangkala Barat
22	Batu Sipinga	1. Panorama Alam	Desa Garassikang Kec. Bangkala Barat
23	Pantai Garassikang	1. Panorama Alam 2. Rekreasi dan Olahraga	Kec. Bangkala
24	Bukit dan Danau Bulu Jaya	1. Panorama Alam 2. Danau	Bulu Jaya Kec. Bangkala Barat

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

2. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi keindahan alam, tinggalan benda sejarah masa lampau yang dimiliki oleh kabupaten Jeneponto memiliki keunikan tersendiri serta memiliki keterkaitan sejarah dengan berbagai masyarakat di berbagai wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan Nusantara di masa lampau. Hal ini menunjukkan posisi dan peran strategis kabupaten Jeneponto dalam kehidupan dan peradaban masa lalu termasuk lintas sejarah yang menempatkan kabupaten Jeneponto menjadi salah satu bagian dari sejarah tersebut.

Kabupaten Jeneponto juga memiliki berbagai jenis atraksi budaya sebagai tinggalan kebudayaan berbagai masyarakat yang mendiami dan bermukim serta melakukan hubungan sosial ekonomi di masa lalu. Adapun jenis daya tarik wisata sejarah budaya kabupaten Jeneponto terdiri dari benda tinggalan sejarah, tarian, ritual, permainan rakyat, benda pusaka, dan benda cagar budaya lainnya. Jenis daya tarik tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Jeneponto
Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Rumah adat Kambara' Tolo'	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Tolo' Kec. Kelara
2	Mesjid Tua Tolo'	1. Rumah Ibadah 2. Benda Sejarah	Mataere Tolo' Kec. Kelara
3	Makam Tuang Nong (Tung Nung)	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Mataere Tolo' Kec. Kelara
4	Rumah Adat Kampala	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Kampala Kec. Arungkeke
5	Rumah Adat Bulo – Bulo	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Bulo- Bulo Kec. Arungkeke
6	Rumah Adat Arungkeke	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Arungkeke Kec. Arungkeke
7	Rumah Adat Bonto Tangnga	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Tamalatea Kec. Tamalatea
8	Makam Joko	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Joko Kec. Bonto Ramba
9	Makam Raja-Raja Binamu	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Joko Kec. Bonto Ramba
10	Rumah Adat Kerajaan Binamu	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Kel. Pabiringa Kec. Binamu
11	Rumah Adat Kerajaan Binamu Raja Patappoi Kr Loloa	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu
12	Rumah adat Sapanang	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Kel. Sapanang Kec. Binamu
13	Makam Kr. Balang dan Gallarang Tannginunga Je'ne	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Balang Toa Kec. Binamu
14	Makam Kr. Karampang Butung	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Balang Toa Kec. Binamu
15	Makam Kr. Bebang	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Sapanang Kec. Binamu
16	Makam Patima Dg	1. Makam	Pabiringa Kec.

	Ti'no	2. Tinggalan Arkeologi	Binamu
17	Makam Kr. Toayya (Kr. Ngilanga)	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Kel. Benteng Kec. Bangkala
18	Makam Kr. Lompo Bongga	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
19	Makam Kr. Lompo Lappe	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
20	Makam Kr. Tanatoa	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Kalimporo (Borong Camba) Kec. Bangkala
21	Makam Parang Loe	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Kalimporo (Borong Camba) Kec. Bangkala
22	Makam Manukulang Dg. Pasore'	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Pallantikan Kec. Bangkala
23	Rumah Adat Alm. Pabisei Kr. Tunru	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Kel. Pantai Bahari Kec. Bangkala
24	Rumah Adat Kr. Tanatoa	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Tanatoa Kec. Bangkala
25	Makam Kr. Banri Manurung	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat
26	Makam Pabisei Kr. Tunru	1. Makam 2. Tinggalan Arkeologi	Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat
27	Kawasan Pacuan Kuda	1. Pacuan Kuda 2. Atraksi Budaya	Desa Kalimporo Kec. Bangkala
28	Accera Gaukang Bangkala	1. Pesta Rakyat 2. Tinggalan Sejarah	Desa Bisoli Kec. Bangkala Barat
29	Pesta Panen	1. Pesta Panen 2. Atraksi Budaya	Desa Beroanging Kec. Bangkala Barat
30	Maulid Sidenre Khusus Kelompok Sayye	1. Ritual Budaya	Sidenre' Kec. Binamu
31	Je'ne-je'ne Sappara	1. Pesta Rakyat 2. Ritual Budaya	Desa Tarowang Kec. Tarowang
32	Je'ne-je'ne sappara Karampang Pa'ja	1. Pesta Rakyat 2. Ritual Budaya	Karampang Pa'ja Kec. Tamalatea
33	Je'ne-je'ne sappara	1. Pesta Rakyat	Karampang Pa'ja

	Borong Tala	2. Ritual Budaya	Kec. Tamalatea
34	Lapangan Pacuan Kuda Andi Lomba Lamae Kr. Lomba	1. Pacuan Kuda 2. Atraksi Budaya	Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu
35	Permandian Bungung Salapang	1. Sumur Permandian 2. Ritual Budaya	Desa Bontorappo Kec. Tarowang
36	Rumah Adat Kalimporo	1. Rumah Adat 2. Benda Sejarah	Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala
37	Artefak Serpilh Bilah	1. Tinggalan Sejarah	Kelurahan Palengu, Kecamatan Bangkala
38	Situs Serpilh Bilah Karama	1. Tinggalan Sejarah	Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat
39	Kompleks Makam Kalimporo	1. Makam Sejarah	Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala
40	Makam Pasiri Dg Mangasa Karaeng Labbua Talibannanna	1. Makam Sejarah	Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

3. Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan di kabupaten Jeneponto. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata,

Selain potensi wisata buatan manusia (*man-made*), potensi wisata minat khusus juga merupakan sarana atau aktivitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada saat melaksanakan kunjungan ke kabupaten Jeneponto. Potensi wisata minat khusus yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aktivitas wisata selain aktivitas wisata yang secara operasional melekat dalam aktivitas wisata alam. Potensi daya tarik wisata wisata tersebut berupa taman, rekreasi keluarga, dan kuliner. Adapun Daya Tarik wisata buatan manusia dan minat khusus kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Dermaga pantai Garassikang	1. Rekreasi Keluarga 2. Panorama Pantai	Desa Garassikang Kec. Bangkala Barat
2	Tambak Garam (Pacelanga)	1. Kreativitas Masyarakat 2. Industri Garam Rakyat	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
3	Tambak Garam	1. Kreativitas Masyarakat 2. Industri Garam Rakyat	Pallantikang Kec. Arungkeke
4	Water Park Boyong	1. Rekreasi Keluarga 2. Kolam Renang	Tonro Kassi Timur (Boyong) Kec. Tamalatea
5	Taman Turatea	Rekreasi Keluarga	Kel. Empoang Kec. Binamu
6	Taman Siswa	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
7	Taman PKK	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
8	Taman Dharma Wanita Persatuan	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
9	Taman Lalu Lintas	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
10	Taman Pacuan Kuda	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
11	Pantai Tamarunang	1. Rekreasi Keluarga 2. Panorama Pantai	Kec. Binamu
12	Hutan Kota	Rekreasi Keluarga	Kel. Balang Kec. Binamu
13	Coto/ Konro Kuda	Kuliner Tradisional	
14	Ballo' Tanning/ Tuak Manis	Minuman Tradisional	Kec. Tamalatea
15	Lammang	Kuliner Tradisional	Ruku-Ruku Kel. Palangu' Kec. Bangkala

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

D. Perekonomian Kabupaten Jeneponto

1. Struktur Ekonomi

Berdasarkan penghitungan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Jeneponto tahun 2017 adalah sebesar 8,26 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 adalah 5.967.176,40 juta rupiah. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB kabupaten Jeneponto. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah.

Struktur Perekonomian Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan kontributor terbesar masih diberikan oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 49,42 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat kabupaten Jeneponto masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi daerah ini masih bertumpu pada sektor agraris.

Pada Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 2,27% dari tahun sebelumnya yang mencapai 51,69%. Sementara untuk sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum hanya mampu menyumbang dan memberikan kontribusi sebesar 0,29 % walapun menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,01% per tahun. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata agar dapat berkontribusi lebih besar dalam struktur perekonomian kabupaten Jeneponto.

Adapun gambaran mengenai struktur ekonomi Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2017
(dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	52,40	51,80	51,69	41,42
2.	Pertambangan Dan Penggalian	2,34	2,60	2,64	2,72
3.	Industri Pengolahan	3,38	3,41	3,34	3,42
No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,15	0,11	0,11	0,13
5.	Pengadaan Air,	0,08	0,08	0,07	0,07

	Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang				
6.	Konstruksi	8,99	9,18	9,18	10,75
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	11,08	11,38	11,67	12,30
8.	Transportasi Dan Pergudangan	1,02	1,08	1,01	1,01
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,26	0,27	0,28	0,29
10.	Informasi Dan Komunikasi	3,87	3,59	3,61	3,69
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	2,34	2,27	2,33	2,22
12.	Real Estate	2,35	2,44	2,40	2,35
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	6,90	6,83	6,73
15.	Jasa Pendidikan	2,14	2,10	2,04	2,06
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	2,17	2,25	2,24	2,27
17.	Jasa Lainnya	0,52	0,52	0,53	0,54

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

Bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2017 kabupaten Jeneponto mengalami pertumbuhan berada di posisi ke tiga setelah kabupaten Bone dan kabupaten Soppeng, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,26% dari 24 buah kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator perekonomian utama yang digunakan dalam analisis stuktur dan pertumbuhan perekonomian wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau disingkat PDRB. PDRB merupakan suatu ukuran kuantitatif dari hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan pada suatu saat tertentu untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian pada masa-masa lalu dan masa sekarang serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk

menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/ *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa

yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin- mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk ke bukan penduduk. Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya terdiri dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Berdasarkan PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha mencapai 8.645.022,9 milyar rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang tertinggi dengan sumbangan sebesar 49,42%. Data mengenai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jeneponto menurut lapangan usaha pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017 (Dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	9,28	4,43	7,85	5,20
2.	Pertambangan Dan Penggalian	14,08	15,98	12,84	12,08
3.	Industri Pengolahan	9,68	6,67	7,05	8,70
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	17,31	-0,37	5,03	5,63
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	4,55	0,56	4,77	5,47
6.	Konstruksi	5,31	8,79	7,08	23,26
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	8,90	10,09	11,17	11,09
8.	Transportasi Dan Pergudangan	10,41	8,16	5,67	9,12
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	10,39	13,74	13,69	12,47
10.	Informasi Dan Komunikasi	4,01	10,68	10,16	9,30
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	10,06	4,83	12,06	0,85
12.	Real Estate	3,60	7,39	6,26	3,28
13.	Jasa Perusahaan	0,07	5,87	5,71	8,42
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	4,59	7,85	5,07
15.	Jasa Pendidikan	2,91	7,25	6,40	7,80
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	8,98	9,31	7,21	8,18
17.	Jasa Lainnya	6,54	8,99	9,16	9,27

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

BAB - 4

RENCANA PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA TANJUNG MALLASORO

A. Kondisi Eksisting Daya Tarik Wisata

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu tempat paling berangin di Indonesia dengan hembusan angin yang konsisten dari bulan April hingga Oktober, kecepatan angin bertiup 20-35 knot pada musim puncak. Potensi angin ini pula yang menjadikan kabupaten Jeneponto memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Indonesia dengan 42 buah turbin angin telah dibangun menjadikan PLTB ini, ladang angin terbesar di Asia-Pasifik, dan membantu meningkatkan energi terbarukan di provinsi Sulawesi Selatan.

Tanjung Mallasoro merupakan sebuah ikon baru daya tarik pariwisata Kabupaten Jeneponto dan provinsi Sulawesi Selatan sebagai spot terbaru untuk olahraga *kitesurfing* yang merupakan gabungan dari aspek olahraga *wakeboarding*, *snowboarding*, *windsurfing*, *surfing*, paralayang, *skateboard* dan senam menjadi satu olahraga ekstrim

Tanjung Mallasoro terletak di pantai desa Mallasoro, kecamatan Bangkala yang menghadap ke laguna. Kondisi pantai yang masih sangat asri dengan laguna berpasir yang sangat panjang, membentang lebih dari 2 km dengan perairan dangkal dan datar. Pantai Tanjung Mallasoro yang luas menawarkan aktivitas *kitesurfing* yang memikat karena banyak ruang untuk lepas landas dan mendarat dengan aman. Tempat ini sangat cocok untuk peselancar (*surfer*) pemula yang ingin belajar maupun peselancar profesional yang ingin mencoba trik-trik luar biasa.

Tanjung Mallasoro sangat disukai peselancar dunia karena angin bertiup selama musim kemarau dengan pemandangan langit biru dapat dijumpai setiap saat dan tidak ada hujan sama sekali. Suhu dengan angin adalah 28°C sangat nyaman dan ideal untuk olahraga *kite surfing* karena atlet *kitesurfing* harus memahami sifat-sifat angin, sekaligus gelombang laut.

Gambaran tentang lokasi daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 9
Lokasi Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Google Earth, 2019

1. Gambaran Umum Wilayah

Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari topografi datar (*flat*), berombak (*undulating*), bergelombang (*rolling*), berbukit (*hilly*) hingga pegunungan (*mountainous*). Topografi datar berombak (kemiringan lereng di bawah 5 %) tersebar dengan luasan sekitar 4.75 ha, atau sekitar 5,68% dari luas total Kabupaten Jeneponto. Areal dengan kemiringan lereng adalah merupakan areal persawahan, ladang, serta kebun campuran. Selebihnya, areal dengan kemiringan lereng lebih dari 5 %, dimana sebagian besar di antaranya adalah merupakan lahan kering.

Kondisi Morfologi Kabupaten Jeneponto ditandai oleh bentuk permukaan yang bervariasi (Moetamar, 2008), yakni, bagian utaranya terdiri dari dataran tinggi dan bukitbukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 400 meter di atas permukaan laut. Pada bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Pada bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.

Perairan Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa sungai (hidrologi) yang sebagian telah dibendung yaitu Kelara, Tino, Pokobulo yang telah berfungsi untuk mengairi sebagian lahan persawahan. Pada bagian Selatan memiliki perairan Laut (Flores Sea) dengan panjang pantai berkisar 114 Km.

Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro sebagai salah satu daya tarik wisata dengan potensi alam yang sangat menarik terletak di Kecamatan Bangkala yang merupakan merupakan salah satu dari 11 kecamatan di kabupaten Jeneponto berbatasan dengan kabupaten Gowa di sebelah utara, kecamatan Tamalatea di sebelah timur, kecamatan Bangkala Barat di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan. Sebanyak 5 desa/ kelurahan di kecamatan Bangkala bukan merupakan daerah pantai dengan dan 9 desa/ kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam.

Menurut jaraknya, letak masing-masing desa/ kelurahan ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/ kelurahan ke ibukota kecamatan maupun ke ibukota kabupaten berkisar 0-16 km. Untuk jarak terjauh dari ibu kota kecamatan adalah Marayoka yaitu sekitar 16 km, sedangkan untuk jarak terdekat adalah kelurahan Benteng.

Luas wilayah kecamatan Bangkala terdiri dari 14 desa/ kelurahan dengan luas wilayah 121,81 km². Dari luas wilayah tersebut, desa Kapita memiliki wilayah terluas yaitu 21,81 km² atau 17,9 % dari luas wilayah kecamatan, sedangkan luas wilayah yang paling kecil adalah desa Tombo-Tombolo yaitu hanya seluas 3,13 km² atau 2,57 % dari luas wilayah kecamatan Bangkala.

Data tentang luas wilayah kecamatan Bangkala menurut luas wilayah pada sebaran desa/ kelurahan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
Luas Wilayah Kecamatan Bangkala Menurut Desa/ Kelurahan

NO.	DESA/ KELURAHAN	LUAS (Km ²)	PERSENTAS E
1	Mallasoro	7,95	6,53
2	Punagaya	8,4	6,9
3	Bontorannu	8,38	6,88
4	Pantai Bahari	5	4,1
5	Pallengu	5	4,1
6	Tombo-tombolo	3,13	2,57
7	Jenetallasa	5,88	4,83
8	Kalimporo	7,63	6,26
9	Benteng	5,19	4,26
10	Pallantikang	12,7	10,43

11	Gunung Silanu	12,5	10,26
12	Kapita	21,81	17,9
13	Marayoka	14,13	11,6
14	Bontomanai	4,12	3,38
Bangkala		121,82	100

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, 2019

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Kapita merupakan desa yang paling luas dari segi wilayahnya, di mana desa Kapita merupakan desa yang berada di daerah ketinggian antara 0 – 5000 mdpl dan termasuk di daerah pesisir. Desa terluas berikutnya adalah desa Marayoka yang luas desanya yaitu 14,13 KM² dan berada di daerah ketinggian antara 500 – 999 mdpl. Sedangkan Desa Mallasoro luasnya sekitar 7,95 KM² dan berada di antara 0 – 500 mdpl atau termasuk di daerah pesisir. Melihat luas wilayah Desa Mallasoro yang luasnya 7,95 Km² dan berada di pesisir pantai Kabupaten Jeneponto memberikan peluang bagi wilayah ini dapat dikembangkan untuk kawasan pariwisata pesisir atau menjadi wilayah yang banyak aktivitas wisata pantai secara khusus garis pantai Desa Mallasoro yaitu Tanjung Mallasoro

Tanjung Mallasoro secara geografis terdapat di Desa Mallasoro. Luas wilayah yang dapat dikembangkan yaitu sekitar \pm 2 – 3 hektar pada wilayah daratan dengan fokus utama pada wisata bahari untuk kegiatan olahraga pantai dan laut serta rekreasi yang bertema bahari/ pantai.

Setiap objek wisata memiliki tipologi berbeda yang segmentasi sesuai dengan motivasi dan kebutuhan wisatawan. Tipologi objek wisata dapat diketahui dengan menggunakan identifikasi fasilitas wisata dan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan. Menurut Plog (1972), tipologi objek wisata terdiri atas lima tipe yaitu objek wisata allosentris, mendekati allosentris, mid-sentris, mendekati mid-sentris dan mendekati psikosentris

Berbicara mengenai tipologi objek wisata, Tanjung Mallasoro adalah daya tarik wisata bahari atau wisata bahari yang mampu memuaskan para pecinta pantai, laut dan area sekitarnya. Berdasarkan jenis daya tarik wisata dari Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro maka Daya Tarik Wisata ini banyak menawarkan kepada wisatawan untuk dapat memuaskan hasrat berlibur ataupun berolahraga di Tanjung Mallasoro. Beberapa jenis special interest yang ditawarkan oleh Tanjung Mallasoro antara lain:

- a) Wisata Ekstrem, Tanjung Mallasoro menawarkan olah raga ekstrem bagi pencinta *kitesurfing*. Ombak Tanjung Mallasoro yang cukup tenang, Anginnya yang lumayan kencang dan pantainya yang tidak terlalu dalam dan tidak berkarang menjadikan kawasan Tanjung Mallasoro sangat cocok untuk menikmati olah raga ekstrem tersebut. Sudah banyak wisatawan asing yang datang dan berolahraga *kitesurfing*, dan

Tanjung Mallasoro sudah menjadi destinasi utama untuk pecinta olah raga ini.

- b) Wisata alam bawah laut, keindahan Tanjung Mallasoro berbanding sejajar dengan keindahan bawah lautnya. Keindahan bawah laut Tanjung Mallasoro masih belum terekspose dengan maksimal, sedangkan banyak wisatawan yang datang hanya menikmati sekitar bibir pantai saja. Ini sebaiknya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan keindahan bawah laut Mallasoro, dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menikmati keindahan tersebut.
- c) Wisata edukasi, untuk menambah aktraksi yang ada di Tanjung Mallasoro, pemerintah juga tetap harus mempertahankan lahan pembudidayaan rumput laut yang ada disekitar Tanjung Mallasoro, petani-petani rumput laut harus menawarkan wisata edukasi tersebut kepada para pengunjung yang datang kesana dengan memperlihatkan metode pembudidayaan serta pengolahan hasil rumput laut hingga menjadi bahan baku untuk di jual ke pembeli atau di ekspor ke luar negeri.

2. Kondisi Aksesibilitas

Secara geografis Tanjung Mallasoro berada di Dusun Bungung Pandang. Untuk menuju ke Tanjung ini harus melalui dusun tersebut dengan jarak sekitar 5.8 Km atau sekitar 10 – 15 menit dari jalan poros jalan utama Makassar-Jeneponto. Jalan masuk ke wilayah pantai sebelumnya tedapat akses masuk akan tetapi akses tersebut telah ditutup oleh masyarakat karena lahannya berbatasan dengan lahan milik swasta sehingga memerlukan akses baru untuk menuju ke kawasan pantai pada Tanjung Mallasoro.

Gambar 10
Akses Masuk Tanjung Mallasoro dari Jalan Poros



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

Saat ini belum ada tanda atau arah petunjuk mulai dari jalan poros sampai ke wilayah dusun yang dapat dilihat oleh pengunjung saat

berkunjung ke wilayah pantai dari Tanjung Mallasoro, hal ini menyebabkan pengunjung masih kesulitan untuk menuju ke wilayah pantai tersebut. Pengunjung yang saat ini akan berkunjung harus menggunakan kendaraan pribadi atau sewa karena moda transportasi umum belum tersedia dari pusat kota ataupun dari jalan poros masuk ke Tanjung Mallasoro. Pada wilayah pantaipun belum ada sama sekali tanda-tanda arah untuk menunjukkan arah ke tempat-tempat yang menjadi atraksi utama dari Tanjung Mallasoro.

Kondisi akses dari jalan poros utama Makassar-Jeneponto menuju daya tarik sebahagian dalam kondisi yang rusak. Akses jalan menuju pantai Tanjung Mallasoro merupakan jalan sementara dengan permukaan tanah dalam kondisi tidak memadai.

Gambar 11
Akses Jalan Pantai Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

3. Kondisi Atraksi

Atraksi wisata yang menjadi daya tarik utama di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah bentangan alam yang bervariasi dari bentangan pantai dan laut hingga kawasan dengan kontur datar dan ketinggian serta panorama pulau harapan (pulau libukang). Pada kawasan sekitar pantai juga ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon rimbun khususnya pohon kelapa sehingga menjadikan kawasan ini menjadi teduh dari panas matahari serta tiupan angin yang menghembus kencang dan konstan menambah eksotisme atraksi wisata Tanjung Mallasoro sebagai sorga *kitesurfer*.

Panorama alam pantai khususnya pada saat matahari terbenam dengan pesona *sunset* merupakan atraksi yang sangat menarik di kawasan ini. Debur dan riak ombak yang cenderung menggoda wisatawan untuk berenang berenang atau sekedar berjalan atau bermain di atas pasir serta rerimbunan pohon.

Kondisi eksisting atraksi wisata Tanjung Mallasoro saat ini cenderung terkesan belum tertata, kurang terawat serta berpotensi terjadi benturan kepentingan dengan masyarakat sekitar kawasan yang selama ini menjadikan kawasan Tanjung Mallasoro sebagai ruang budidaya komoditas rumput laut sebagai sumber utama

perekonomian masyarakat saat ini. Selain itu, kondisi daya tarik Tanjung Mallasoro yang belum dikelola secara profesional menunjukkan lingkungan yang kurang tertata dan tidak terawat sehingga penanganan sampah kurang menjadi perhatian dan mengakibatkan rendahnya kondisi atraksi wisata.

Keterbatasan aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan pada saat berkunjung ke kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro sebagai akibat dari aspek pengelolaan yang tidak profesional mengakibatkan perawatan dan pemeliharaan kawasan serta penyiapan dan pengembangan fasilitas wisata yang kurang baik dan tidak memadai, hal ini berpengaruh terhadap minat kunjungan wisatawan ke kawasan pariwisata eksotis ini walaupun dari sisi publikasi personal wisatawan yang pernah datang dan menikmati eksotisme atraksi wisata Tanjung Mallasoro sudah sangat massif dan positif hingga ke mancanegara.

Gambaran kondisi eksisting atraksi wisata di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 12
Kondisi Pantai pada Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

Posisi strategis pantai Tanjung Mallasoro juga kaya dengan pesona kontur alam dengan pesona keindahan Pulau Harapan (Pulau Libukang) serta kebun dan sawah penduduk dengan nyiur melambai tertiuip angin pantai yang sangat memukau menjadi atraksi alam yang sangat memanjakan wisatawan yang bermain *kitesurfing*. Pada sore hari menjelang senja, panorama alam pantai yang dominan biru cerah di siang hari berubah menjadi nuansa matahari tenggelam yang sangat memukau.

Gambar 13
Kondisi Atraksi Pada Wilayah Lithoral Di Tanjung Mallasoro



Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

4. Kondisi Aktivitas

Aktivitas wisata yang ditawarkan dan dapat dinikmati oleh wisatawan di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro saat ini cenderung monoton. Sebagai kawasan daya tarik wisata yang belum dikelola dengan baik, maka kelengkapan fasilitas yang disiapkan oleh pengelola Tanjung Mallasoro saat ini belum ada, seluruh fasilitas aktivitas disiapkan sendiri oleh wisatawan atau bekerjasama dengan salah seorang pengelola resort yang sudah ada. Saat ini, aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan adalah *kitesurfing*.

Kondisi eksisting aktivitas wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan di kawasan Tanjung Mallasoro saat ini menjadi kurang memadai akibat pengelolaan yang tidak profesional. Hal ini terlihat dari penampilan kawasan yang tidak terawat dari hampir keseluruhan fasilitas wisata yang tersedia di kawasan ini belum dikembangkan. Aktivitas wisata rekreasi dan olah raga pantai lainnya seperti berenang dan berjemur belum dikembangkan di kawasan ini karena fasilitas penunjang aktivitas belum tersedia. Gambaran kondisi eksisting dari aktivitas wisata dengan ketersediaan fasilitas wisata di kawasan Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 14
Kondisi Aktivitas Kitesurfing di Tanjung Mallasoro



Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

5. Kondisi Akomodasi

Ketersediaan akomodasi pada daya tarik wisata merupakan salah satu unsur yang dapat meningkatkan minat kunjungan dan akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke daya tarik wisata karena di sela-sela kegiatan menikmati aktivitas wisata, wisatawan akan membutuhkan tempat dan ruang untuk beristirahat atau menikmati makan minum. Bahkan beberapa kelompok wisatawan menjadikan akomodasi sebagai tujuan utama berkunjung ke daya tarik wisata dengan motivasi ingin tidur dan istirahat pada suasana yang berbeda dari rutinitas kesehariannya.

Fasilitas akomodasi dalam konteks ini adalah seluruh jenis fasilitas yang menyiapkan kamar, tempat istirahat sementara, fasilitas ruang pertemuan, dan sarana menikmati makanan dan minuman selama melakukan kunjungan di daya tarik wisata. Sejak tahun 2018, sudah tersedia fasilitas akomodasi berupa resort di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro yaitu *Villa Batikite Resort* yang dimiliki dan dikelola oleh warga negara asing dengan menyediakan fasilitas kamar, restoran, kolam renang dan fasilitas penyewaan peralatan dan perlengkapan *kitesurfing*.

Selain akomodasi berupa yang tersedia, keberadaan rumah masyarakat di sekitar kawasan juga sudah ada yang dimanfaatkan sebagai *guest house* oleh wisatawan untuk menginap atau sekedar beristirahat selama berkunjung di Tanjung Mallasoro. Gambaran kondisi eksisting dari fasilitas akomodasi di kawasan Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 15
Kondisi Eksisting Homestay di Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

Dari sisi sediaan, jumlah kamar sebagai salah satu fasilitas akomodasi di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro masih belum memadai. Demikian halnya dengan ketersediaan fasilitas makan dan minum seperti restoran, cafe dan gazebo belum tersedia. Hal ini berkontribusi terhadap minat kunjungan wisatawan ke kawasan daya tarik wisata yang sangat mempesona ini.

6. Kondisi Amenitas

Amenitas pariwisata adalah seluruh sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan wisatawan pada saat melakukan kunjungan wisata dan menikmati aktivitas wisata di daya tarik wisata. Amenitas pariwisata di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro saat ini belum tersedia. Keseluruhan aktivitas wisata *kitesurfing* yang dilakukan adalah secara alami.

Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan seperti toilet dan ruang ganti, wisatawan menggunakan fasilitas yang tersedia pada resort yang sudah ada. Keterbatasan amenities inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya minat kunjungan wisatawan ke Tanjung Mallasoro. Sebagian besar wisatawan yang beraktivitas di kawasan ini adalah wisatawan yang membeli paket wisata melalui pengelola resort.

Loket masuk kawasan hanya berupa bangunan gardu sederhana terbuat dari bambu dengan atap daun nipah/ rumbia yang dibangun oleh masyarakat untuk menarik retribusi masuk sebagai jalan utama memasuki kawasan daya tarik wisata. Amenitas lain seperti toilet, kamar ganti, ruang bilas, gazebo, dan amenities minimum lainnya belum tersedia di kawasan ini.

Tempat parkir bagi kendaraan wisatawan yang sebagian besar menggunakan kendaraan sewa terkesan tidak teratur, tidak terawat dan tidak bersih. Area parkir yang digunakan saat ini adalah pada sisi jalan masuk ke kawasan, depan rumah warga di area luar sekitar kawasan. Kondisi saat ini dapat dikatakan bahwa belum ada fasilitas area parkir bagi wisatawan.

Adapun gambaran tentang kondisi eksisting area yang dijadikan parkir kendaraan wisatawan pada Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 16
Kondisi Eksisting Area Yang Dijadikan Tempat Parkir
Pada Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Keberadaan dan ketersediaan amenities pariwisata memiliki peran yang sangat besar dalam memotivasi dan mendorong wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahan alam pantai dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan Tanjung Mallasoro karena di dalam berwisata selain pemandangan dan suasana alam yang indah, wisatawan juga membutuhkan beberapa sarana prasarana penunjang seperti *rest room* yang terawat, bersih dan ketersediaan air untuk mandi dan bilas, ketersediaan ruang ibadah, ketersediaan loket yang rapih dan terawat, menara pengawas, kapal wisata, termasuk totalitas lingkungan yang asri, bersih dan tertata rapi.

Gambaran tentang kondisi eksisting bangunan pengelola resort yang sudah beroperasi di kawasan Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 17
Kondisi Eksisting Bangunan Pengelola Resort
Di Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

B. Desain Pengembangan Daya Tarik Wisata

1. Rencana Struktur Ruang.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/ kota adalah tahapan awal sistem pengaturan pelayanan kegiatan ekonomi maupun pemerintahan kabupaten/ kota yang tersusun satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota dan memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam mengelola kehidupannya selain itu dengan adanya rencana struktur ruang juga berfungsi sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota dan sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan

ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa pemanfaatan dan penggunaan lahan adalah bagian dari kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan bagian - bagian yang diperlukan.

Kabupaten Jeneponto telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah di tahun 2012 sampai dengan 2031 yang berfungsi untuk memetakan zona-zona yang ada di Kabupaten Jeneponto untuk dapat dilihat fungsi dan kelayakan setiap daerah yang ada di sana. Pembagian zona-zona tersebut meliputi filosofi dasar pengembangan ruang yakni:

- a. Kawasan Lindung, memanfaatkan dan melestarikan kawasan lindung yang menjamin fungsi hidrologis serta sebagai pengendali pelestarian alam yang meliputi kawasan lindung, kawasan hutan lindung setempat, kawasan suatu alam, dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana.
- b. Kawasan Budi Daya, mengembangkan kawasan wisata sebagai mata pencaharian pokok penduduk jangka panjang, sekaligus pembentukan ruang wisata yang menunjang keindahan dan keseimbangan alam, pengalihan lahan-lahan yang tidak produktif pada pemanfaatan lahan yang lebih produktif.
- c. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah di Kabupaten, Dari pembagian kawasan yang ada di Kabupaten Jeneponto, Pariwisata masuk kedalam Kawasan Budi Daya dengan beberapa ketentuan yang di atur didalamnya seperti, Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tetap terjaganya alam sekitar yang ada di kawasan pariwisata serta membatasi budaya luar yang mampu masuk dengan cepat dan merusak budaya lokal yang ada, Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau agar situs budaya yang sudah ada tetap terjaga dengan baik, Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang berfungsi untuk kawasan wisata ini berfungsi untuk menjaga kawasan pariwisata agar terjaga kebersihan dan kelestariannya.

Menurut Gumelar (2010). Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam angka pembinaan masyarakat untuk menjadi sadar wisata antara lain adalah pendidikan, sosial, agama, kebudayaan, ekonomi, adat istiadat. Apabila faktor faktor tersebut sudah memadai, dalam arti dapat memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan wisata Tanjung Mallasoro, maka masyarakat

dengan sendirinya akan mudah menerima program-program pengembangan wisata pantai ini dan bahkan akan mendukung sepenuhnya.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap sikap hidup, tingkah laku, wawasan dan daya adaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi, sedangkan agama akan memberikan warna terhadap sikap dan prilaku orang yang bersangkutan, mereka akan menerima hal-hal yang positif dan menolak hal-hal yang negatif dari akses program-program pengembangan Daya Tarik Wisata atas dasar ketaatan dan pengetahuan agamanya.

Melalui kebudayaan akan mencerminkan sikap dan prilaku mewarnai kehidupan masyarakat melalui keramah-tamahan. Prilaku masyarakat yang ramah akan sangat mudah untuk menerima siapapun pendatang yang mengunjungi Daya Tarik Wisata pantai Tanjung Mallasoro. Faktor ekonomi turut menentukan pula terhadap taraf hidup masyarakat di pedesaan. Makin tinggi tingkat ekonomi di pedesaan akan semakin tinggi cara berpola hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Berikut ini akan dibahas komponen yang terkait dengan rencana pengembangan kawasan yang berhubungan dengan rencana tata ruang kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro, sebagai berikut :

a. Rencana Pemanfaatan Kawasan

Rencana pemanfaatan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro disesuaikan dengan karakteristik fisik dan sosial di kawasan tersebut, selain itu pertimbangan RTRW yang telah ditetapkan yaitu Kawasan Peruntukan Pariwisata Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro di desa Mallasoro, kecamatan Bangkala. Berdasarkan hasil survei lapangan, maka rencana tata guna untuk kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 18
Rencana Pemanfaatan Kawasan Daya Tarik Wisata
Tanjung Mallasoro



Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan Gambar rencana pemanfaatan kawasan Daya Tarik Wisata tersebut, penggunaan lahan di Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro terbagi menjadi 6 bagian rencana pengembangan. 1) Tema Daya Tarik; 2) Aksesibilitas 3) Atraksi 4) Aktivitas 5) Amenitas 6) Akomodasi, dengan rincian:

- 1) Tema Daya Tarik : Wisata Bahari
- 2) Aksesibilitas : Jalan masuk dan keluar, Transportasi darat, dan Transportasi laut
- 3) Atraksi : Panorama laut, sunset, dan kontur alam dan Pohon Rindang
- 4) Aktivitas : *Kitesurfing, Diving, Snorkeling*, berkuda, Berenang dan Berjemur
- 5) Amenitas : Toilet, Sarana ibadah, Gazebo, ATM, Parking, *Photo Spot, sport & recreation facilities*, dan Gerbang
- 6) Akomodasi : *Resort, Restoran, Cinderamata, dan Meeting Room*

Pemanfaatan Kawasan Tanjung Mallasoro dapat dikategorikan pada 3 (tiga) bagian yaitu Kawasan Investasi Bisnis, Kawasan Pemukiman dan Pendukung, serta Kawasan Investasi Berbasis Masyarakat. Pada kawasan investasi bisnis, sudah terdapat investor asing yang saat ini telah mengelola sebuah resort di kawasan Tanjung Mallasoro, sekaligus menjadi operator dalam aktivitas *kitesurfing*.

Pada kawasan pemukiman dan pendukung merupakan kawasan yang berada di sekitar Tanjung Mallasoro yaitu wilayah pemukiman masyarakat dan wilayah pertanian/ perkebunan/ tambak yang mendukung eksistensi dari zona inti Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro. Pada kawasan ini diperlukan penataan dan pengelolaan yang berkualitas sehingga mampu menjadi pemasok pada produk-produk lokal (sayuran, hasil tambak dan lainnya) untuk kegiatan pariwisata pada kawasan wisata yang akan dikembangkan.

Kawasan investasi berbasis masyarakat merupakan kawasan pengembangan utama daya tarik wisata Tanjung Mallasoro. Kawasan ini akan menjadi kawasan inti untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata yang akan dikelola langsung baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat dimana pengelolaannya harus dilakukan secara profesional untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemanfaatan kawasan ini akan berbasis pada aktivitas wisata yang akan dikembangkan yang disesuaikan dengan karakteristik dari atraksi wisata.

Gambar 19
Wilayah Pemanfaatan Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

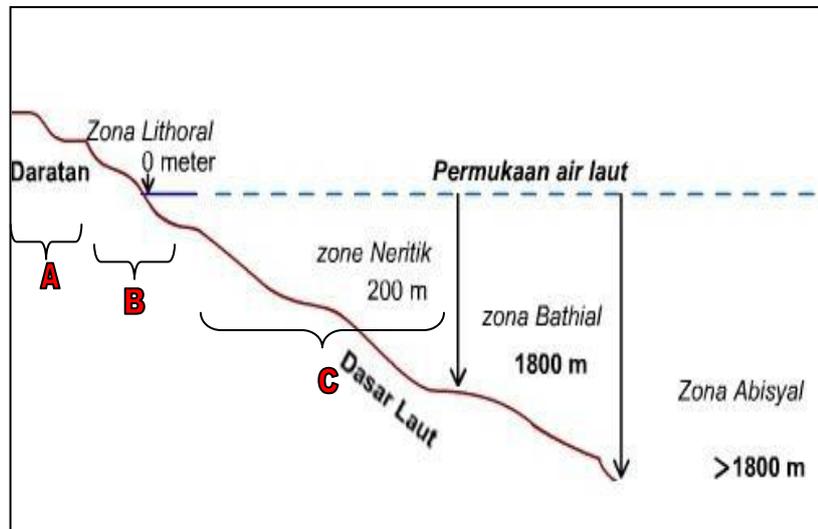
b. Rencana Ruang Pariwisata

Kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro memiliki keunikan tersendiri dibandingkan wisata di tempat lain, hal ini dikarenakan kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro yang berlokasi di desa Mallasoro kecamatan Binamu ini memiliki gabungan wisata yakni olah raga pantai, pulau, pohon rindang serta kolam permandian.

Untuk itu diperlukan strategi sistematis dalam merencanakan dan mengembangkan ruang untuk aktivitas pariwisata yang menarik dan memberikan akses yang memadai dalam kegiatan kepariwisataan dalam konteks kenyamanan dan keamanan wisatawan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dan keselerasan serta pelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat di sekitar kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro.

Berdasarkan karakteristik dari Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro maka arah pemanfaatan ruang dalam pengembangan daya tarik wisata ini bertema *Coastal Based Sports and Recreation* (Wisata Bahari). Hal ini berarti pemanfaatan kawasan akan terbagi pada 3 wilayah yaitu yang mencakup Zona Daratan (A), Zona Lithoral (B) dan Zona Neretik (C). Kombinasi potensi alam Tanjung Mallasoro akan disesuaikan dengan jenis aktivitas wisata yang dapat dikembangkan pada kawasan ini sehingga setiap zona akan dioptimalkan sesuai karakteristik dasar wilayah yang sesuai dengan peruntukan kegiatan kepariwisataan, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 20
Zona Rencana Ruang Pariwisata Tanjung Mallasoro



Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

2. Rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata

Perencanaan pengembangan kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu adalah penataan potensi kawasan yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan pasar wisatawan sehingga pengembangan kawasan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekitar kawasan pada khususnya dan kabupaten Jeneponto secara umum, sekaligus meningkatkan citra provinsi Sulawesi Selatan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Di sisi lain, pengembangan kawasan daya tarik Tanjung Mallasoro juga diharapkan dapat berfungsi dalam mengedukasi masyarakat dan wisatawan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan, sosial budaya, serta menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan pendapatan asli daerah melalui pembelanjaan wisatawan pada saat berwisata di kawasan ini.

Kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan daya tarik lainnya di kabupaten Jeneponto. Dengan kondisi topografi dan vegetasi yang dimiliki saat ini, maka orientasi pengembangannya diarahkan sebagai daya tarik wisata alam pantai untuk rekreasi keluarga dan wisata rekreasi olah raga pantai. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam perencanaan pengembangan kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro akan dilakukan melalui beberapa rencana pengembangan sebagai berikut :

a. Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata

Fasilitas wisata diartikan sebagai sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau

keunikan daya tarik wisata melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/ penginapan, restoran, dan toko cinderamata), transportasi (jalan alternatif, pedestrian dan jalan setapak), kendaraan (angkutan umum dan moda transportasi lokal) dan pemenuhan kebutuhan lainnya (mushola, tempat parkir, toilet dan *shetler*).

1) Rencana Pengembangan Aksesibilitas

a) Jalan Setapak

Prinsip perencanaan jaringan sebagai jalur pejalan kaki/ jalan setapak/ pedestrian pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah untuk :

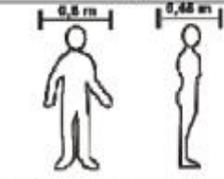
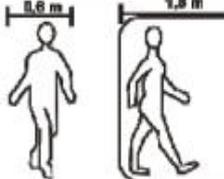
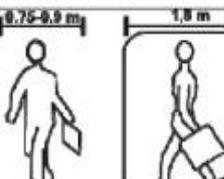
- (1) Memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin;
- (2) Menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya konektivitas dan kontinuitas;
- (3) Menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan lingkungan, aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi;
- (4) Mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik; mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak naik turun;
- (5) Memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan secara mandiri;
- (6) Mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi pejalan kaki;
- (7) Mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi;
- (8) Menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat kabupaten Jeneponto, seperti kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, serta warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan; dan
- (9) Prinsip perencanaan prasarana jalur pejalan kaki menekankan aspek kontekstual dengan kawasan yang direncanakan.

Tipe jalur pejalan kaki/ jalan setapak/ pedestrian di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah jalur pedestrian dengan penangung berupa atap dan dilengkapi dengan jalur hijau peneduh di salah satu atau kedua sisinya. Selain itu, dalam pembangunan jalur pejalan kaki juga mempertimbangkan skala dan dimensi kebutuhan ruang pejalan kaki berdasarkan dimensi tubuh manusia, yaitu :

- (1) Dimensi tubuh manusia yang lengkap berpakaian adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi panjangnya.

- (2) Kebutuhan ruang minimum pejalan kaki: 1) tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu 0,27 m² ; b) tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu 1,08 m²; dan c) membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara 1,35 m² -1,6 m² .
- (3) Ruang jalur pejalan kaki/ jalan setapak/ pedestrian berkebutuhan khusus adalah a) jalur pejalan kaki memiliki lebar minimum 1,5 m dan luas minimum 2,25 m²; b) tingkat kelandaian tidak melebihi dari 8% atau 1 banding 12 ; dan c) jalur yang landai harus memiliki pegangan tangan setidaknya untuk satu sisi

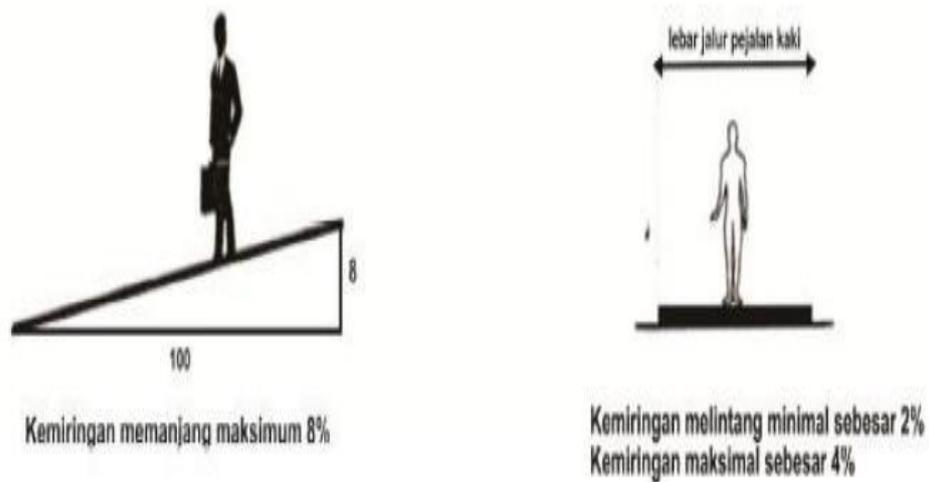
Gambar 21
Kebutuhan Gerak Minimum Pejalan Kaki

Posisi	Kebutuhan Ruang	
	Lebar	Luas
1. Diam		0,27 m ²
2. Bergerak		1,08 m ²
3. Bergerak membawa Barang		1,35 - 1,62 m ²

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Kemiringan jalur pejalan kaki pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro terdiri dari 1) kemiringan memanjang, kriterianya ditentukan berdasarkan kemampuan berjalan kaki dan tujuan desain; kemiringan maksimal sebesar 8% dan disediakan bagian yang mendatar dengan panjang minimal 1,2 meter pada setiap jarak maksimal 9 meter; 2) kemiringan melintang, kriterianya ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk drainase serta material yang digunakan pada jalur pejalan kaki; kemiringan minimal sebesar 2% dan kemiringan maksimal sebesar 4% ; dan 3) dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menyediakan kemiringan memanjang, kemiringan dimaksud digantikan dengan penyediaan anak tangga.

Gambar 22
Ilustrasi Kemiringan Jalur Pejalan Kaki

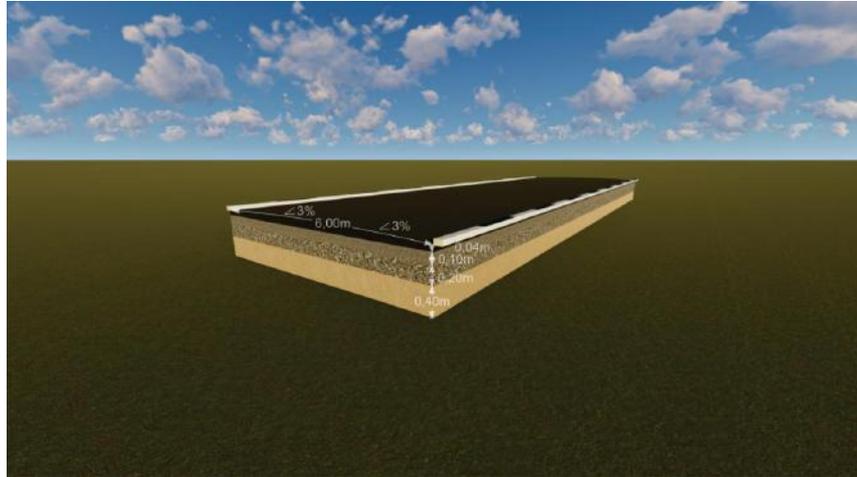


Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Sistem jaringan sirkulasi pejalan kaki pada kawasan daya tarik wisata direncanakan terintegrasi dengan perencanaan zona kegiatan wisata untuk optimalisasi akses antar fasilitas maupun akses dari dan menuju lokasi kawasan wisata; dan lokasi fasilitas berada dalam cakupan jarak pejalan kaki, yaitu antara 300 – 400 meter. Apabila jarak lebih dari 400 meter, harus diberikan jeda atau tempat istirahat pejalan kaki.

Furnitur pelengkap jalur pedestrian sebaiknya diletakkan sepanjang jalur pedestrian pada titik-titik amenitas/ fasilitas atau area istirahat yang berlokasi di setiap jarak kurang lebih 400 meter. Furnitur pelengkap jalur pedestrian terdiri dari material kerkerasan jalur pedestrian; tanaman/ vegetasi di sekitar jalur pedestrian; penangung/ penutup atap jalur pedestrian; lampu/ penerangan; sistem tata informasi umum; sistem tata informasi kawasan wisata; bangku dan tempat sampah; dan toilet umum (dapat merupakan bagian terpisah dari titik amenitas, namun berlokasi dekat serta mudah diakses).

Gambar 23
Perancangan Jalur Jalan Kawasan
Pada Kawasan Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

Warna furnitur pelengkap jalur pedestrian bersifat selaras maupun kontras dengan warna latar belakang atau warna jalur pedestrian. Material dipilih sesuai dengan potensi lokal, misalnya: semen, batu, kayu, besi, dan lain-lain; dan permukaan material harus anti slip, tidak licin, serta rata dan datar.

Tanaman/ vegetasi di sekitar jalur pedestrian dengan tipe tanaman yang digunakan dalam perancangan jalur pedestrian adalah 1) Pohon besar yang rimbun dan berfungsi sebagai pengarah untuk digunakan dalam perancangan jalur pedestrian tanpa penutup atau pergola; 2) Tanaman rambat digunakan dalam perancangan jalur pedestrian dengan penutup pergola; dan 3) Perdu/ *shrubs*, rumput dan penutup tanah/ *ground cover* digunakan dalam perancangan jalur pedestrian secara umum.

Tipe tanaman dipilih bervariasi dengan urutan penanaman/ layer dari batas tepi jalur pedestrian: rumput atau *ground cover* – perdu atau *shrubs* – pohon besar; dan tanaman dipilih jenis natif atau sesuai dengan kondisi ekosistem kabupaten Jeneponto..

Atap (penaung) jalur pejalan kaki/ jalan setapak/ pedestrian adalah 1) sebagai jalur pedestrian, penaung berfungsi menghubungkan antar fasilitas atau area aktivitas di dalam taman. Gazebo, berfungsi sebagai area berkumpul untuk beraktivitas maupun beristirahat. Pada kedua fungsi tersebut, penaung bersifat memberikan perlindungan pada pengunjung dari sinar matahari langsung, tanpa menghalangi lewatnya angin sepoi atau cahaya matahari yang tidak terlalu terik; dan 2) selain bersifat fungsional, desain penaung juga memperhatikan faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur

budaya setempat atau transformasi dari arsitektur lokal. Dalam kaitannya dengan taman dan fasilitas lain di dalamnya, desain pencahayaan harus selaras dengan konsep perencanaan taman secara keseluruhan, dan secara khusus misalnya selaras dengan desain gazebo atau elemen taman lainnya.

Gambar 24
Contoh Ilustrasi Pencahayaan Pada Jalur Pedestrian

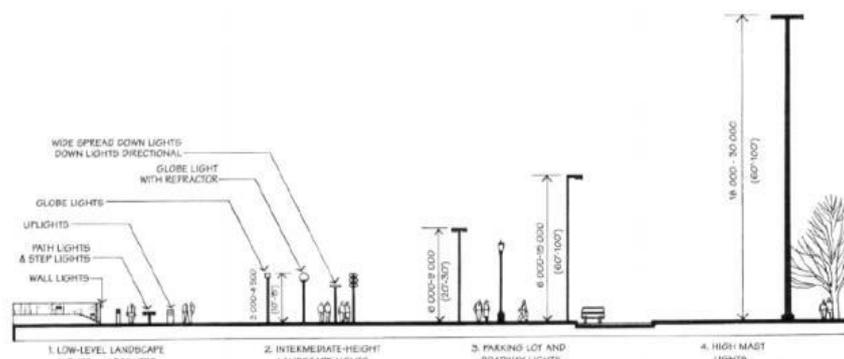


Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Untuk lampu atau penerangan jalan merupakan fitur elemen pelengkap jalur pedestrian yang berkaitan erat dengan aspek keamanan, khususnya pada malam hari. Berikut tujuan pemasangan lampu taman antara lain:

- (1) Memberikan rasa aman bagi para pengguna jalur pedestrian, serta mengurangi potensi kerusakan atau kerugian properti
- (2) Meningkatkan kejelasan visual; dan
- (3) Meningkatkan potensi penggunaan fitur-fitur jalur pedestrian yang menonjol, khususnya di malam hari, yang membutuhkan suatu intensitas cahaya tertentu.

Gambar 25
Contoh Ilustrasi Diagramatis Sistem Penerangan Ruang Luar Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



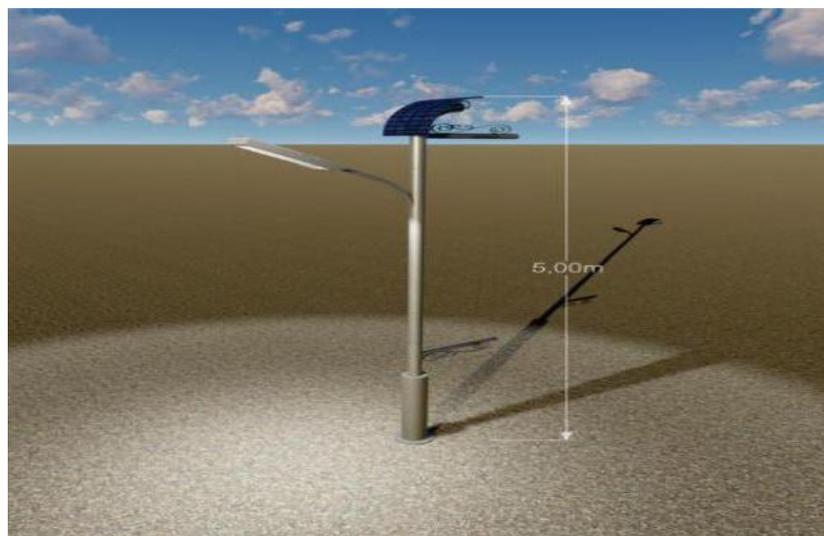
Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Sehubungan dengan pertimbangan terhadap faktor keamanan, pencahayaan yang dipilih untuk penerangan jalur pedestrian pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah jenis pencahayaan yang bersifat terang dengan warna cahaya lampu putih. Beberapa hal yang menjadi standar umum lampu jalan pada jalur jalan pedestrian adalah:

- (1) Lampu/ penerangan dipasang terintegrasi dengan elemen lainnya yang berbentuk tiang, seperti tiang penabung, dengan menyesuaikan tingginya;
- (2) Tiang lampu/ penerangan yang berdiri sendiri diletakkan dengan jarak minimum 6 – 7 meter antar lampu;
- (3) Lampu/ penerangan dipasang pada ketinggian bervariasi sesuai dengan fungsinya, yaitu : a) ketinggian tiang di bawah 1,8 meter untuk penerangan rendah; b) ketinggian tiang 3–4,5 meter penerangan menengah, umumnya digunakan untuk penerangan sepanjang jalur pedestrian; c) ketinggian tiang antara 6 – 15 meter digunakan untuk penerangan area parkir, area rekreasi dan jalan raya; dan d) ketinggian tiang antara 18 – 30 meter untuk penerangan tinggi, digunakan untuk penerangan area parkir, area rekreasi dan jalan bebas hambatan.

Adapun rencana pengembangan penerangan jalan pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 26
Desain Lampu Penerangan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

b) Dermaga Wisata

Dermaga di sebuah kawasan pariwisata mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke kawasan pariwisata maupun pergerakan di dalam kawasan pariwisata. Dalam membangun dermaga di kawasan pariwisata perlu memperhatikan prinsip dan kaidah sebagai berikut:

- (1) Desain dalam perencanaan pembangunan dermaga di kawasan wisata dilakukan untuk:
 - (a) Pemenuhan aspek fungsional yaitu dermaga adalah fasilitas yang dibangun untuk keperluan kelancaran berbagai aktivitas penyeberangan. Di kawasan pariwisata, dermaga berfungsi untuk memudahkan wisatawan menjangkau atraksi wisata dan sebagai fasilitas pendukung aktivitas masyarakat. Untuk memenuhi aspek fungsional tersebut, pembangunan dermaga harus memenuhi persyaratan dari rancangan dermaga di kawasan pariwisata, baik dari segi dimensi, struktur maupun tata letak;
 - (b) Pemenuhan nilai estetika, yaitu dermaga kiranya juga memiliki nilai estetika. Nilai estetika mampu menyenangkan secara visual yang pada akhirnya menghasilkan apresiasi yang baik. Wujud estetika akan tampak pada keharmonian yang teraplikasikan dalam pembuatan desain dermaga. Nilai estetika tidak terlepas dari budaya yang berkembang di kawasan tersebut. Oleh karena itu desain dermaga di kawasan pariwisata kiranya memperhatikan nilai budaya masyarakat sehingga unsur estetika dapat dinikmati oleh wisatawan yang datang.
 - (c) Pemenuhan prinsip ekonomis, yaitu pembangunan dermaga di kawasan pariwisata seyogyanya mampu memenuhi prinsip ekonomis yaitu dikonstruksikan dengan cara yang mudah, kuat dan biaya yang efisien.
 - (d) Terpenuhinya persyaratan kelestarian lingkungan, yaitu dalam perencanaan pembangunan dermaga sebagai bagian dari pelabuhan, dokumen tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dipersiapkan.
 - (e) Terpenuhinya prosedur keselamatan dan keamanan, maka rancangan dermaga di kawasan pariwisata harus memperhatikan : dimensi dermaga yang ditentukan oleh jenis, ukuran dan jumlah kapal yang menggunakannya; daerah perairan di sekelilingnya harus tenang, dan tidak mudah mengalami pendangkalan; ditempatkan pada daerah yang tidak terhalang angin pada saat kapal memasuki atau meninggalkan dermaga; ditempatkan pada daerah yang memungkinkan kapal dapat beroperasi dengan

lancar; lokasi dermaga harus berada dalam koordinasi dengan rencana pemanfaatan lahan untuk area-area di sekelilingnya; dermaga harus ditempatkan pada area dengan akses lalu lintas darat dan fasilitas penyimpanan yang baik; dermaga harus dikonstruksikan dengan cara yang mudah, kuat dan biaya yang efisien; dan lokasi dermaga harus memungkinkan untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut.

Pembangunan dermaga termasuk ke dalam pembangunan pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dijalankan untuk menunjang kegiatan yang bersifat khusus dan pada umumnya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kriteria desain struktur dermaga berdasarkan lingkungan yang telah ditentukan yaitu: 1) Kondisi alam, yang digunakan dalam perencanaan terdiri dari : pasang surut, arus perairan, angin, kondisi geologi/ tanah, tinggi gelombang rencana; 2) Tinjauan karakteristik kapal; 3) Tinjauan dimensi dermaga yang ditentukan berdasarkan panjang dan lebar dermaga, kedalaman kolam pelabuhan dan luas daerah pendukung operasinya. Semua ukuran ini menentukan kemampuan pelabuhan dalam penanganan kapal. Ukuran dan bentuk konstruksi menentukan pula besar investasi yang diperlukan, sehingga penentuan yang tepat akan membantu operasi pelabuhan yang efisien.

Untuk dermaga di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro direncanakan berfungsi sebagai dermaga hub bagi wisatawan yang akan datang menggunakan kapal/ perahu wisata termasuk menghubungkan beberapa daya tarik wisata sekitar seperti Pantai Tamarunang, Birtaria Kassi, dan Pulau Harapan serta wisatawan dari kotan Makassar dari akses laut sebagai salah satu pintu utama wisatawan ke kabupaten Jeneponto.

Dermaga jenis *jetty* tergolong sesuai dalam mendukung aktivitas wisata di kawasan tersebut. Dermaga merupakan batas muka antara daratan dan perairan dimana kapal dapat bertambat, untuk tipe *jetty* dibangun cukup jauh menjorok ke arah laut dengan maksud agar ujung dermaga berada pada kedalaman yang cukup bagi kapal besar untuk merapat.

Saat ini di sekitar kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro sudah terdapat dermaga penyeberangan masyarakat ke Pulau Harapan (Libukang), dan untuk kepentingan pariwisata maka perlu untuk mengembangkan dermaga khusus pariwisata sehingga dapat menambah minat berkunjung dan beraktivitas wisatawan dengan aman dan nyaman. Penambahan struktur dermaga tipe *jetty* untuk mendukung kegiatan wisata adalah :

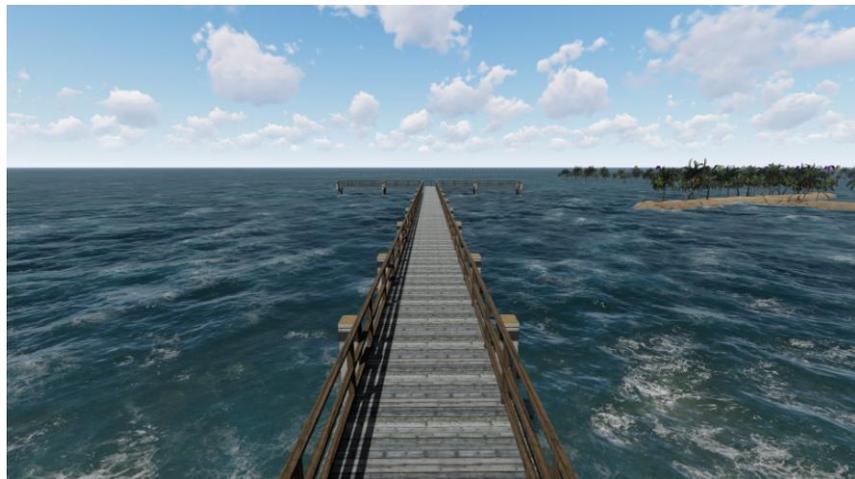
- 1) Fasilitas bersandar (*berthing*), pada waktu kapal merapat ke dermaga masih memiliki kecepatan sehingga akan terjadi benturan antar kapal dan dermaga. Untuk itu maka

disepanjang dermaga diberi bantalan yang berfungsi untuk menyerap energi benturan, bantalan ini disebut *fender*.

- 2) Fasilitas penambat (*mooring*), kapal yang merapat ke dermaga akan ditambatkan dengan menggunakan tali ke alat penambat untuk menahan gerakan kapal yang disebabkan oleh angin, arus dan gelombang. Alat penambat yang akan digunakan pada dermaga ini adalah pelampung penambat/ *mooring buoy*.

Rencana Tanjung Mallasoro pengembangan dermaga wisata pada kawasan daya tarik wisata Kassi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 27
Ilustrasi Pengembangan Dermaga Wisata
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

2) Rencana Pengembangan Atraksi

a) Panggung Pertunjukan

Panggung kesenian/ pertunjukan adalah bentuk dari tempat berkumpul yang di dalamnya tersedia tempat duduk dengan kapasitas besar serta area panggung untuk pertunjukan dan hiburan untuk pengunjung. Panggung kesenian dapat digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan yang berbasis budaya masyarakat atau kesenian tradisonal.

Selain itu pembangunan panggung kesenian diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro sebagai upaya peningkatan pengalaman wisata, lama tinggal serta distribusi wisatawan. Faktor-faktor yang diperhitungkan serta diperhatikan dalam pembangunan panggung kesenian/ pertunjukan antara lain: ukuran; orientasi; akustik; *stage/* panggung; tempat duduk; dan pencahayaan/ *lighting*.

Theater dibuat menyesuaikan keterbatasan penglihatan penonton dan menyediakan ruang yang cukup untuk menampung penonton dalam jumlah yang banyak. Auditorium dari sebuah panggung kesenian/ pertunjukan berbentuk semi lingkaran dengan

sudut 180 (seratus delapan puluh) derajat (gaya Romawi) dan sudut 220 (dua ratus dua puluh) derajat untuk panggung kesenian/pertunjukan (gaya Yunani). Bentuk tersebut dibuat agar secara visibilitas, penonton dapat melihat dengan baik panggung yang di letakkan di bagian tengah.

Selain dari segi bentuk, ukuran panggung kesenian/pertunjukan di hitung sesuai batas penglihatan serta pendengaran yang dimiliki oleh manusia, hal tersebut dilakukan agar penonton yang mengunjungi panggung kesenian/ pertunjukan dapat menikmati pertunjukan dengan nyaman. Panggung merupakan pusat dari aktivitas yang terdapat di panggung kesenian/ pertunjukan. Dalam membuat sebuah *stage/* panggung, hal yang diperhatikan adalah aspek penyampaian bunyi kepada penonton.

Pedoman ukuran panggung kesenian/ pertunjukan yang digunakan dalam perencanaan kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah:

- 1) Batas maksimum terjauh agar penonton tetap bisa mendengar dengan baik adalah 65,62 ft atau sekitar 20,5 meter; dan
- 2) lebar minimum tempat duduk yang dibutuhkan untuk satu orang adalah 1,5 ft atau sekitar 55 cm .

Aspek visibilitas atau kemudahan melihat obyek dipertimbangkan dalam membuat panggung kesenian/ pertunjukan. Pembangunan tempat duduk panggung kesenian/ pertunjukan adalah dengan berbentuk cekung. Beberapa pilihan bahan yang digunakan untuk membuat tempat duduk, antara lain: kayu, besi, batu, dan kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Pembuatan tempat duduk memperhatikan bahan yang digunakan dan drainasenya, karena hal tersebut sangat penting untuk kenyamanan penonton.

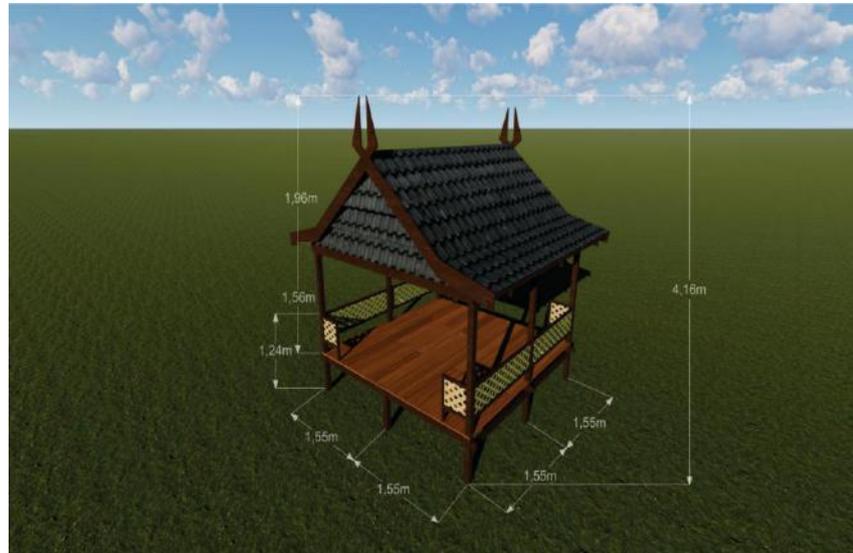
b) **Landscape**

Penataan *landscape* daya tarik wisata Tanjung Mallasoro terdiri dari pembuatan pergola dan gazebo, pembuatan pagar pembatas dan pemasangan lampu taman. Pergola adalah pelengkap taman yang membentuk peneduh pada jalur pedestrian, area duduk atau area berkumpul (gazebo).

Pergola berupa deretan tiang/ kolom/ pilar yang umumnya menopang balok-balok melintang di atasnya yang dilengkapi dengan sejenis penutup atau penaung yang bersifat transparan, dan sering diberi tanaman merambat. Sebagai jalur pedestrian, pergola berfungsi menghubungkan antar fasilitas atau area aktivitas di dalam taman.

Sebagai gazebo, pergola berfungsi sebagai area berkumpul untuk beraktivitas maupun beristirahat. Pada kedua fungsi tersebut, pergola bersifat memberikan perlindungan pada pengunjung dari sinar matahari langsung. Rencana pengembangan gazebo untuk aktivitas beristirahat pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

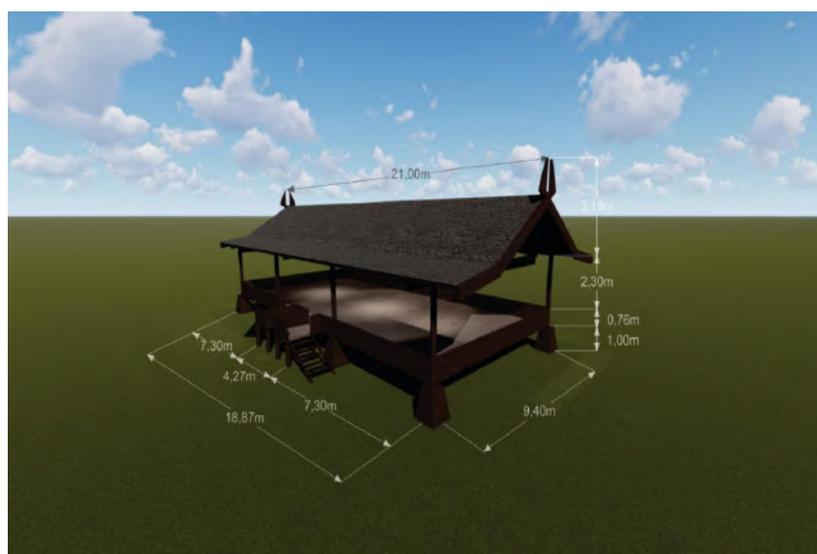
Gambar 28
Rancangan Gazebo Kecil
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Rancangan pembuatan gazebo besar yang sekaligus dapat berfungsi sebagai area makan dan minum wisatawan pada kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 29
Rancangan Gazebo Besar
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Selain bersifat fungsional, desain pergola pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro memperhatikan faktor estetika, yaitu

sesuai dengan arsitektur budaya dan kearifan lokal kabupaten Jeneponto. Dalam kaitannya dengan taman dan fasilitas lainnya, desain pergola dibuat selaras dengan konsep perencanaan taman kawasan Tanjung Mallasoro secara keseluruhan, dan selaras dengan desain gazebo atau elemen taman lainnya.

Rancangan pembuatan Pergola pada kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 30
Rancangan Pergola
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

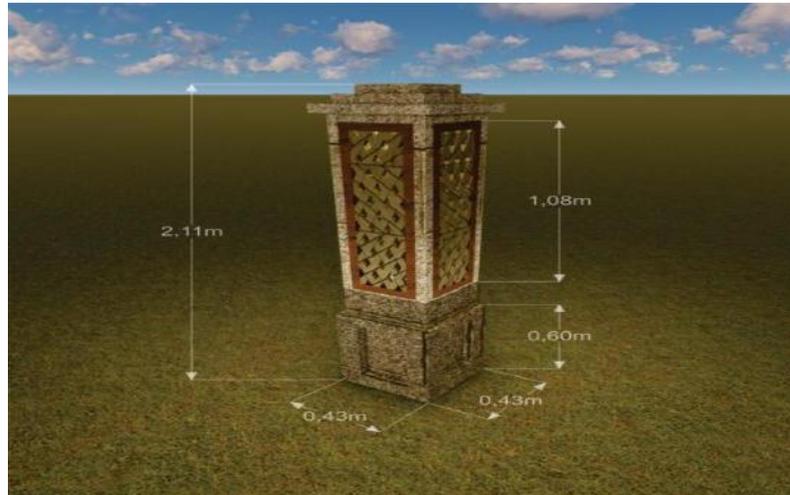
Untuk menambah keindahan dan daya tarik Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro dilengkapi dengan lampu taman. Lampu atau penerangan merupakan elemen pelengkap taman yang terkait dengan penciptaan suasana. Terkait dengan syarat penerangan, maka untuk tujuan tersebut jenis pencahayaan yang dipilih untuk penerangan taman dan area sekitarnya pada daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah pencahayaan untuk memberikan kesan hangat dan nyaman, yaitu dengan pemilihan lampu berwarna *orange*/jingga.

Pengecualian pada beberapa titik utama yang membutuhkan tingkat keamanan lebih tinggi sehingga menggunakan lampu dengan cahaya berwarna putih. Terkait syarat teknis tiang lampu, beberapa hal yang menjadi standar umum adalah, sebagai berikut:

- 1) Lampu/ penerangan di dalam gazebo dapat dipasang terintegrasi dengan tiang-tiang penyangga gazebo.
- 2) Tiang lampu/penerangan area luar sekitar gazebo (taman) diletakkan pada jarak minimum 0,8 – 1 meter dari batas tepi gazebo.
- 3) Lampu/penerangan dalam gazebo disesuaikan tingginya dengan ketinggian tiang penyangga gazebo.
- 4) Lampu/ penerangan area luar sekitar gazebo dipasang pada ketinggian 7 meter.

Rancangan pembuatan lampu taman pada kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 31
Desain Lampu Taman Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

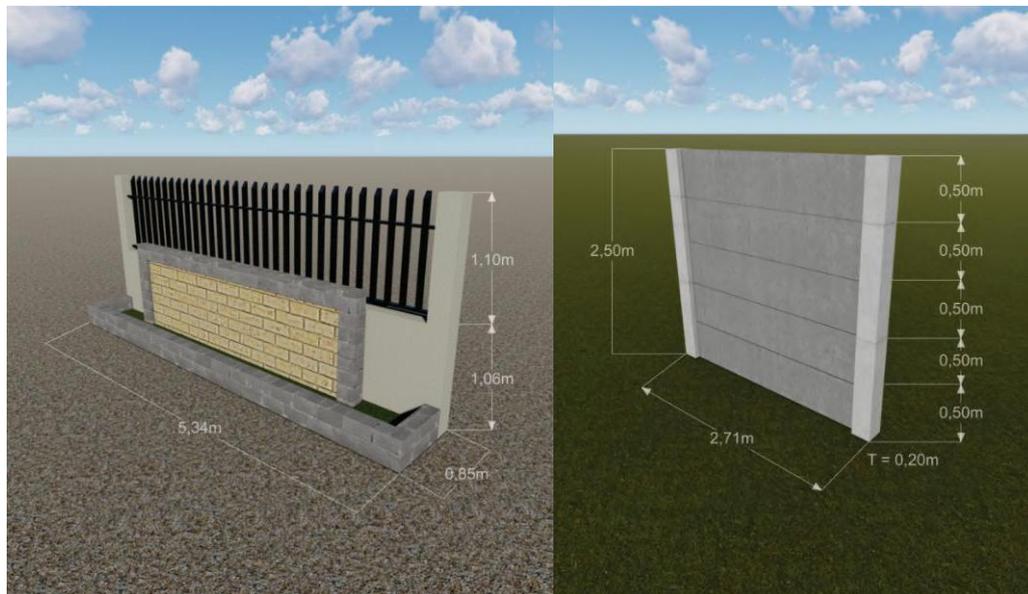
Untuk pertimbangan keamanan dan keselamatan pengunjung termasuk asset daya tarik wisata Tanjung Mallasoro, maka rencana pengembangannya dilengkapi dengan pagar pembatas. Tujuan pembuatan pagar pembatas dalam kawasan wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai pemisahan zona aktivitas dengan zona tingkat intensitas yang berbeda. Pembuatan pagar pembatas taman bertujuan untuk mengarahkan sirkulasi dan pergerakan pengunjung mengikuti pola tertentu, seperti misalnya menghindari area berbahaya atau mengarahkan pada beragam titik-titik atraksi wisata dalam satu putaran.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka desain pembatas taman mengacu pada persyaratan fungsional maupun kualitas estetika dari lingkungan di sekelilingnya. Secara prinsip pagar pembatas taman merupakan pembatas bangunan sehingga desainnya harus jelas dan memperhatikan faktor keamanan dari lingkungan sekitarnya. Selain bersifat fungsional, desain pagar juga harus memperhatikan faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya setempat atau kearifan lokal kabupaten Jeneponto.

Pemilihan material disesuaikan dengan potensi lokal, misalnya: kayu, batu bata, batu, besi, dan lain-lain. Pagar juga ditanami tanaman rambat agar memberikan kenyamanan pengunjung. Untuk memberikan kesan menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, desain pagar pada beberapa bagian kawasan dibuat berbentuk deretan pohon, perdu atau semak tanpa pemasangan suatu batas dengan material yang bersifat masif. Ketinggian pagar pembatas yang bersifat masif adalah maksimum 1,2 meter. Hal ini untuk menghindari kesan tertutup dan terpisah pada taman tersebut.

Rancangan pembuatan pagar pada kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 32
Desain Pagar Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

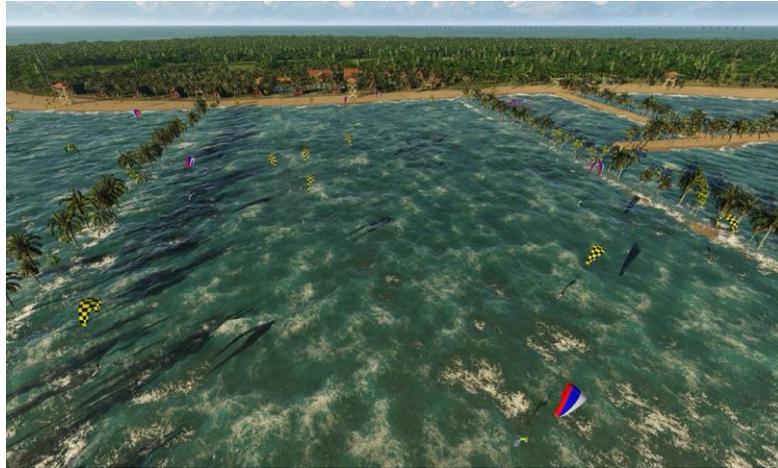
3) Rencana Pengembangan Aktivitas

Sejalan dengan rencana pengembangan berbagai fasilitas atraksi wisata dan amenities pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro maka akan mempengaruhi aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan pada saat berkunjung, seperti *kitesurfing*, *camping*, *outbound*, *meeting*, berenang di pantai, laut atau kolam renang, serta bermain pada taman dan area permainan.

a) *Kitesurfing*

Aktivitas *Kitesurfing* adalah aktivitas utama di pantai Tanjung Mallasoro tersebut. Kawasan yang digunakan adalah pantai yang memiliki angin yang baik untuk olah raga tersebut dan pantainya cenderung dangkal. Tanjung Mallasoro memiliki lahan yang cukup luas untuk olah raga jenis ini. Akan tetapi lahan tersebut dapat di bagi menjadi beberapa bagian untuk penggunaan aktivitas yang lain. Kawasan peruntukan aktivitas untuk *Kitesurfing* direncanakan pada areal lahan seluas 1 hektar mulai dari bibir pantai. Hal ini dilakukan mengingat seringnya terjadi gesekan antara aktivitas *Kitesurfer* dengan petani rumput laut yang ada di Tanjung Mallasoro. Berikut adalah ilustrasi pemanfaatan lahan untuk aktivitas *Wind Surfing* di kawasan pantai Tanjung Mallasoro.

Gambar 33
Ilustrasi Pengembangan Aktivitas Kitesurfing
Di Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

b) **Wingsurfing**

Untuk olah raga ini terbilang baru akan diterapkan atau dipromosikan di Tanjung Mallasoro. *Wingsurfing* merupakan olah raga yang juga memiliki ketenaran yang tidak kalah dengan *Kitesurfing*. Olah raga ini juga memanfaatkan angin dan kondisi gelombang laut yang mendukung. *Wing Surfing* juga harus memiliki lahan tersendiri di pantai Tanjung Malasoro. Hal ini penting dikarenakan jika lokasi *Kitesurfing* dan *Wingsurfing* disatukan akan menimbulkan bahaya dari para pemain tersebut. Maka dari itu untuk lokasi dari *Wingsurfing* direncanakan berdampingan dengan *Kitesurfing* akan tetapi di batasi oleh *Wave Breaker* yang di tanami pepohonan dan luas lahan untuk *Wingsurfing* akan dikoneksikan dengan aktivitas yang ada di pulau Harapan. Berikut ini adalah ilustrasi dari kegiatan *Wing Surfing* yang akan dikembangkan di Kawasan Tanjung Mallasoro.

Gambar 34
Ilustrasi Aktivitas Wingsurfing



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

c) **Windsurfing**

Windsurfing juga merupakan jenis olah raga perairan yang cocok untuk dilakukan di Tanjung Mallasoro. Olah raga ini juga sangat populrr di kalangan pecinta *surfing* dunia. Aktivitas ini ini akan dikoneksikan dengan aktivitas wisata di pulau Harapan, dikarenakan konteks ombak dan angin yang ada di Tanjung Mallasoro dan Pulau Harapan cenderung sama. Lahan untuk *Windsurfing* pun tidak terbatas oleh *Wave Breaker* akan tetapi harus jauh dari lahan budi daya rumput laut masyarakat.

Gambar 35

Ilustrasi Aktivitas Wind Srufling di Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

d) **Canoeing**

Aktivitas *Canoeing* adalah aktivitas yang juga dapat dikembangkan di Kawasan Tanjung Mallasoro. Aktivitas ini mampu mendatangkan wisatawan baik aktivitas *canoeing* untuk rekreasi maupun aktivitas *canoeing* untuk olahraga. Aktivitas ini direncanakan dikembangkan dengan memanfaatkan sebagian wilayah zona *lithoral* pada Tanjung Mallasoro namun perlu pembatasan jalur sehingga tidak mengganggu aktivitas wisata utama dari Tanjung Mallasoro. Adapun ilustrasi aktivitas *canoeing* untuk rekreasi dapat dilihat pada gambar seperti berikut ini:

Gambar 36
Ilustrasi Aktivitas Canoeing di Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

e) **Snorkeling dan Diving**

Aktivitas *Snorkling* dan *Diving* adalah aktivitas selanjutnya yang bisa dikembangkan di Tanjung Mallasoro. Aktivitas ini memerlukan persiapan dan pengelolaan yang baik. Pengelola harus menyiapkan instruktur untuk memberikan pelatihan bagi pengunjung/ wisatawan yang akan melakukan aktivitas ini. Instruktur bisa berasal dari ahli dari luar yang bersertifikat atau masyarakat yang diberikan pelatihan mengenai tehnik *snorkeling* dan *Diving* yang baik hingga mendapatkan sertifikat. Selain itu pengelola harus mempersiapkan peralatan-peralatan penunjang *snorkeling* dan *Diving* seperti alat selam dan tabung selam. Area untuk *Snorkeling* dan *Diving* berada di 1 Km dari bibir pantai dan dikoneksikan dengan pulau Harapan khususnya untuk kegiatan *diving* yang potensi *diving spot* berada pada kawasan tersebut..

Gambar 37
Ilustrasi Aktivitas Snorkeling dan Diving di Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

f) **Berkuda**

Aktivitas lain yang dapat dilakukan pada daya tarik ini adalah berkuda di pinggir Tanjung Mallasoro. Aktivitas ini mampu

memberdayakan masyarakat sekitar pantai maupun desa Bungung Pandang. Masyarakat yang memiliki kuda dapat memanfaatkan aktivitas tersebut untuk tambahan pemasukan. Terlebih lagi kuda merupakan binatang khas yang banyak di temukan dan merupakan simbol bagi kabupaten Jeneponto. Aktivitas berkuda ini direncanakan dikembangkan di sepanjang bibir pantai Tanjung Mallasoro.

Gambar 38
Ilustrasi Aktivitas berkuda di Tanjung Mallasoro.



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

g) Rekreasi dan Olah Raga Pantai

Aktivitas rekreasi dan olah raga pantai yang akan dikembangkan di kawasan ini dan dapat menambah kepuasan wisatawan antara lain sebagai berikut :

- 1) Berenang (*Swimming*) di sekitar laut dan pantai sepanjang kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro;
- 2) Berjemur (*Sunbathing*) di atas pasir atau pada kursi jemur sepanjang pantai;
- 3) Berjalan (*Beach Walking*) di sepanjang pantai;
- 4) Aktivitas pantai dan laut lainnya yang diminati wisatawan dalam batas toleransi keamanan dan keselamatan diri pribadi dan pengunjung serta tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

h) Berkemah (*Camping*)

Kegiatan berkemah (*camping*) pada alam terbuka dalam suasana nyaman dan aman merupakan trend baru di kalangan wisatawan milenial. Untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan tersebut, pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro juga direncanakan untuk mengembangkan fasilitas *camping ground* dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan yang ada.

Selain memanfaatkan wilayah daratan sekitar pantai yang ada di Tanjung Mallasoro, pada area yang banyak ditumbuhi pohon

kelapa akan dijadikan sebagai tempat *camping*. Aktivitas ini direncanakan memanfaatkan area seluas satu hektar. Dalam pengembangannya, area *camping* ini akan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu area *Glamour Camping (glamping)*, dimana dibuat beberapa tenda yang ukurannya cukup besar dan kokoh, dimana pada setiap tenda dilengkapi dengan fasilitas layaknya hotel berbintang dan dapat mengakses jaringan internet.

Gambar 39
Ilustrasi Aktivitas Glamping di Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

Pada sebagian area lainnya digunakan untuk *natural camping*, dimana konsep ini lebih alami dan tidak difasilitasi oleh kelengkapan seperti *glamour camping*. Pada *natural camping*, hanya tersedia tenda-tenda biasa sambil menikmati suasana alam yang berdekatan dengan pantai. Ini cocok untuk pengunjung yang datang untuk menikmati alam seadanya tanpa ada gangguan teknologi.

Gambar 40
Ilustrasi Aktivitas Natural Camping di Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

i) *Tracking, ATV Riding dan Edukasi*

Hal yang tak kalah pentingnya adalah konsep edukasi juga bisa diterapkan di sekitar Daya Wisata Tanjung Mallasoro. Fasilitas yang dibangun bisa dijadikan fungsi ganda bagi wisatawan untuk kegiatan edukasi mengenai budaya khas dan kreasi unik dari masyarakat sekitar yang ada di kabupaten Jeneponto, seperti

contoh edukasi pembuatan *nata de palmae*, Tahu Nagarin, aktivitas belajar menulis aksara Lontara' Bahasa Makassar dengan menggunakan daun lontara. Selain itu area pendukung (pertanian, perkebunan dan pertambakan) dan pemukiman dapat dijadikan area *tracking*. Pada beberapa wilayah pendukung juga dapat dikembangkan aktivitas *ATV offroad* bagi pengunjung pantai.

Gambar 41

Ilustrasi Aktivitas Pendukung Lainnya di Kawasan Tanjung Mallasoro



Sumber: *Olahan Data Penelitian, 2019*

j) Seni Pertunjukan

Ketersediaan fasilitas panggung pertunjukan diharapkan dapat menjadi pemicu pelestarian seni budaya tradisional masyarakat Jeneponto yang berpotensi semakin tergerus oleh perkembangan dan arus global. Untuk itu, pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro direncanakan untuk dilakukan berbagai jenis pertunjukan tradisional sehingga apresiasi masyarakat khususnya generasi muda terhadap kebudayaannya dapat terus tumbuh, bertahan dan lestari sebagai bagian dari jati diri masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Kegiatan seni pertunjukan direncanakan dilakukan pada areal panggung pertunjukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati seni dan budaya tradisional, sanggar seni, serta praktisi dan profesional seni pertunjukan sehingga dapat melahirkan kualitas pertunjukan yang menarik dan menghasilkan bagi masyarakat, termasuk didalamnya seni pertunjukan modern.

k) *Outbound* dan Bermain Keluarga (*Play Ground*)

Kegiatan *outbound* merupakan salah satu aktivitas rutin yang terus berkembang dan menjadi pasar baru yang potensial untuk dilakukan di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro. Kegiatan ini secara reguler dan berkelanjutan dilakukan oleh berbagai

instansi baik pemerintah maupun swasta dan asosiasi industri serta profesi.

Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan jumlah peserta yang bervariasi antara 50 hingga 100 orang dan membutuhkan area terbuka yang cukup memadai dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang cenderung bersifat hiburan bertujuan meningkatkan kekerabatan dan kerjasama tim (*team building*). Kegiatan *outbound* ini biasanya juga dirangkaikan dengan kegiatan pertemuan (*meeting*) sehingga sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan kawasan daya tarik wisata.

l) Kegiatan Pertemuan (*Meeting*)

Kegiatan pertemuan di luar kantor merupakan aktivitas instansi pemerintah dan perusahaan yang semakin sering dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini merupakan strategi instansi pemerintah dan perusahaan yang memiliki fasilitas terbatas di tempat mereka sekaligus biasanya dirangkaikan dengan kegiatan lain seperti *outbound* sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap produktivitas dan efisiensi instansi dan perusahaan tersebut.

Untuk dapat menangkap potensi pasar tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro, maka pada kawasan ini direncanakan untuk mengembangkan fasilitas meeting sebagai bagian terintegrasi dengan kegiatan *outbound* yang akan ditempatkan pada area sekitar *Camping ground*.

m) Berenang

Kegiatan berenang merupakan aktivitas yang paling banyak dinikmati oleh wisatawan dari berbagai kalangan, kelompok sosial, kelompok usia dan tanpa mengenal waktu. Kegiatan berenang pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro menjadi variatif karena wisatawan dapat memilih untuk berenang di laut, pantai, atau di kolam renang air tawar yang disiapkan dalam kawasan.

Kolam renang yang direncanakan untuk dikembangkan pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah kolam renang rekreasi untuk hiburan dan kesehatan dengan ukuran untuk anak-anak dan dewasa, dan bukan untuk tujuan kolam renang prestasi. Keberadaan kolam renang pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro direncanakan dibangun pada area *privat resort & cottage* yang diperuntukkan bagi wisatawan yang menginap di *resort* dan *cottage*.

n) Kegiatan Berfoto

Kegiatan berfoto bagi masyarakat millennial saat ini merupakan salah satu aktivitas wajib, baik oleh para profesional *photographer* maupun yang sekedar hobby apalagi saat berada di kawasan daya tarik wisata. Hal ini sudah menjadi bagian dari

budaya baru masyarakat modern dalam eksistensi diri dan mendukung aktivitas pada aktualisasi diri di berbagai sosial media yang dimiliki.

Untuk itu, dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro juga direncanakan dikembangkan area photo spot yang unik dan menarik sebagai ikon *Kitesurfing* Tanjung Mallasoro. Hal ini penting dalam menarik minat kunjungan wisatawan, sekaligus menjadi media promosi yang bermanfaat bagi kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dan kabupaten Jeneponto.

Area photo spot yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan untuk ber swafoto (*selfie*) atau berfoto bersama teman atau keluarga (*wefie*) adalah pada areal yang secara umum tersedia seperti *landscape* taman, dermaga, *camping ground*, *resort and cottage*, gazebo, pinggir pantai, fasilitas yang tersedia ataupun obyek-obyek foto yang akan dibangun secara khusus seperti menara pandang/ foto.

4) **Rencana Pengembangan Akomodasi**

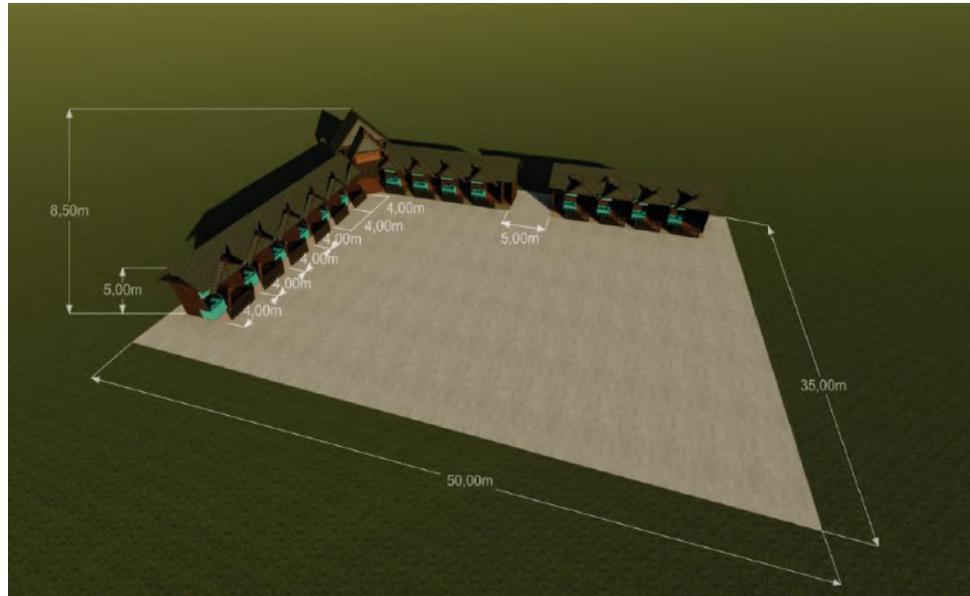
a) **Pusat Kuliner**

Pusat jajanan atau plaza kuliner merupakan fasilitas dimana terdapat kegiatan layanan jual beli makanan dan minuman. Satuan dimensi ruang per pengunjung untuk kegiatan makan minum adalah 2 m² per orang termasuk kursi meja dan sirkulasi pengunjung.

Lokasi plaza pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro ditempatkan pada area yang mudah diakses dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas serta tidak menimbulkan tekanan atau dampak negatif terhadap lingkungan. Selain hal tersebut, pusat jajan/ kuliner juga dirancang memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan, pintu masuk dan keluar sesuai standar; dan petunjuk arah dan papan nama plaza pusat jajanan/ kuliner dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat.

Kriteria dasar pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah untuk konsumsi masyarakat umum; menampilkan kuliner tradisional yang sudah diseleksi; dan minimum 5 (lima) jenis kuliner, maksimum 20 (dua puluh) jenis kuliner dan tidak boleh ada duplikasi sehingga menghindari persaingan tidak sehat.

Gambar 42
Rencana Pengembangan Pusat Jajanan/ Kuliner
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Infrastruktur untuk mendukung aktivitas pada pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah ketersediaan *loading dock* dan area bongkar muatan (bahan makanan bersih); jalur truk sampah yang tidak boleh digabung dengan jalur bongkar muatan (bahan makanan bersih) agar tidak terkontaminasi bakteri; sumber air bersih panas dan dingin; drainase atau saluran pembuangan air lengkap dengan proses pemeliharaan sebelum dibuang ke saluran kota; drainase/ saluran air hujan dan resapannya harus diperhatikan dengan baik untuk menghindari genangan air di halaman bangunan; dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Bangunan pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dirancang dengan ketentuan tiap gerai dengan luas 4 x 5 meter, di dalamnya ada dapur dengan ukuran minimum 2 x 3 meter; kapasitas sentra, maksimal 300 orang; area makan minum; kursi: 300 kursi; meja: 50 – 60 meja; tempat cuci tangan: 12 titik; area cuci piring dengan ukuran sebesar 36 m², dengan 8 titik bak cuci, lengkap dengan meja area pengering, dan rak simpan;

Selain hal tersebut, untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke pusat jajanan/ kuliner pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro, maka dilengkapi dengan *hydrant*, sumber air untuk keadaan darurat api; pemadam kebakaran *portable* ditiap gerai, dan di *common area* sesuai hitungan yang berlaku; listrik disetiap gerai 1200 watt; stop kontak atau *power* listrik 3 (tiga) titik ditiap gerai; untuk gerai yang membutuhkan arang atau kegiatan *grill* maka ditempatkan di luar

area makan minum, agar asap tidak masuk ; *exhaust fan*, kipas udara untuk sirkulasi; AC untuk ruang *non-smoking*; *ceiling fan*/kipas angin untuk area *smoking*; dan saluran telepon dan data internet – terutama untuk pembayaran non tunai.

b) **Resort Area**

Untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berlibur dan ingin menginap di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro, pada kawasan ini direncanakan untuk membangun *Resort Area* dengan menggunakan perpaduan desain modern dan tradisional dengan bahan-bahan lokal yang identik dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat kabupaten Jeneponto.

Adapun rencana pengembangan *Resort area* pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

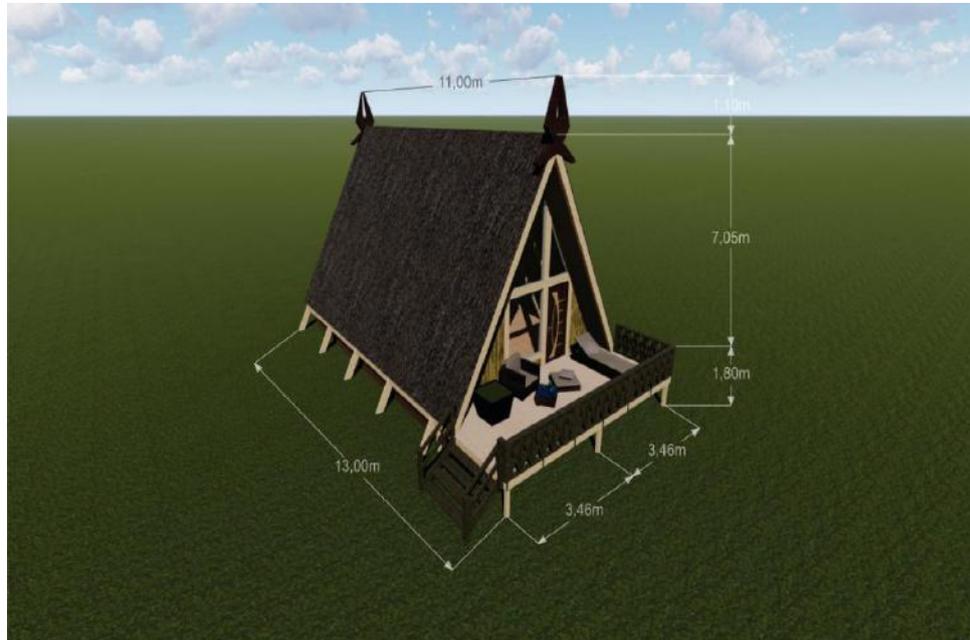
Gambar 43
Ilustrasi Rencana Pengembangan Cottage
Pada Resort Area Di Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Resort area yang akan dikembangkan tersebut adalah desain yang tersebar mengikuti kontur, topografi dan vegetasi alam kawasan wisata Tanjung Mallasoro sehingga keberadaan tidak kontradiktif dengan penampilan keseluruhan kawasan wisata tetapi akan menambah daya tarik dan citra kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro secara keseluruhan. Desain rencana pengembangan *Cottage* pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 44
Desain Rencana Pengembangan Cottage
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Detail desain rencana pengembangan Cottage pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 45
Detail Desain Rencana Pengembangan Cottage
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

5) Rencana Pengembangan Amenitas

a) Pusat Informasi

Pusat Informasi Wisata merupakan sarana yang menyediakan fasilitas layanan informasi pariwisata yang akurat dan terbaru (*update*) kepada wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Mallasoro dan menjadi tempat mempromosikan daya tarik dan atraksi wisata kabupaten Jeneponto agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan .

Selain itu, Pusat Informasi Wisata juga berfungsi sebagai *travel advice and support*, yang berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan pariwisata di kabupaten Jeneponto, seperti: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, dan Aktivitas Wisata; dan berperan aktif mengedukasi wisatawan tentang nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat yang berlaku di kabupaten Jeneponto.

Penempatan lokasi bangunan Pusat Informasi Wisata/TIC di daya tarik wisata Tanjung Mallasoro, yang dipilih di dalam kawasan daya tarik wisata pada bagian depan kawasan sehingga lebih strategis, mudah dilihat, dan mudah dicapai oleh pengunjung. Desain pusat informasi pariwisata/ TIC pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 46

Rencana Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Desain Pusat Informasi Wisata/ TIC Tanjung Mallasoro mengikuti panduan sebagai berikut :

- (1) Standar Dimensi Pusat Informasi Wisata/ TIC, luas bangunan tidak lebih dari 80 meter².
- (2) Pengelola terdiri dari manajerial; staf, yang mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki kemampuan berbahasa asing, minimal Bahasa Inggris; dan pramu ruang.

- (3) Sarana dan Prasarana terdiri dari Telepon (*fixed line*); Faks; Internet; Komputer; *Printer*; *Scanner*; Meja; Kursi/ Sofa; Materi Promosi Pariwisata; Peralatan Keamanan; Instalasi listrik; dan Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Pada bagian *entrance* dan *lobby* yang merupakan area pintu masuk dan ruang tunggu pengunjung memiliki 2 (dua) pintu masuk (*double doors*). Pintu masuk dan *lobby* memiliki ukuran yang cukup luas untuk memberi ruang gerak lebih kepada pengunjung dan mengantisipasi banyaknya jumlah pengunjung yang datang. Desain ruangan dibuat nyaman dengan hiasan yang mencerminkan kearifan lokal, tulisan Selamat Datang (*welcome*); papan rambu arah petunjuk ruangan; dan d) fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Selain itu disediakan pula *Service Desk*, berupa area pelayanan informasi bagi pengunjung dengan kelengkapan sebagai berikut:

- (1) Meja layanan yang menghadap ke arah pintu masuk, sebanyak 2 (dua) buah dengan 1 (satu) buah kursi untuk staf pengelola dan 2 (dua) buah kursi untuk pengunjung;
- (2) Sarana pendukung seperti telepon dan komputer yang terhubung dengan internet.
- (3) Interior ruangan dirancang dengan komposisi warna yang hangat dan netral serta mencerminkan kearifan lokal.

Pada area Informasi, pengunjung dapat mencari informasi melalui brosur dan materi cetak maupun elektronik secara mandiri. Area informasi disatukan dengan ruang tunggu pengunjung, yang dilengkapi dengan:

- (1) Rak untuk memasang dan meletakkan peta, brosur, dan materi promosi cetak yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Dan masing-masing dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk memudahkan pengunjung memperoleh informasi dan mengantisipasi datangnya pengunjung asing;
- (2) Display informasi elektronik, berupa TV ataupun komputer yang dilengkapi dengan petunjuk pemakaian untuk masing-masing unit. Display informasi ini dilengkapi pula dengan materi promosi elektronik (CD dan/atau DVD mengenai atraksi wisata, peta, dan fasilitas wisata seperti hotel, transportasi, dan lain-lain); dan.
- (3) Fasilitas dan akses internet berupa jaringan internet pita lebar berbasis *Asymmetric Digital Subscriber Line* (ADSL) atau 3G.

Pada area *lounge* pengunjung, yang merupakan tempat bagi pengunjung untuk duduk, membaca, dan bersantai, didukung oleh kursi dengan sandaran tangan, bangku, dan/ atau sofa, serta meja. Ruang tamu pengunjung ditempatkan tidak terlalu dekat dengan

area yang banyak dilalui orang untuk mempermudah alur pengunjung yang melalui ruangan. Area ini disatukan dengan area informasi.

Kantor administrasi yang merupakan kantor pengelola, dilengkapi dengan fasilitas kantor seperti telepon, meja, kursi, komputer, dan internet. Untuk ruang penyimpanan digunakan sebagai tempat penyimpanan persediaan brosur serta barang lainnya. Toilet dibuat terpisah sesuai jenis kelamin (pria dan wanita) serta pengguna (pengunjung dan pengelola).

Papan Petunjuk Lokasi Pusat Informasi Wisata/TIC, mencantumkan logo "i" (Informasi) disertai tulisan "*Tourist Information Center*" dan Logo Pesona Indonesia/ Wonderful Indonesia serta logo kabupaten Jeneponto. Tulisan dibuat dengan huruf jelas dan mudah dibaca. Papan penunjuk lokasi dibuat menggunakan unsur tradisional yang menjadi ciri khas kabupaten Jeneponto dengan lokasi penempatan, menarik, mudah terlihat, dan tidak terhalang apapun.

Arsitektur Desain eksterior dari Pusat Informasi Wisata/TIC menggambarkan lingkungan dan kearifan lokal dengan perpaduan ruang modern dengan desain bangunan yang merefleksikan elemen-elemen arsitektur lokal. Konstruksi Material yang digunakan untuk bangunan Pusat Informasi Wisata/TIC selaras dengan lingkungan sekitar yaitu menggunakan perpaduan material alami seperti kayu dan batu.

Bangunan Pusat Informasi Wisata/TIC mudah diakses untuk lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan bermotor (mobil, bus atau sepeda motor) dengan dilengkapi jalan akses bagi pejalan kaki dan area parkir. Serta memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas, dengan menyediakan jalan khusus bagi lansia dan pengguna kursi roda.

b) Ruang Ganti/ Toilet

Ruang ganti dan/ atau toilet sangat diperlukan oleh wisatawan untuk mencuci tangan, membasuh wajah, membuang hajat atau untuk berganti pakaian ketika sedang beraktivitas di daya tarik wisata Tanjung Mallasoro. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian pengelola karena sangat terkait dengan kenyamanan wisatawan. Oleh sebab itu, ketersediaan ruang ganti dan/ atau toilet pada sebuah kawasan pariwisata adalah hal yang mutlak diperlukan. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut akan berakibat pada ketidaknyamanan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata, yang akhirnya juga mempengaruhi tingkat kepuasan.

Adapun wisatawan yang perlu dipenuhi kebutuhannya secara khusus yaitu wisatawan berkebutuhan khusus (memiliki spesifikasi khusus), ibu menyusui dan bayi (ruang menyusui). Selain itu, ruang ganti dan/atau toilet pengelola dirancang dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan sehingga pengelola memperhatikan desain, pemilihan material bangunan, lokasi, dan cara pemeliharaan fasilitas ruang ganti dan/atau toilet yang optimal.

Konsep dasar dalam pembangunan ruang ganti dan/atau toilet di kawasan pariwisata Tanjung Mallasoro antara lain: 1) aspek fisik dari ruang ganti dan/atau toilet; 2) aspek kebutuhan wisatawan terhadap ruang ganti dan/atau toilet; 3) aspek ramah lingkungan dari ruang ganti dan/atau toilet; 4) aspek perencanaan dari ruang ganti dan/atau toilet; dan 5) aspek pemeliharaan dari ruang ganti dan/ atau toilet.

Dalam rancangan ruang ganti dan/atau toilet pada kawasan pariwisata Tanjung Mallasoro, beberapa prinsip dan kaidah yang dijadikan pertimbangan antara lain:

- 1) Prinsip global mengacu kepada kebutuhan ruang ganti dan/atau toilet yang sesuai dengan standar internasional dan mengacu kepada aspek ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi yang dapat membantu penghematan air (kran sensor).
- 2) Dalam perancangan pembangunan fasilitas ruang ganti dan/atau toilet memperhatikan aspek gender, dimana jumlah fasilitas yang diperlukan untuk wanita adalah 3 (tiga) kali lebih banyak daripada pria. Hal ini mengacu kepada data bahwa wanita menggunakan toilet 3 (tiga) kali lebih lama daripada pria.
- 3) Prinsip budaya yang disesuaikan dengan budaya Indonesia.

Adapun rencana pembangunan ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 47
Rencana Pengembangan Ruang Ganti/ Toilet
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Dalam pembangunan ruang ganti dan/atau toilet di kawasan Tanjung Mallasoro, sangat memperhatikan prinsip higienis karena

kerentanan penyebaran penyakit melalui fasilitas ini sangat tinggi. Penyakit yang menyebar melalui udara dapat bertahan hingga satu jam lamanya. Oleh sebab itu, fasilitas ruang ganti dan/atau toilet harus bersih, sehat, kering, dan higienis.

Fungsi dari ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan Tanjung Mallasoro dirancang untuk memenuhi sebagai tempat wisatawan untuk buang air besar; sebagai tempat bagi wisatawan untuk buang air kecil; sebagai tempat bagi wisatawan yang membawa bayi (menyusui, memompa ASI dan mengganti popok bayi); sebagai tempat bagi wisatawan untuk mencuci tangan, membasuh wajah, atau aktivitas lain yang membutuhkan air; dan sebagai tempat untuk mengganti pakaian;

Manfaat dari dari ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan Tanjung Mallasoro dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan secara psikologis, ketika mereka mengetahui bahwa jika sewaktu-waktu mereka perlu untuk buang air kecil maupun besar maka sudah tersedia toilet yang memadai.

Ruang ganti dan/ atau toilet di Kawasan Pariwisata Tanjung Mallasoro dirancang dan dibangun sesuai ketentuan teknis standar, yaitu :

- 1) Besaran ruang luas ruang ganti dan/ atau toilet pada kawasan pariwisata terdiri dari lantai, dinding dan atap.
 - a) Lantai tahan terhadap gesekan, tidak licin, tidak menyerap air, dan mudah dibersihkan.
 - b) Dinding pembatas antara ruang toilet satu dengan lainnya tahan air dan menggantung 20 cm dari atas lantai.
 - c) Atap terletak pada posisi ketinggian dinding dengan penentuan besaran minimal yang menutupi luasan ruang.
- 2) Sirkulasi Udara Sirkulasi udara yang baik sangat diperlukan pada area ruang ganti dan/atau toilet. Ruang toilet yang basah mempunyai kelembaban yang sangat tinggi mencapai 40–50%, karena itu sirkulasi udara yang baik dibutuhkan untuk mengatasi kelembaban tersebut. Untuk mengatasi kelembaban tersebut, beberapa alternatif yang digunakan antara lain dengan menggunakan *exhaust fan* atau kipas pengering di atas *washtafel* yang dapat membantu proses pengeringan lantai di sekitarnya. Sirkulasi udara sangat penting untuk menjaga udara ruang ganti dan/atau toilet bebas dari bau, jamur dan bakteri serta zat kimia berbahaya lainnya.
- 3) Pencahayaan Standar pencahayaan pada ruang ganti dan/atau toilet adalah 200 lumen (TOTO). Pencahayaan dilakukan dengan memanfaatkan pencahayaan buatan maupun pencahayaan alami. Pencahayaan alami yang baik, selain dapat menghemat energi juga dapat memberikan kesan positif, sedangkan pencahayaan yang buruk akan memberikan kesan kusam, gelap, dan kotor pada ruang ganti dan/atau toilet.

- 4) Pintu yang digunakan menggunakan material tahan air seperti bahan fiber yang dilaminasi dengan bahan tahan air maupun terbuat dari alumunium.
- 5) Bentuk langit-langit atau plafon berupa datar atau mengikuti kemiringan atap dan tahan air agar tidak terjadi kebocoran saat hujan.
- 6) Fasilitas *washtafel* di area ruang ganti dan/ atau toilet menyediakan sabun cair, cermin, dan kran air yang digunakan pada ruang ganti dan/ atau toilet adalah kran otomatis (kran sensor) yang hemat air atau kran dengan menggunakan tuas putar (*lever handle*).

Ruang Ganti dan/ atau toilet di kawasan pariwisata Tanjung Mallasoro dibangun sesuai pedoman Kementerian Pariwisata tentang fasilitas yang harus disediakan pada ruang ganti dan/atau toilet umum yang akan dibangun, yaitu :

Tabel 11
Ketersediaan Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet

No	Fasilitas	Standar Rekomendasi
1	Kloset (WC)	Duduk
2	Urinoir	Ada
3	Washtafel	Ada
4	<i>Handicap</i>	Dua untuk Pria dan Wanita
No	Fasilitas	Standar Rekomendasi
5	<i>Toilet Paper</i>	Ada
6	<i>Jetspray/ Washlet</i>	Disamakan
7	Pengering Tangan/ <i>Tissue</i>	Ada
8	Cermin	Ada
9	Gayung dan Tempat Air	Ada
10	Tempat Sampah	Ada
11	Saluran Pembuangan	Ada
12	Penjaga Toilet	Ada
13	<i>Janitor</i>	Ada

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Selain pemenuhan terhadap standar tersebut di atas, ukuran standar juga menjadi hal yang perlu dipenuhi agar kebutuhan dan kenyamanan wisatawan dalam menggunakan ruang ganti dan/atau toilet menjadi maksimal. Berikut tabel standar ukuran fasilitas pada ruang ganti dan/atau toilet

Tabel 12
Ukuran Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet

No	Fasilitas	Standar Rekomendasi
1	Pintu Masuk Utama	110-120 cm
2	Kubikal	90 x 150 cm

3	Jarak antara Pintu dengan Tempat Duduk Toilet	60 cm
4	Jarak Dinding Urinal	80 cm
No	Fasilitas	Standar Rekomendasi
5	Pintu Toilet untuk orang berkebutuhan khusus	120 cm
6	Sirkulasi untuk orang berkebutuhan khusus	180 cm
7	Sirkulasi jarak antara kubikal ke dinding	120 cm
8	Sirkulasi jarak antara kubikal dengan washtafel	140 cm
9	Daya Tampung dan luasan lantai	4,3 m dari luas lantai

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Selain fasilitas regular standar, wisatawan berkebutuhan khusus juga harus menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan ruang ganti dan/ atau toilet di kawasan pariwisata. Berikut standar ukuran fasilitas ruang ganti dan/atau toilet bagi wisatawan berkebutuhan khusus.

Tabel 13
Ukuran Fasilitas Pada Ruang Ganti/ Toilet Bagi
Wisatawan Berkebutuhan Khusus

No	Fasilitas	Ukuran
Ukuran Toilet :		
1	Ukuran Ruangan	Minimal 167 x 185 cm
2	Ukuran Pintu	Lebar 81 cm
3	Ruang Bebas Bergerak	122 x 142 cm
4	Penerangan	Minimal 200 lumen
5	Pintu	Pintu geser
Washtafel :		
No	Fasilitas	Ukuran
1	Ketinggian Washtafel	76 cm
2	Ketinggian kran	86 cm

3	Ruang Bebas Bergerak	120 cm
Ruang Urinal :		
1	Tinggi Urinal	Dewasa maksimal 43 cm, Anak maksimal 35,6 cm. Setiap ruangan urinal harus menyediakan <i>handrail</i> untuk membantu pemakai
2	Lain-lain : a. Tersedia tempat sampah untuk pembalut, tisu toilet dan sabun. b. Tombol alarm disamping toilet c. Lantai dan rata tidak licin	

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Setiap fasilitas ruang ganti dan/atau toilet harus menggunakan desain yang mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dengan menyesuaikan kondisi daerah dan kearifan lokal.

Penempatan ruang ganti dan/atau toilet di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro tidak mengganggu bangunan disekitarnya dan mudah terlihat. Selain itu, ruang ganti dan/atau toilet dihiasi dengan tanaman yang menambah nilai estetika serta mengikuti pedoman konstruksi sesuai dengan standar toilet umum Indonesia (kering itu sehat).

Gambar 48
Rencana Desain Ruang Ganti/ Toilet
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Standar teknis ruang ganti dan/atau toilet pada daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dibagi menjadi :

- 1) Kemiringan minimum lantai 1% dari panjang atau lebar lantai. Bahan pelapis lantai terbuat dari ubin keramik, semen plester/ acian/ batu alam yang kuat, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Jenis lapisan lantai alternatif lainnya dapat menggunakan jenis vinyl.
- 2) Dinding dengan warna terang untuk memudahkan mengontrol kebersihan ruang ganti dan/ atau toilet. Ubin keramik dijadikan pilihan untuk melapisi dinding yang terbuat dari gypsum tahan air atau batu bata yang telah diberi lapisan tahan air atau dinding dengan bahan batako yang dilapisi cat tahan air.
- 3) Langit-langit atau plafon terbuat dari bahan yang cukup kaku dan rangka yang kuat, sehingga memudahkan dalam perawatan dan tidak mudah kotor.
- 4) Kloset maupun sanitari memiliki bentuk leher angsa untuk menghindari bau yang tidak sedap. Sanitari berwarna putih yang dapat membantu mendeteksi kotoran seperti air seni atau tinja.
- 5) Pintu dan jendela ventilasi pada ruang ganti/toilet terbuat dari bahan yang tahan terhadap air, agar ringan, tidak lapuk dan mudah dibersihkan. Untuk daun pintu kloset memiliki kunci yang dapat dikunci dari dalam. Daun pintu terpasang disebelah kanan dan membuka kearah dalam agar menghindari benturan dengan aktifitas di luar ruangan dan menyediakan gantungan pakaian atau tas yang diletakkan pada sisi dalam pintu.
- 6) Lampu diletakkan pada posisi strategis seperti di dekat cermin sehingga tidak menyilaukan.
- 7) Pipa saluran air (*plumbing*) terdiri dari pemipaan air bersih, pemipaan air kotor, dan air kotor padat.
- 8) Estetika dibuat dengan berbagai variasi sesuai dengan fungsinya dan tidak terikat oleh bangunan disekitarnya yaitu bentuk bangunan, elemen-elemen bangunan dalam ruang ganti yang dapat dirancang adalah bidang dinding dan atap.
- 9) Penggunaan warna-warna mencolok, eksentrik maupun lembut akan membuat kesan yang berbeda.
- 10) Asesoris bangunan yang digunakan berupa konsol atap, bingkai-bingkai pintu dan menggunakan bahan-bahan alami, tradisional maupun modern.

Tata ruang dan bangunan rancangan lansekap sangat menentukan kualitas keindahan, dan kenyamanan kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro, yang mampu dirasakan oleh wisatawan dan dapat meningkatkan citra kawasan. Lansekap ruang ganti dan/atau toilet dirancang memenuhi kriteria :

- 1) Tidak merusak keindahan lingkungan;
- 2) Mudah diketahui dan dicapai keberadaannya;
- 3) Memberikan kenyamanan dan perasaan aman;

- 4) Keadaan sekitar ruang ganti dan/atau toilet tertata indah, asri, bersih dan nyaman; dan
- 5) Mudah dalam proses pemeliharaan kebersihan.

Penataan lansekap di sekitar ruang ganti dan/atau toilet dengan bentuk fisik yang disarankan adalah:

- 1) Tidak menanam pohon yang rindang dengan jarak yang dekat untuk membantu mengurangi kelembaban di dalam ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) Menanam tanaman pohon semak dan rumput yang ditata untuk memberikan kesan asri pada ruang ganti dan/atau toilet; dan
- 3) Memiliki ruang luar yang terbuka yang bertujuan memberikan sirkulasi udara yang baik

c) **Menara Pandang**

Menara pandang merupakan struktur bangunan tinggi yang berfungsi untuk melihat area dengan cakupan yang luas. Menara pandang yang direncanakan untuk dibangun pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah *Observation tower*, yaitu menara pandang yang digunakan sebagai pos penjagaan atau pos observasi untuk melihat keseluruhan area. Menara pandang ini merupakan fasilitas untuk mengamati gejala alam yang berbahaya bagi keselamatan wisatawan seperti ombak dan angin sekaligus mengamati wisatawan yang sedang berenang atau beraktivitas di laut dan membutuhkan bantuan atau pertolongan.

Manfaat menara pandang di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai pos penjagaan untuk menjaga keselamatan wisatawan, dan sebagai fasilitas penunjang aktivitas wisatawan untuk menikmati kawasan dalam *birdview*.

Sedangkan fungsi dari menara pandang adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan, menciptakan pengalaman lebih kepada pengunjung dengan adanya aktivitas *sightseeing* yang dapat diberikan di menara pandang tanpa mengganggu kehidupan di sekitarnya.

Beberapa bentuk pengembangan menara pandang dengan desain yang lebih artistik tetapi tetap memperhatikan fungsi dari menara pandang. Secara umum, dalam pembangunan dan pengelolaan menara pandang adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki tinggi bangunan minimal 3 m dengan luas bangunan minimal 20 m².
- 2) Berupa bangunan semi permanen dengan fondasi.
- 3) Memiliki alat komunikasi.
- 4) Dilengkapi dengan beberapa peralatan tambahan seperti teropong pandang, pengeras suara dll.

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pembangunan menara pandang di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dengan tata cara perencanaan pembangunan menara pandang

terkait dengan faktor *the client and the program* yang terkait dengan aspek kuantitatif pembangunan, yaitu: ukuran, tinggi, daya dukung, akses tangga, material yang digunakan, anggaran atau dana yang tersedia, penempatan (hubungan dengan ruang terbuka, bangunan lain dan lahan parkir), tujuan (keagamaan, pendidikan, kepentingan umum), desain interior yang diusulkan, dan waktu penggunaan.

Beberapa hal juga diperhatikan dalam perencanaan pembangunan menara pandang dengan mengadaptasi bangunan menara yaitu perencanaan dimensi diperhitungkan secara akurat untuk menentukan persyaratan minimum ruang dan ruang untuk instalasi serta pemeliharaan. Selanjutnya penentuan tipe konstruksi untuk menentukan kapasitas daya tampung dengan memperhitungkan tebal dinding, ukuran struktur, tebal lantai dan lainnya yang bisa dianalisis untuk struktur kapasitas menara.

Pertimbangan lebih lanjut adalah memperkirakan jumlah tingkatan menara yang disesuaikan dengan tinggi menara. Tangga akses menara juga disesuaikan dengan jumlah tingkatan dan tinggi menara. Pencahayaan terdapat di tangga akses dan di ruangan, begitu pula dengan ventilasi dan pengatur suhu ruangan.

Ilustrasi rencana pengembangan menara pandang/ menara pantau di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 49
Ilustrasi Menara Pandang/ Menara Pantau
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



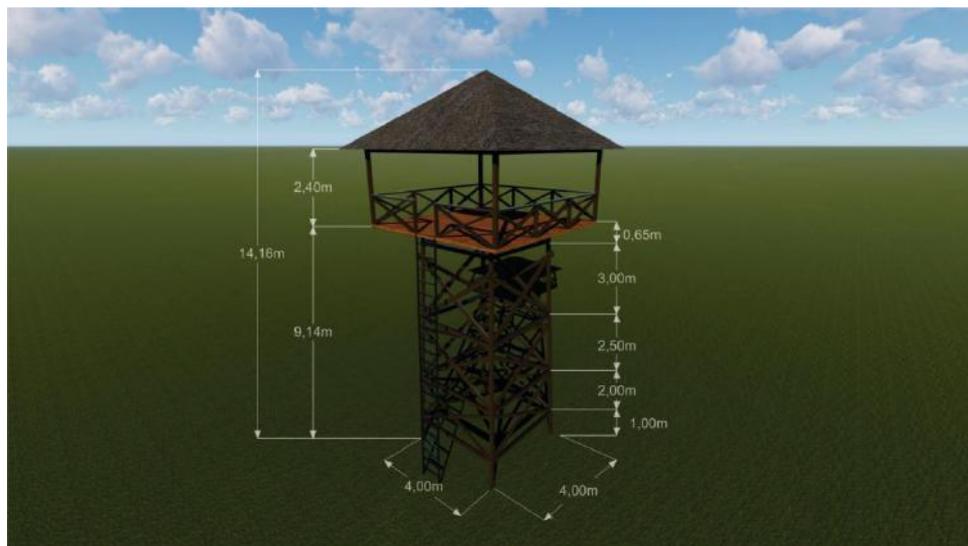
Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Menurut *International Code Building* (ICB) 2007, menara pandang merupakan bangunan dengan klasifikasi kepemilikan dan kegunaan bangunan dengan fungsi tertentu atau bangunan lain. Sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada, dalam

pembangunan menara pandang harus memiliki daftar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mengikuti kaidah pembangunan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di kabupaten Jeneponto.

Adapun gambaran desain rencana pengembangan menara pandang/ menara pantau di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 50
Rencana Desain Menara Pandang/ Menara Pantau
Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

d) **Souvenir/ Gift Shop**

Cenderamata adalah sesuatu yang dibawa oleh wisatawan ke tempat tinggalnya sebagai oleh-oleh, *souvenir*, tanda mata, atau kenang-kenangan. Kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro memiliki ciri khas tersendiri sehingga berbeda dengan destinasi wisata lainnya dan menunjukkan identitas dari destinasi wisata tersebut. Selain menyediakan cenderamata khas Tanjung Mallasoro, daya tarik wisata ini juga menyediakan cenderamata khas kabupaten Jeneponto dan provinsi Sulawesi Selatan.

Pertimbangan yang dijadikan dalam dalam perancangan *souvenir/ gift shop* pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah :

- 1) Mudah diakses ;
- 2) Luas ruangan sesuai kebutuhan jenis *souvenir*;
- 3) Bentuk rak adalah rak *single wall minimarket* dan rak *double* dengan ukuran panjang papan antara 30 cm – 40 cm;
- 4) Jenis bahan ideal untuk *souvenir* adalah besi dengan ketebalan plat antara 0.5 mm – 0.6 mm dan mampu menahan berat barang sebesar 30 kg – 50 kg;
- 5) Pintu menghadap ke ruang kosong, tidak boleh ada lemari, tirai atau furnitur yang menghalangi pengunjung masuk;

- 6) Panjang lemari dan meja dalam kios harus sesuai dengan sudut letak lemari;
- 7) Tidak menempatkan lemari dan meja pada sisi tajam yang mengarah ke pintu masuk;
- 8) Memiliki sistem sirkulasi udara atau *air conditioner* (ac) dan pencahayaan, pintu masuk dan keluar harus sesuai standar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Petunjuk arah dan papan nama kios cenderamata memiliki tulisan yang terbaca dengan jelas dan mudah terlihat.

Adapun rencana pengembangan pusat penjualan cenderamata (*souvenir/ gift shop*) pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 51
Rencana Pengembangan Pusat Penjualan Cenderamata Pada Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Design produk yang dipasarkan pada *souvenir/ gift shop* di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro sesuai unsur keunikan, merepresentasikan tempat wisata, dan kekhasan budaya atau kearifan lokal masyarakat kabupaten Jeneponto dan dilengkapi dengan tempat sampah tertutup yang terdiri atas: tempat sampah organik dan tempat sampah non-organik; instalasi listrik/ genset; akses khusus darurat dan tempat berkumpul; dan instalasi kamera pengawas (CCTV) yang berfungsi dengan baik.

e) **Tempat Parkir**

Tempat parkir merupakan fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap minat berkunjung wisatawan karena selain berhubungan dengan kemudahan akses, pengaturan parkir yang baik, aman dan nyaman juga akan menimbulkan kesan yang baik termasuk dalam hal keamanan dan keselamatan kendaraan dan barang-barang

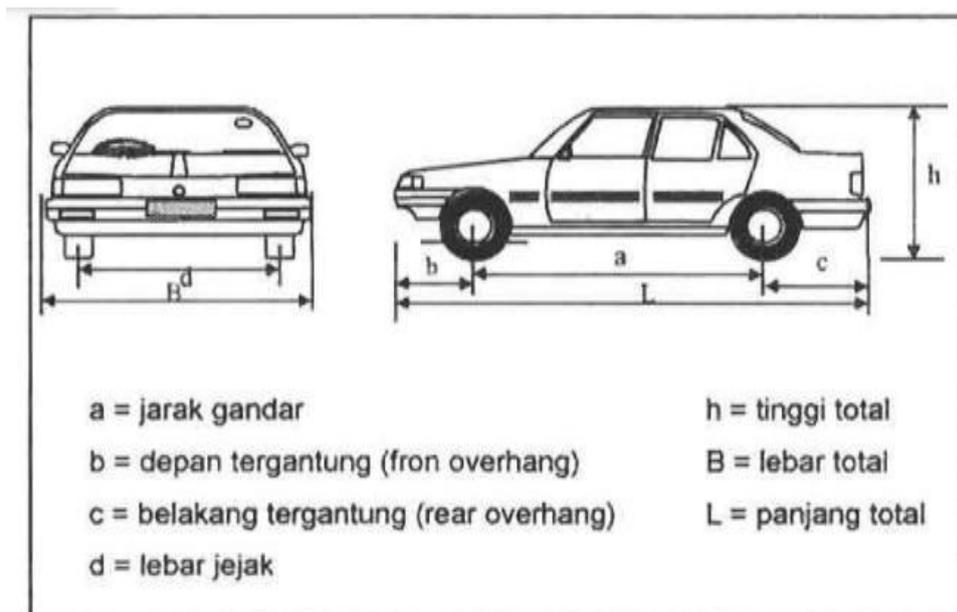
pengunjung yang di simpan di dalam kendaraan pada area parkir. Dengan pengaturan dan pengelolaan area parkir yang baik, juga akan memberikan potensi pemasukan bagi pengelola kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro.

Kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam merancang tempat atau pelataran parkir adalah Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD); keselamatan dan kelancaran lalu lintas; kelestarian lingkungan; kemudahan bagi pengguna jasa; tersedianya tata guna lahan; dan letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

Satuan Ruang Parkir (SRP) digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Untuk menentukan SRP pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang telah ditetapkan sebagaiberikut :

- 1) Dimensi Kendaraan Standar untuk Mobil Penumpang

Gambar 52
Ilustrasi Dimensi Kendaraan Standar
Untuk Mobil Penumpang



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

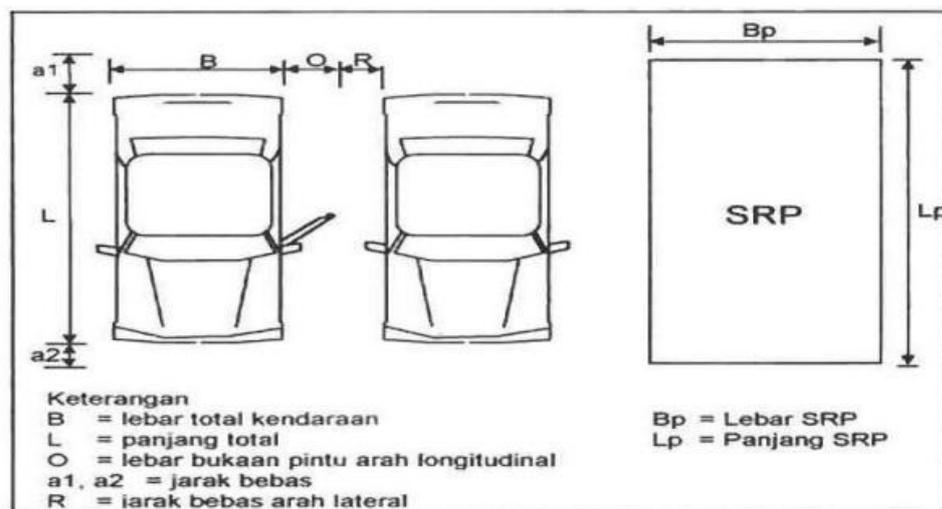
- 2) Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan *longitudinal* kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada posisis pintu kendaran terbuka, yang diukur dari ujung paling luar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya. Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang diberikan di depan kendaraan untuk menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (*aisle*). Jarak bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30 cm.

- 3) Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.

Penentuan SRP untuk kendaraan penumpang dibagi tiga jenis antara lain:

- 1) Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang ditunjukkan dalam gambar berikut:

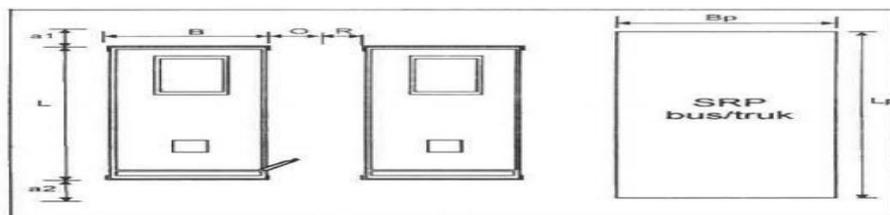
Gambar 53
Ilustrasi SRP Untuk Mobil Penumpang (dalam cm)



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 2) Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk bus atau truk besarnya dipengaruhi oleh besarnya kendaraan yang akan parkir, baik ukuran kecil, sedang, ataupun besar.

Gambar 54
Ilustrasi Konsep Sebagai Acuan Penetapan SRP



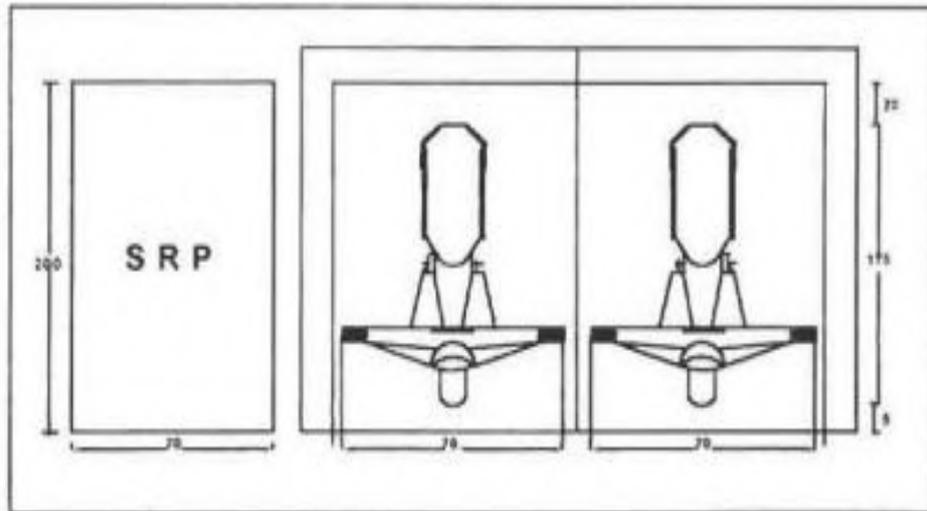
Gambar: SRP untuk Bus/Truk (dalam cm)

Gol I : B = 170	a1 = 10	Bp = 230 = B + O + R
O = 55	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
R = 5	a2 = 20	
Gol II : B = 170	a1 = 10	Bp = 250 = B + O + R
O = 75	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
R = 5	a2 = 20	
Gol II : B = 170	a1 = 10	Bp = 300 = B + O + R
O = 80	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
R = 50	a2 = 20	

Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 3) Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk sepeda motor ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 55
Ilustrasi SRP Untuk Sepeda Motor

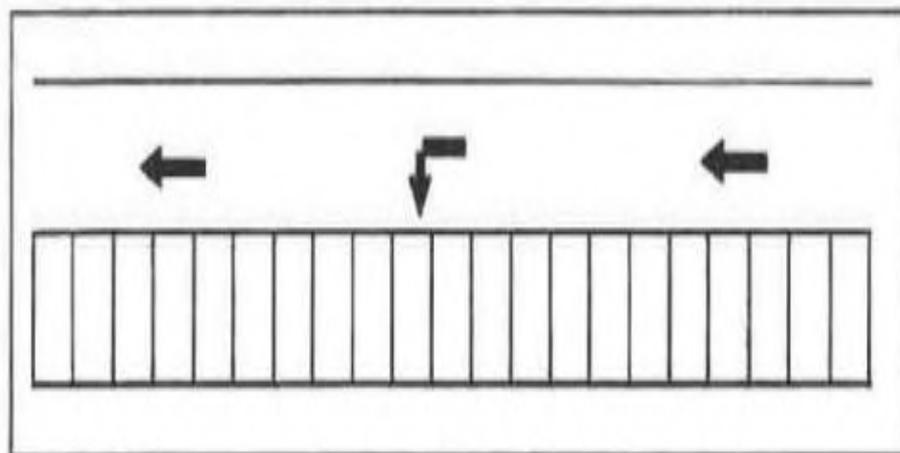


Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Terdapat beberapa pola parkir mobil penumpang, antara lain :

- 1) Parkir kendaraan satu sisi, pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit di suatu tempat kegiatan.
 - a) Membentuk sudut 90° , pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90° .

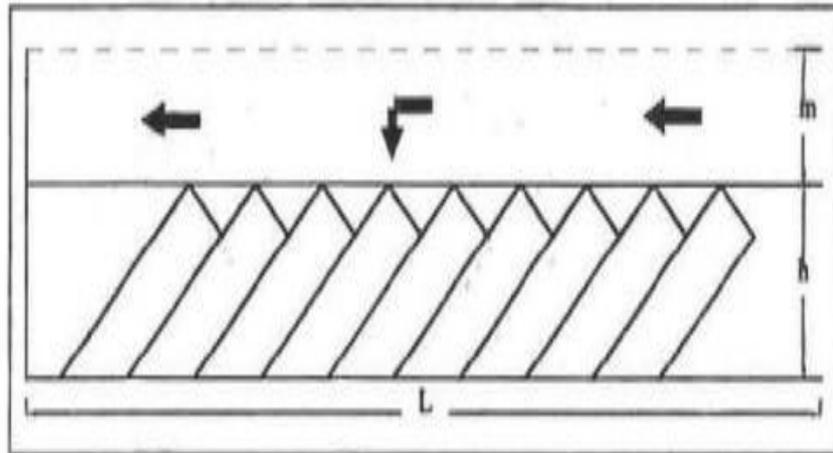
Gambar 56
Ilustrasi Pola Parkir Tegak Lurus



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- b) Membentuk sudut 30° , 45° , 60° , pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, dan kemudahan, dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut 90° .

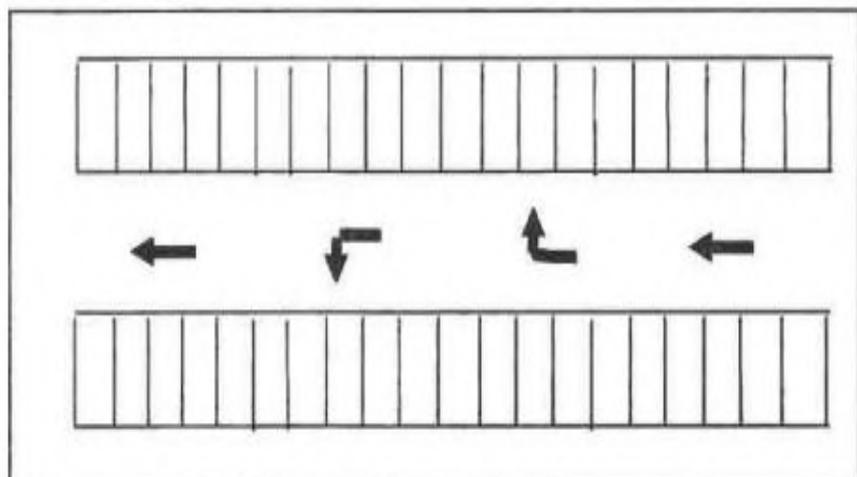
Gambar 57
Ilustrasi Pola Parkir Sudut



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 2) Parkir kendaraan dua sisi, pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai.
- a) Membentuk sudut 90° , pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat satu arah atau dua arah.

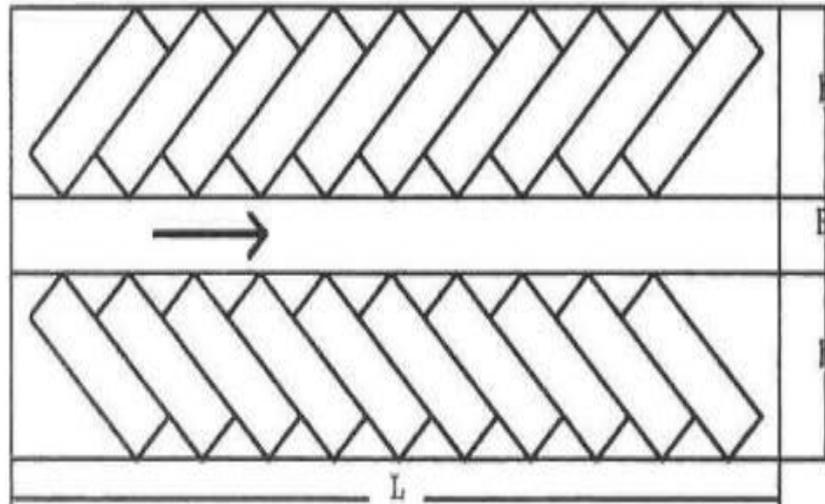
Gambar 58
Ilustrasi Pola Parkir Tegak Lurus Yang Berhadapan



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- b) Membentuk sudut 30° , 45° , 60°

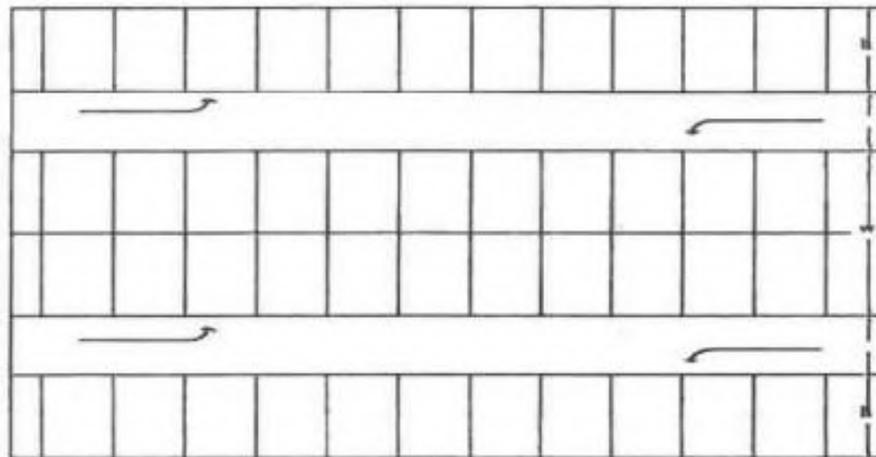
Gambar 59
Ilustrasi Pola Parkir Sudut Yang Berhadapan



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 3) Pola Parkir Pulau, diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas
 - a) Membentuk sudut 90° :

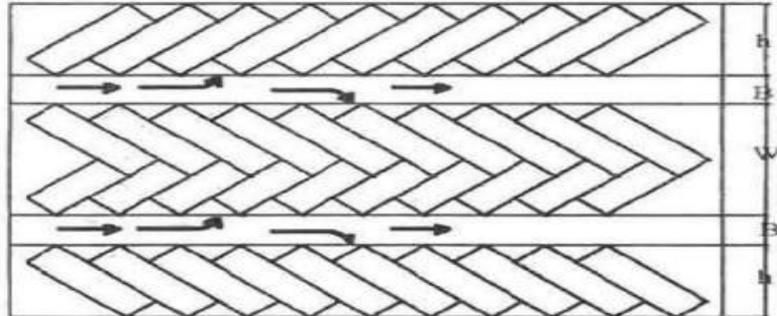
Gambar 60
Ilustrasi Taman Parkir Tegak Lurus Dengan Dua Gang



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

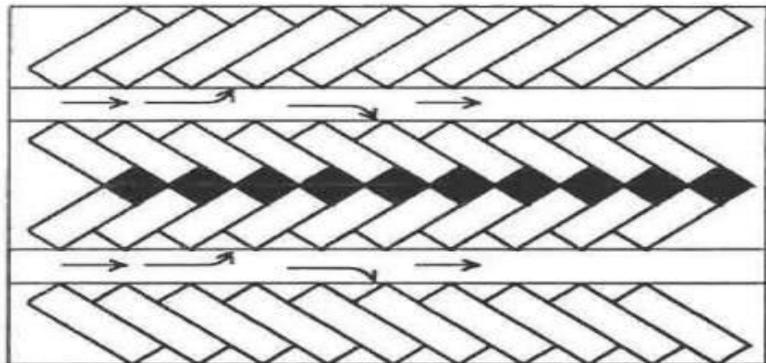
- b) Membentuk sudut 45° :

Gambar 61
Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan Dua Gang Tipe A
Bentuk Tulang Ikan Tipe A



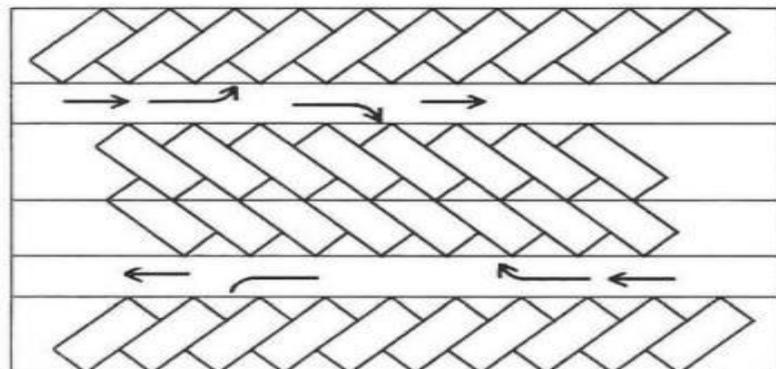
Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Gambar 62
Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan Dua Gang Tipe A
Bentuk Tulang Ikan Tipe B



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Gambar 63
Ilustrasi Taman Parkir Sudut Dengan Dua Gang Tipe A
Bentuk Tulang Ikan Tipe C

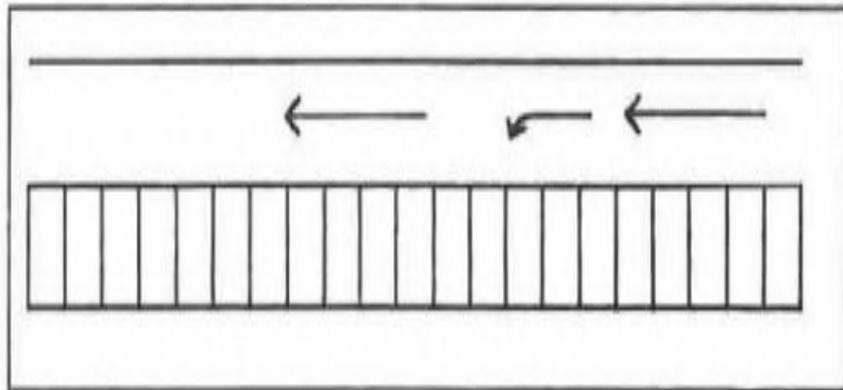


Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 4) Pola Parkir Bus/Truk, posisi kendaraan dapat dibuat menyudut 60° ataupun 90° tergantung dari luas areal parkir. Dari segi efektivitas ruang, posisi sudut 90° lebih menguntungkan.

- a) Pola Parkir Satu Sisi

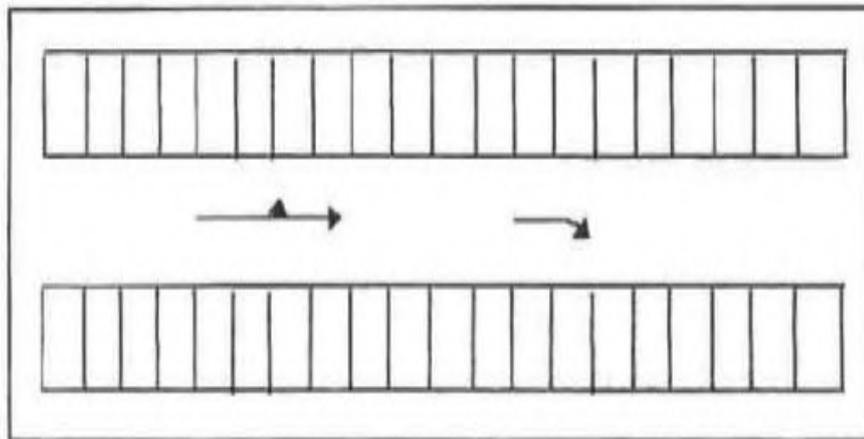
Gambar 64
Ilustrasi Pola Parkir Satu Sisi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- b) Pola Parkir Dua Sisi

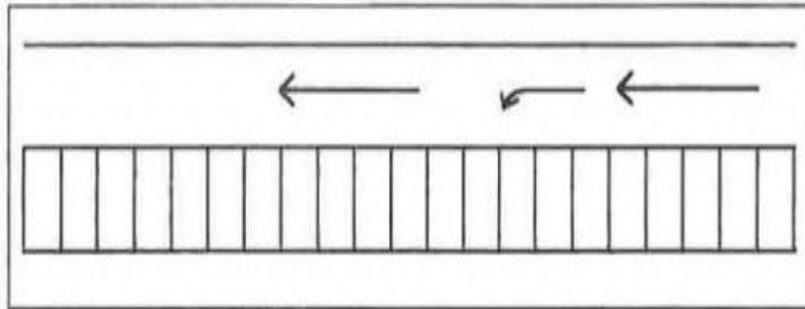
Gambar 65
Ilustrasi Pola Parkir Dua Sisi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 5) Pola Parkir Sepeda Motor, pada umumnya posisi kendaraan adalah 90° . Dari segi efektivitas ruang, posisi sudut 90° paling menguntungkan.
- a) Pola Parkir Satu Sisi, pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit.

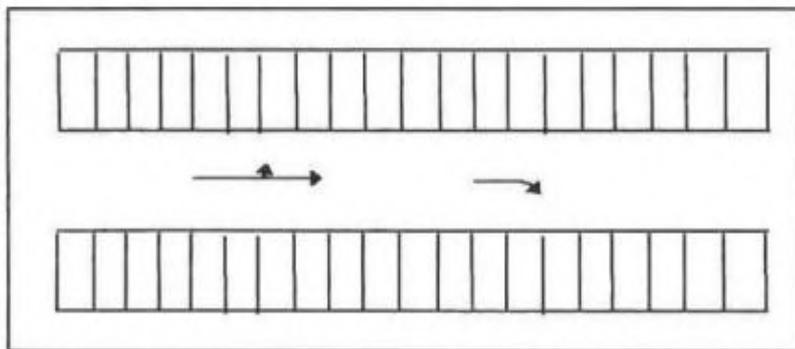
Gambar 66
Ilustrasi Pola Parkir Sepeda Motor Satu Sisi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- b) Pola Parkir Dua Sisi, pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar ruas > 5,6 meter).

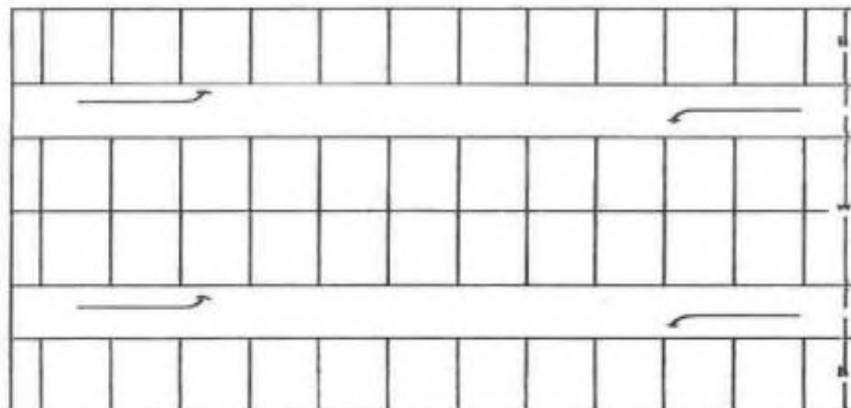
Gambar 67
Ilustrasi Pola Parkir Sepeda Motor Dua Sisi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- c) Pola Parkir Pulau, Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas.

Gambar 68
Ilustrasi Parkir Sepeda Motor Pola Pulau



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Adapun ilustrasi rancangan tempat parkir pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 69
Ilustrasi Tempat Parkir
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

Detail rancangan tempat parkir pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 70
Detail Rancangan Tempat Parkir
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019

f) **Signage**

Instrumen internasional rambu-rambu petunjuk arah yang ditetapkan secara internasional antara lain sebagai berikut:

- 1) Rambu Panduan dan Informasi, merupakan jenis tanda yang umum dipergunakan, seperti rambu lalu lintas di jalan raya sebagai panduan menuju suatu tujuan. Pada umumnya,

standar warna yang digunakan adalah berlatar belakang hijau dengan tulisan berwarna putih (dipergunakan di Inggris), sedangkan di Indonesia, menggunakan latar belakang berwarna putih dengan tulisan berwarna merah.

Gambar 71
Ilustrasi Contoh Rambu Panduan Informasi



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 2) Rambu Atraksi dan Layanan Pariwisata, dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait arah dan daya tarik wisata di destinasi pariwisata. Selain itu, rambu ini juga digunakan untuk mengidentifikasi fasilitas pariwisata yang tersedia di destinasi pariwisata dengan dilengkapi nama perusahaan penyedia, arah, sekaligus jarak yang harus ditempuh. Fungsi dari rambu atraksi dan layanan pariwisata ini antara lain: 1) menunjukkan lokasi dan arah; 2) menunjukkan pesan sekaligus memberikan opsi terhadap atraksi dan layanan pariwisata; dan 3) mengarahkan wisatawan mulai dari jalan raya sampai menuju destinasi pariwisata.

Gambar 72
Ilustrasi Contoh Rambu Atraksi Layanan Pariwisata



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 3) *Tourism Orientation Directional Sign* (TODS), merupakan ramburambu yang berisi petunjuk layanan kepariwisataan. TODS tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis, misalnya TODS yang khusus berfungsi untuk menunjukkan arah harus disertai dengan informasi yang lengkap terkait jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sedangkan TODS yang lainnya mencakup informasi mengenai tanda-tanda yang diakui secara nasional. Pada umumnya, rambu-rambu dibuat dengan latar belakang berwarna biru dan tulisan berwarna putih, kecuali tanda untuk rumah sakit dan bandara yang berlatar belakang hijau. Rambujenis TODS ini biasanya hanya digunakan untuk menunjukkan arah dan jarak serta tidak diperuntukkan bagi sarana promosi pelayanan maupun atraksi wisata.

Standar dimensi rambu-rambu penunjuk arah jenis TODS tipe utama adalah :

- a) Huruf (Utama) : 200 mm
- b) Huruf (Arah) : 150 mm
- c) Garis Pinggir : 15 mm dari ujung
- d) Warna : Tulisan – putih
- e) Garis Pinggir : Putih
- f) Latar Balakang : Coklat
- g) Bahan : *Aluminum Panels*
- h) Tampilan: *Type III High Intensity Retro-Reflective Sheeting*

Gambar 73
Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe Utama



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

Selanjutnya untuk Standar dimensi rambu-rambu penunjuk arah jenis TODS tipe B (*regular sign*) adalah :

- a) Tulisan : 150 mm *Series D* – Putih
- b) Latar Belakang : Coklat
- c) Garis Pinggir luar : 15 mm *edge* – Putih
- d) Garis Dalam : 10 mm *line* – Putih
- e) Ukuran Simbol : 600 mm x 600 mm
- f) Bahan : *Panel Alumunium*

Gambar 74
Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe B (Regular Sign)



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

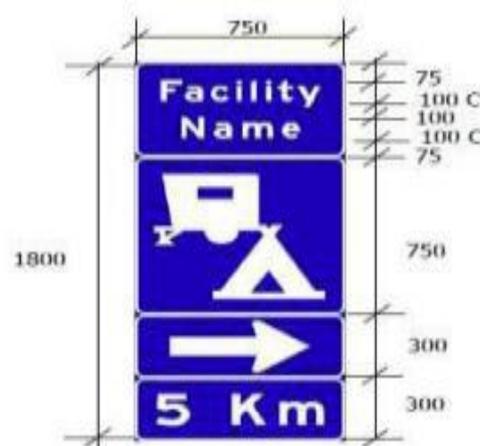
Untuk Standar dimensi rambu-rambu penunjuk arah jenis TODS tipe C (*Blazer*) adalah :

- a) Tulisan Utama : 200 mm *Series D* – Putih
- b) Tulisan Pendukung : 150 mm *Series D* – Putih
- c) Garis Horisontal : Ketebalan 10 mm

- d) Latar Belakang : Coklat
- e) Garis Pinggir : 38 mm edge – Putih
- f) Sudut : 25 mm radius
- g) Bahan : Aluminium

Gambar 75

Ilustrasi Contoh Rambu TODS Tipe C (Blazer)



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 4) Rambu-Rambu Berlogo, berfungsi untuk menunjukkan arah terhadap layanan penting seperti gas, tempat makan dan minum, serta penginapan yang tersedia di sepanjang jalan maupun di dalam destinasi pariwisata. Yang membedakan rambu ini dengan TODS adalah bahwa rambu-rambu ini dilengkapi dengan nama/ logo/ simbol penyedia layanan tersebut.
- 5) Rambu Intepretasi, pada umumnya ditempatkan pada taman-taman alam, di jalan atau pada situs-situs sejarah budaya maupun alam. Fungsi utama rambu ini adalah sebagai sarana pendidik dan komunikasi interaksif kepada wisatawan terkait dengan lokasi wisata yang dikunjungi.

Menurut jenisnya, rambu ini terbagi menjadi *Interpretative signs* dan *wayside exhibits*, dimana *wayside exhibits* merupakan rambu kombinasi antara kata-kata dengan gambar dalam dua dimensi.

Standar internasional dan kebijakan pembangunan rambu-rambu penunjuk arah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan rambu penunjuk arah pada konteks kepariwisataan harus memiliki bentuk maupun format yang berbeda dari rambu lalu lintas pada umumnya. Rambu tersebut harus memiliki format yang konsisten yang ditetapkan secara resmi. Secara idealnya, rambu-rambu ini tidak berbahasa namun menggunakan simbol yang standar dan mudah dikenali oleh semua wisatawan;

- 2) Rambu harus meliputi semua fasilitas wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan, termasuk didalamnya rambu keberadaan bandara, pelabuhan, fasilitas informasi, atraksi dan aktivitas rekreasi, akomodasi dan lain-lain;
- 3) Fasilitas yang harus ditempatkan pada rambu-rambu tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti jenis fasilitas, kapasitas, kualitas, waktu operasional, dll. Jenis aksesibilitas akan membedakan jenis rambu, sebagai contoh pada jalan utama hanya fasilitas utama yang akan diinformasikan;
- 4) Skema arahan yang ditunjukkan di rambu-rambu penunjuk harus mudah diikuti dan dimengerti oleh wisatawan;
- 5) Autorisasi pengelolaan rambu-rambu penunjuk arah akan berbeda dari di setiap negara/ wilayah/ destinasi pariwisata. Pengelola perhubungan, pada umumnya merupakan pengelola rambu-rambu penunjuk arah. Dalam hal ini pengelola perhubungan diharapkan dapat berkordinasi dan bekerjasama dalam menetapkan kebutuhan maupun pengelolaan terhadap rambu-rambu penunjuk arah pada destinasi pariwisata;
- 6) Skema pengelolaan dapat merupakan bagian dari perhubungan atau secara mandiri, dimana pengelola fasilitas atau atraksi wisata dapat membiayai terhadap pembuatan, pemasangan dan pengelolaan rambu-rambu penunjuk arah pada destinasi pariwisata.

Standar maupun kebijakan terkait dengan pemasangan rambu-rambu penunjuk arah sebagai berikut:

- 1) Warna dan bentuk dari rambu-rambu harus konsisten untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan;
- 2) Ukuran legenda harus optimal agar mudah dipahami secara cepat oleh pengendara pada kecepatan berkendara;
- 3) Penggunaan jumlah kata-kata dan simbol harus seminimal dan seoptimal mungkin sehingga secara mudah dan cepat dipahami oleh pengendara/wisatawan;
- 4) Pemasangan rambu-rambu penunjuk arah tidak menimbulkan bahaya.

Pembangunan dan pemasangan rambu-rambu penunjuk arah harus memberikan kontribusi kepada citra dari destinasi serta pengalaman berwisata bagi wisatawan. Adapun standar kebijakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tampilan Rambu (*Sign Faces*), menyapa pengunjung dan mengekspresikan identitas dari destinasi. Permukaan merupakan hiasan yang terbagi atas warna, jenis huruf dan simbol yang diterapkan untuk efek maksimum.
- 2) Panel Rambu (*Sign Panel*), dibuat dari bahan logam, *fibre glass*, kayu, beton atau plastik. Bahan-bahan ini akan membuat rambu-rambu penunjuk arah lebih menarik dan terlihat hidup dengan mengkombinasikan dengan warna, pencahayaan, tekstur dan bentuk.

- 3) Tiang Penyangga (*Sign Support*), perlu dikembangkan lebih dari sebuah tanda. Rambu harus dapat menginterpretasikan sebuah destinasi dengan memberikan fitur yang unik dari ciri khas sebuah destinasi

Dalam ketentuan teknis dan standar dalam rambu-rambu penunjuk arah, telah ditetapkan yaitu latar belakang coklat dan tulisan putih. Bentuk seperti ini akan mampu mengekspresikan daya tarik yang bersifat rekreatif maupun budaya. Berbagai standar yang bersifat teknis dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) *Gateway Signs* (Huruf putih dengan latar belakang coklat) ditempatkan di dekat pintu masuk dari kota atau wilayah geografis yang dapat memberikan informasi terkait dengan tema utama dari destinasi pariwisata. *Gateway Sign* juga dapat termasuk deretan putih pada simbol biru untuk menunjukkan ketersediaan layanan termasuk informasi pengunjung.

Gambar 76
Ilustrasi Contoh Gateway Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 2) *Advance Sign* (Huruf putih dengan latar belakang coklat), menyediakan informasi terkait dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari daya tarik wisata atau layanan pariwisata.

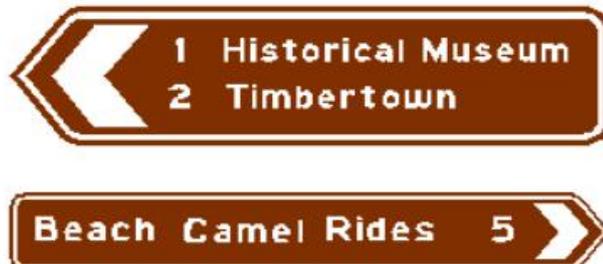
Gambar 77
Ilustrasi Contoh Advance Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 3) *Intersection Sign* (Rambu Persimpangan, huruf putih dengan latar belakang coklat), ditempatkan di persimpangan untuk menunjukan arah belokan atau arah berputar untuk satu atau lebih atraksi wisata atau pelayanan wisata.

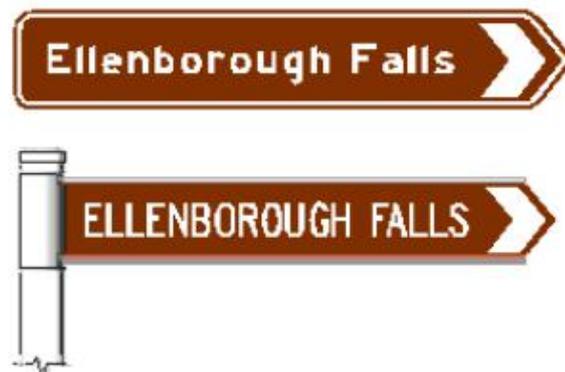
Gambar 78
Ilustrasi Contoh Intersection Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 4) *Position Sign* (Rambu Tanda Masuk, huruf putih dengan latar belakang coklat), untuk menunjukan posisi masuk menuju destinasi pariwisata atau pelayanan wisata.

Gambar 79
Ilustrasi Contoh Position Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 5) *Reassurance Sign* (Huruf putih dengan latar belakang coklat), untuk memastikan tujuan kepada wisatawan/ pengguna apabila destinasi atau pelayanan wisata masih pada jarak yang cukup jauh. Seringkali dipasang pada jalan persimpangan, sehingga memastikan wisatawan/ pengguna pada arah yang tepat.

Gambar 80
Ilustrasi Contoh Reassurance Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 6) *Routes Marker* (Huruf putih dengan latar belakang coklat), dapat ditempatkan guna menggantikan *intersaction sign* yang pada umumnya lebih mahal, karena *routes marker* umumnya bentuknya lebih kecil. Rambu ini pada umumnya didukung oleh aktivitas pemasaran atau promosi dari pelayanan wisata.
- 7)

Gambar 81
Ilustrasi Contoh Route Marker



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

- 8) *Temporary Sign* (Huruf putih dengan latar belakang coklat), penunjuk arah ini dipasang menuju destinasi pariwisata atau layanan pariwisata namun terbatas pada periode tertentu. Pada umumnya dipasang pada musim-musim atau *event* pada waktu-waktu tertentu

Gambar 82
Ilustrasi Contoh Temporary Sign



Sumber : Permenpar Nomor 3 Tahun 2018

g) Gapura Identitas

Konsep dasar pembangunan Gapura adalah menyediakan fasilitas layanan informasi lokasi atraksi wisata yang akurat kepada wisatawan yang datang berkunjung ke kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kemajuan jaman, maka fungsi gapura dapat ditambahkan menjadi tempat untuk memberikan layanan lain bagi wisatawan.

Adapun prinsip dan kaidah pembangunan gapura identitas adalah :

- 1) Kemanfaatan,kepatutan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian/ keselarasan bangunan dengan lingkungan dan budaya daerah kabupaten Jeneponto;
- 2) Hemat, kewajaran, ekonomis tidak berlebihan, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;
- 3) Terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja, serta fungsi setiap pengguna bangunan gedung;
- 4) Informatif; dan
- 5) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/ potensi nasional.

Fungsi dan manfaat gapura di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah antara lain: sebagai penanda lokasi pintu masuk di kawasan Pariwisata serta pemberi ucapan selamat datang kepada wisatawan yang datang berkunjung; sebagai identitas/ icon dari sebuah objek wisata/ daerah; sebagai tempat pemberian informasi kepada wisatawan yang datang berkunjung, mengenai sarana dan prasarana umum serta fasilitas yang tersedia didalam dan aktivitas wisata yang dapat dilakukan. termasuk memberikan informasi mengenai hal yang harus dipatuhi oleh wisatawan selama berada di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro; dan sebagai satu kesatuan fasilitas manajemen pengelolaan.

Penempatan gapura di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro berada di lokasi masuk daya tarik wisata yang menghubungkan dengan jalur lalu lintas utama. Lokasi penempatan gapura identitas dibuat strategis, mudah terlihat dan sebagai identitas/ penanda sebuah kawasan pariwisata atau daya tarik wisata.

Gambar 83

Ilustrasi Gapura Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Standar pembangunan gapura identitas pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro sesuai ketentuan teknis dimensi gapura identitas yaitu :

- 1) Tinggi gapura proporsional dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan aksesibilitas bagi kendaraan yang lewat;
- 2) Lebar tiang gapura: proporsional dengan dengan tinggi gapura;
- 3) Jarak antar tiang menyesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro serta lahan yang tersedia.

Gambar 84

**Rancangan Gapura Kawasan Daya Tarik Wisata
Tanjung Mallasoro**



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

h) **Loket**

Loket merupakan salah satu fasilitas pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro sebagai upaya untuk menciptakan pengelolaan kawasan daya tarik wisata yang profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini penting dilakukan sebagai bagian dari pengembangan informasi jumlah pengunjung pada waktu kunjungan tertentu serta pendapatan yang diterima melalui kunjungan wisatawan.

Pengelolaan pengunjung yang baik melalui penyediaan sarana loket yang nyaman beserta fasilitas pendukung yang memadai akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keamanan dan kenyamanan wisatawan serta keberlanjutan pemeliharaan dan perawatan fasilitas kawasan wisata termasuk manfaat ekonomis bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Gambar 85

Ilustrasi Loket Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

i) **Reservoir**

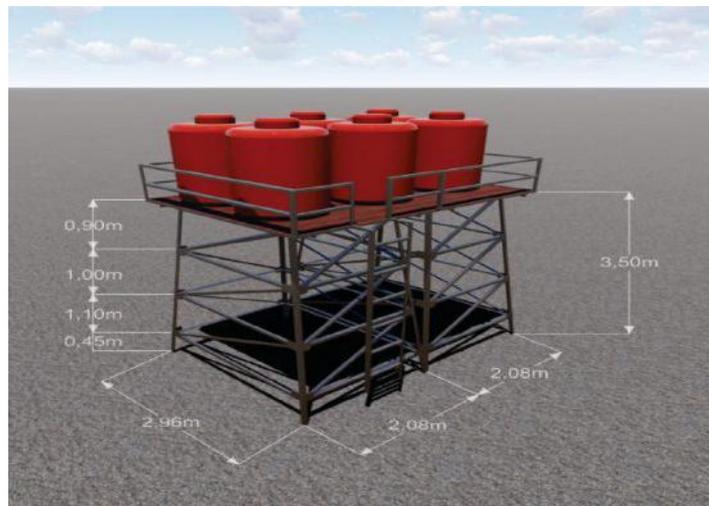
Untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro, selain menyediakan dan mengembangkan fasilitas dan atraksi wisata, juga harus diyakini ketersediaan air bersih khususnya untuk konsumsi air minum bagi wisatawan selama berada di daya tarik wisata. Untuk itu diperlukan fasilitas *reservoir*.

Fungsi utama *reservoir* adalah menyeimbangkan antara debit produksi dan debit pemakaian air yang berfluktuasi selama 24 jam. Pada saat jumlah produksi air bersih lebih besar dari pada jumlah pemakaian air maka untuk sementara kelebihan air disimpan dalam *reservoir* dan digunakan kembali untuk memenuhi kekurangan air pada saat jumlah produksi air bersih lebih kecil dari pada jumlah pemakaian air. Berdasarkan fungsinya, *reservoir* dalam sistem distribusi dibagi menjadi dua kategori yaitu *reservoir* pelayanan dan *reservoir* penyeimbang.

Reservoir pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro merupakan bangunan penampungan air sebelum dilakukan pendistribusian ke fasilitas-fasilitas yang membutuhkan air bersih dalam melayani kebutuhan wisatawan seperti di kamar, toilet, pusat kuliner, dan ruang ibadah. Bangunan *reservoir* diletakan pada ketinggian yang cukup untuk mengalirkan air secara baik dan merata ke seluruh fasilitas distribusi.

Desain bangunan *reservoir* pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 86
Desain Bangunan Reservoir Pada
Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Fasilitas penampungan air distribusi terletak di tanah berupa tangki, dimana tingginya lebih besar dari diameternya (bentuk silinder). *Reservoir* lebih umum dipakai untuk tempat penampungan yang lebih besar, biasanya berupa kolam, danau ataupun suatu tempat yang dibuat secara natural ataupun dikonstruksikan dengan menggunakan geografi alami dari alam sekitarnya. (sebagian besar *reservoir* berskala besar digunakan sebagai penampungan air baku, tidak untuk penampungan air bersih dalam sistem distribusi).

Material konstruksi *reservoir* dari beton dan baja adalah bahan yang paling banyak dipergunakan. Pengoperasian vasilitas penampungan biasanya berjalan secara otomatis sesuai dengan disain operasinya untuk mengatasi fluktuasi kebutuhan dan pasokan. Tangki akan terisi apabila pasokan air melebihi kebutuhan dan akan menjadi kosong apabila pasokan air lebih rendah dari kebutuhan.

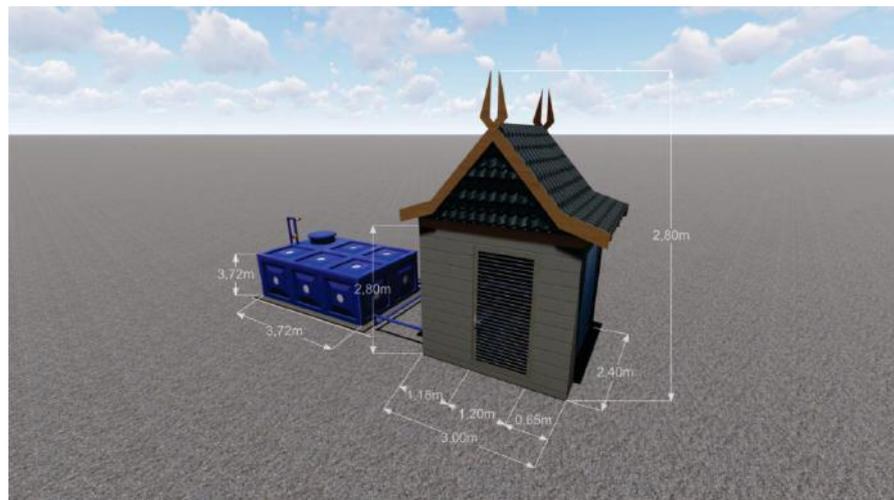
Optimalisasi sistem *reservoir* merupakan kegiatan pengalokasian sistem *supply* jaringan distribusi berdasarkan acuan letak dan kapasitas *reservoir* yang terbangun guna meningkatkan kualitas pelayanan distribusi dengan pendekatan besarnya beban-beban kebutuhan air pelayanan. Kegiatan optimalisasi *reservoir*

dilakukan melalui pendekatan-pendekatan terhadap : a) estimasi kebutuhan air bersih wilayah pelayanan; b) kondisi kapasitas aliran ke wilayah pelayanan; c) kondisi dan kapasitas sistem *supply* ke *reservoir*; dan d) jangkauan dan elevasi serta sistem pengaliran.

Konstruksi *reservoir* direncanakan berdasarkan standar-standar yang berlaku di Indonesia. Dalam pertimbangan teknis penentuan *reservoir* harus mempertimbangan kondisi geografis, misalnya *reservoir* beton lebih cocok dibangun di daerah pantai karena lebih tahan korosi dari pada baja. Tingkat kesulitan teknis akan tercermin dalam nilai biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Dari segi ekonomis, karena daya tahan beton lebih lama maka akan menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil dari pada baja. Sehingga apabila penyusutan dikuantifikasi ke biaya, *reservoir* beton akan lebih murah dari pada *reservoir* baja.

Desain bak penampungan *reservoir* pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 87
Desain Bak Penampungan Reservoir Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Reservoir ini harus ditutup untuk mencegah masuknya air hujan atau sampah/ kotoran ke dalamnya dan untuk melindungi dari gangguan manusia ataupun binatang. Konstruksi beton bertulang dimulai dari dinding bagian dalam yang menentukan bentuknya dan kawat/ besi *press stressed* baja yang dipasang membungkus bagian dalam. *Reservoir* yang telah selesai kemudian dilapisi dengan lapisan beton hidrolis. Desain dan konstruksi dari beton *press stressed* yang baik akan memberikan keuntungan antara lain : harga yang murah, relatif lebih kedap dan tidak memerlukan pengecatan ataupun *catodhic protection*. Kekuatan tariknya yang besar, maka konstruksi ini dibuat lebih tipis dan lebih sedikit tulangan baja dibanding dengan beton cetakan.

j) **Tempat Ibadah**

Tempat ibadah adalah bangunan yang disediakan untuk wisatawan yang hendak menunaikan kewajiban ibadahnya pada saat melakukan kegiatan wisata di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro.

Perencanaan tempat ibadah di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan tidak terganggu oleh aktivitas wisatawan lainnya; luas ruangan dapat menampung maksimal 30 orang; memiliki sistem sirkulasi udara atau *air conditioner* (AC) dan pencahayaan, pintu masuk dan keluar sesuai standar; dan penanda arah dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat. Desain bangunan tempat ibadah direncanakan memenuhi unsur keunikan, merepresentasikan tempat wisata, dan kekhasan budaya kabupaten Jeneponto.

Fasilitas penunjang yang disiapkan pada tempat ibadah di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas membersihkan diri yang terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, termasuk untuk penyandang disabilitas, yang masing-masing dilengkapi dengan: papan nama yang jelas; air bersih yang cukup; tempat cuci tangan dan pengering; dan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; dan alas kaki dan pendukung ritual ibadah yang bersih dan terawat.

Adapun rencana pengembangan tempat ibadah pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut :

Gambar 88
Desain Tempat Ibadah
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

k) **ATM Center**

ATM center adalah salah satu fasilitas perbankan yang saat ini menjadi salah satu amenities utama yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan wisata. Kebutuhan akan fasilitas tersebut didasari oleh perubahan pola hidup wisatawan dan masyarakat modern saat ini yang cenderung tidak lagi membawa uang tunai dalam melakukan perjalanan termasuk perjalanan berwisata.

Untuk dapat melayani kebutuhan transaksi perbankan, baik berupa pembayaran dengan kartu kredit (*credit card*) maupun kartu debit (*debit card*), maka dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dilengkapi dengan fasilitas anjungan ATM (ATM center) bekerjasama dengan berbagai bank yang beroperasi di kabupaten Jeneponto.

Fasilitas anjungan ATM, diperuntukkan bagi wisatawan yang ingin menarik tunai dan atau melakukan transaksi perbankan melalui kartu. Selain itu, untuk memberikan pelayanan pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu maka pada fasilitas utama seperti kamar, plaza kuliner, dan gerai cinderamata akan dilengkapi dengan mesin *Electronic Data Capture* (EDC).

Adapun rencana pengembangan fasilitas anjungan ATM pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 89
Ilustrasi Anjungan ATM Pada Kawasan Daya Tarik
Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Desain pengembangan fasilitas anjungan ATM pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 90
Desain Anjungan ATM Pada Kawasan Daya Tarik
Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

b. Rencana Penataan Lingkungan

1) Rencana Penanganan Sampah

Sampah yang dihasilkan pada kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dihasilkan dari beberapa sumber yaitu, sampah yang berasal dari wisatawan, sampah yang berasal dari pengelola (restoran/ dapur dan kemasan) dan sampah yang berasal dari alam dan dibawa secara langsung oleh laut ke wilayah pantai, pepohonan di kawasan, maupun oleh angin.

Penanganan sampah wisatawan di kawasan wisata dilakukan melalui pelibatan masyarakat dan wisatawan dengan memasang tanda-tanda pada titik-titik strategis untuk menganjurkan kepada wisatawan agar mereka membuang sampah pada tempat yang telah disediakan menurut jenisnya. Hal ini juga harus dibarengi dengan penyiapan wadah-wadah penampungan sampah yang standar sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik dan non-organik.

Gambar 91
Ilustrasi Penyediaan Tanda dan Wadah Sampah
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro





Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Penanganan sampah harus dibarengi dengan ketersediaan petugas untuk mengontrol sampah yang diatur berdasarkan area pemungutan sampah agar sampah tidak bertumpuk. Demikian pula dengan sampah yang dihasilkan dari outlet bisnis kawasan wisata Tanjung Mallasoro seperti sampah dapur, sampah restoran, sampah kamar tamu dan lainnya memerlukan tanda petunjuk dan tempat sampah yang standar, dan demi mendukung *sustainable tourism* dan *Zero Plastic Single Use*.

Selanjutnya penjadwalan pengangkutan sampah harus dilakukan untuk mengangkut sampah-sampah keluar dari kawasan agar sampah tidak bertumpuk pada kawasan untuk dibuang ke lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan sampah harus menjadi perhatian khusus karena akan menyangkut pada citra daya tarik wisata Tanjung Mallasoro ke depan. Untuk itu pihak pengelola seharusnya mengurangi penggunaan plastik agar tidak memberikan dampak pada wilayah tersebut (*Zero Plastic Single Use*).

Sampah yang dihasilkan oleh alam melalui kiriman/ bawaan dari laut, proses alami pepohonan dan binatang merupakan masalah yang cukup sulit untuk ditanggulangi. Cara penanganan utama adalah menyediakan petugas kebersihan yang akan aktif dalam mengumpulkan sampah-sampah dan melakukan pembersihan sampah pada pagi hari dan menanam sampah organik yang dapat terurai cepat pada tempat yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembersihan dan mencegah penumpukan sampah di kawasan daya tarik wisata.

2) Pengelolaan Limbah

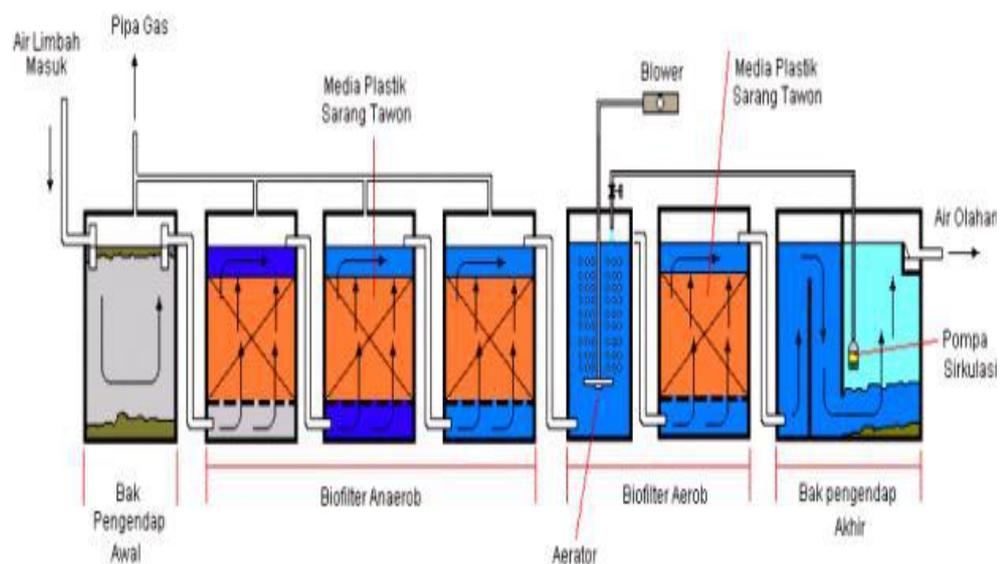
Limbah yang berasal dari sampah dapat dijadikan produk-produk daur ulang yang bermanfaat. Untuk itu pelatihan pengelolaan limbah sampah bagi masyarakat sekitar akan dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengolah limbah sampah tersebut menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Selain itu pengolahan limbah cair di kawasan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro harus menyesuaikan dengan jenis akomodasi dan

amenitas yang ada di sekitar pantai. Untuk area Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, sesuai dengan master plan akan dibangun sebuah resort yang memiliki sejumlah kamar, *meeting room* dan restoran. selain itu akan dibuat toilet umum untuk pengunjung pantai.

Jenis limbah cair yang akan di olah berasal dari dapur hotel, restoran, kamar tamu, dan toilet umum. Sistem pengolahan limbahnya akan bermuara ke satu sumber penampungan yang letaknya berada di belakang resort yang jauh dari rumah masyarakat. Pipa yang berasal dari *outlet-outlet* tadi akan menuju ke satu penampungan pengolahan limbah dengan sistem pengolahan limbah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 92
Sistem Pengolahan Limbah Cair
Pada Kawasan Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro



Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

BAB - 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Daya tarik wisata Tanjung Mallasoro memiliki potensi yang dapat menarik wisatawan minat khusus saat ini secara spesifik wisatawan yang akan melakukan aktivitas wisata berupa kitesurfing. Potensi yang ada seharusnya dikemas dengan baik untuk menjadikan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro menjadi satu sajian produk wisata yang berkualitas yang dapat dikunjungi oleh wisatawan berbagai tipologi dengan mengembangkan potensi yang ada. Kondisi alam seperti pantai, lagoon, zona lithoral yang datar dan wilayah daratan yang memiliki ruang memadai dapat menjadi modal utama untuk mengembangkan Daya Tarik Wisata ini dalam 5 (lima) aspek yaitu aksesibilitas, atraksi, aktivitas, akomodasi dan amenitas.

1. Pengembangan Aksesibilitas berfokus pada perbaikan jalan masuk dari jalan poros ke kawasan inti Daya Tarik Wisata Tanjung Mallasoro, gerbang masuk, pembuatan tanda arah, penerangan jalan yang memadai, dan petunjuk lokasi di kawasan.
2. Pengembangan Atraksi berfokus pada revitalisasi wilayah pantai dan penataan wilayah daratan serta zona lithoral untuk wisata bertemakan olahraga dan rekreasi berbasis pantai (wisata bahari).
3. Pengembangan aktivitas berfokus pada karakter utama yaitu *kitesurfing, wing surfing, wind surfing, canoeing, diving, snorkeling, horse riding, education dan camping*.
4. Pengembangan amenitas berfokus pada penguatan Daya Tarik Wisata berupa fasilitas pendukung seperti menara pemantau, pusat informasi, fasilitas pertemuan, restoran, gazebo, dermaga, gift shop (galeri), ATM Center, tempat ibadah, dan tempat parkir.
5. Pengembangan akomodasi berfokus pada pengembangan cottages dan camping ground.

B. Saran

Untuk dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi pariwisata terhadap masyarakat sekitar kawasan daya tarik wisata dan pemerintah daerah kabupaten Jeneponto, saran-saran sehubungan dengan pengembangan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan daya tarik wisata Tanjung Mallasoro yang berkualitas harus selalu mengutamakan kelestarian lingkungan yaitu lingkungan hidup dan lingkungan sosial sekitar.
2. Pembangunan sarana dan prasarana harus mengacu pada standar-standar yang ada sehingga daya tarik wisata tersebut memiliki kualitas yang berstandar internasional sehingga citra Daya Tarik Wisata tersebut dapat dijamin.
3. Pengelola dan masyarakat sebaiknya membuat paket-paket wisata yang sekitar Tanjung Mallasoro seperti *paket tracking* dan *horse riding*, paket *snorkeling*, paket *ATV Off Road Riding*, paket pengambilan dan pengolahan aren. Selain itu masyarakat dimotivasi untuk membuat oleh-oleh .
4. Masyarakat sekitar diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola daya tarik wisata berupa Pelatihan Bahasa Inggris Percakapan, Pelatihan Pembuatan Paket Wisata, Pelatihan Pemanduan Wisata, Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu/ Instruktur *Kitesurfing*, Pelatihan Instruktur *Wing Surfing* dan *Wind Surfing*, serta Pelatihan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Pengelolaan Pengunjung.
5. Untuk memberikan daya tarik tambahan, sebaiknya ada kawasan tertentu di sekitar daya tarik wisata Tanjung Mallasoro dibuat tempat pembiakan penyu agar wisatawan dapat juga terlibat dalam proses pengembangbiakan penyu yang juga dapat dikoneksikan dengan Daya Tarik Wisata di Pulau Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, P.A,** 1986, *Tourism and Its Significance in Local Development*, Michigan State University.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2017.** Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2018.** Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2018
- Briguglio, Lino,** dkk, 1996, *Sustainable Tourism in Island and Small States : Issues and Policies*, Biddles Limited, Guildford and Kings Lynn.
- Cook, S.D Stewart E, Ripass K,** 1992, *Tourism and the Environment. Travel Industry Association of America*, Washington DC.
- Cool, Mc. SF.** 1995, *Linking Tourism the Environment and Concepts of Sustainability Setting the Stage. The Annual Meeting of the Nation Recreation and Park Association.* Minneapolis MN.
- Gartner, William.** 1996. *Tourism Development: Principles, Process, and Policies.* Van Nostrand Reinhold, New York.
- Gunn, Clare.** 1994. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, 3rd ed.,* Taylor & Francis, Washington DC.
- Inskeep, Edward.** 1993. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach.* Van Nostrand Reinhold, New York.
- Harrison, David.** 1992, *Tourism and the Less Development Countries,* Halsted Press. New York.
- Jhonson, Peter, Barry Thomas,** 1993, *Perspectives on Tourism Policy,* Biddles Ltd. Guildford & Kings Lynn.
- Kusudianto, Hadinoto,** 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata,* UI Press. Jakarta
- Lea, Jhon,** 1993, *Tourism and Development in the Third World,* Routledge. London. New York.

- Mowforth, Martin dan Land Munt**, *Tourism and Sustainability; Development and New Tourism In The Third World*; Second Edition, Reutledge Taylor & Francis Group, 2003.
- Pearce, Douglass**, 1994, *Tourist Development*, Longman Singapore Publishers Ltd. Singapore.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011**, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016**, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/ Kota
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009**, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 .
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019**, Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015**, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012**, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006**, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014**, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018
- Smith, Valene L dan William R Eadington**, 1992, *Tourism Alternatives, Potentials and Problems in the Development of Tourism*, John Wiley & Sons. New York.
- Tisdell, Clement A dan Kartik C Roy**, 1998, *Tourism and Development : Economic, Social, Political and Environment Issues*, Nova Science Inc. USA.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Weaver, D.B, 2001, *Ecotourism as Mass Tourism : Contradiction or Reality? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, Edisi April, Ithaca. NY.

IDENTITAS PENULIS



Syamsu Rijal, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 Agustus 1968.

Menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar pada tahun 1997, kemudian melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Manajemen Pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2001. Pada tahun 2013

menyelesaikan program S3 jurusan Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Pada tahun 2019 memperoleh gelar profesi Certified Hospitality Educator (CHE) dari American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI).

Selain pendidikan formal, juga pernah mengikuti berbagai pelatihan seperti CBT/CBA The Best Quality Framework di Canberra Institute of Tafe-Australia, Competency Based Assessment di Queensland Tafe-Australia, Quality Tourism pada Centro Superior de Hosteleria the Galicia (CSHG) Santiago Decampostella Spanyol, Sandwich Like Program pada Northern Illinois University-Amerika Serikat, serta berbagai aktivitas *benchmark* pada perguruan tinggi terkemuka di Hongkong, Belanda, New Zealand, Australia, dan Kanada

Saat ini aktif dalam berbagai asosiasi profesi, Direktur Eksekutif Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Phinisi, peneliti dan penulis pariwisata, Master Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).



Buntu Marannu Eppang, Lahir di Poso pada tanggal 20 Oktober 1974

Menyelesaikan pendidikan pada Diploma Dua Usaha Perjalanan Wisata di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata (sekarang Politeknik Pariwisata Makassar) Tahun 1995 dan Tahun 2003 menyelesaikan Strata Satu Sastra Inggris - Fakultas Bahasa di Universitas Sawerigading. Tahun 2006 menyelesaikan

pendidikan program Master of Organisational Development & Training di Southern Cross University Australia. Selanjutnya Program Doktorat ditempuh di Universiti Teknologi Malaysia Fakultas Manajemen dengan konsentrasi Management in Tourism (HRD) dan selesai tahun 2017. Pada tahun 2019 memperoleh gelar profesi Certified Hospitality Educator (CHE) dari American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI). Selain pendidikan formal, juga pernah mengikuti berbagai pelatihan yang berhubungan kompetensi bidang pariwisata seperti Tour Packaging, Tour Guiding, MICE (tingkat sasar sampai lanjutan), TOT Tourism Destination

Management, Pendampingan Desa Wisata Master Trainer Destination Management, ASEAN Master Assessor (Vietnam), Sustainable Ecotourism (Jepang) serta MICE, Travel and Hospitality Upgrading Skills (Kanada).

Saat ini aktif dalam berbagai kegiatan yaitu Ketua Divisi Riset dan Pengembangan pada Badan Promosi Sulawesi Selatan, Ketua Pusat Studi Wisata Bahari, Manajer Standarisasi pada LSP Pihak Ketiga Phinisi, Trainer bidang pariwisata, Asesor kompetensi dan peneliti pariwisata.



Andi Ade Zulkifli, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 18 Maret 1986. Menyelesaikan pendidikan pada jurusan Perhotelan Program Diploma 3 di Akademi Pariwisata Makassar pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

AMKOP Makassar Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia yang diselesaikan pada tahun 2019. Sempat berkarir di dunia perhotelan di bidang Tatagraha, tahun 2009 bergabung di Politeknik Pariwisata Makassar dan kini fokus untuk mengabdikan diri untuk mengajar mahasiswa Jurusan Hospitality terkhusus di bidang Tatagraha dan Binatu. Selain itu aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2010 ikut dalam penelitian individu Politeknik Pariwisata Makassar dan di tahun-tahun selanjutnya menjadi bagian dari penelitian kelompok Politeknik Pariwisata Makassar

Selain aktif dalam Pendidikan, beliau juga aktif dalam keorganisasian. Pada tahun 2014 ikut dalam organisasi profesi Indonesian Houkeeper Association (IHKA) BPD SUL-SEL sebagai bendahara dan juga menjadi Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).



Ali Muhtasom, Lahir di Blitar Jawa Timur pada 11 Juni 1971.

Menjadi Dosen di Politeknik Pariwisata Makassar sejak tahun 2008 hingga 2019, Menyelesaikan Program Diploma III dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dari Akademi Pariwisata Makassar pada Jurusan Manajemen Perhotelan program studi Manajemen Divisi Kamar pada tahun 1997. Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN RI) Makassar setelah menyelesaikan program S1 pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) tahun 2004. Memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) setelah menyelesaikan studi program pasca sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Jurusan

Manajemen konsentrasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) tahun 2007. Berhasil mendapat gelar Doktor (Dr.) setelah menyelesaikan studi pada program pasca sarjana di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jurusan Manajemen konsentrasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2017.

Sebelum menjadi Dosen di Politeknik Pariwisata Makassar penulis juga memiliki pengalaman diantaranya bekerja di Marannu City & Tower Hotel Makassar (1991), Makassar Golden Hotel (1992 – 1994), Garden Palace Hotel Surabaya (1994 - 1995), Sheraton Hotel Surabaya (1996), Hotel Ciputra Jakarta (1997), Konsultan Sumber Daya Manusia pada PT. Ristecindo Makassar (2004 sd 2006), Konsultan Sumber Daya Manusia pada PT. Rahmat Delapan Putra (2010 sd 2016).

Saat ini penulis sedang aktif pada jabatan eselon III selaku Kepala Bagian (Kabag) Admisitrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Umum di Politeknik Pariwisata Makassar serta aktif pula pada beberapa asosiasi bidang perhotelan dan pariwisata.